

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP 2023



***DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH***

Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111
Telp/Fax (0536) 4270391 / Email : dinkes@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya berkat dan perkenan-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Palangka Raya, Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. Sayuti Syamsul, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja yang dinyatakan berhasil adalah yang capaian kinerjanya ≥ 75 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 ada 3 (tiga) sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90.33 persen (Sangat Berhasil). Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Dengan indikatornya Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) dengan capaian kinerja 100,1 persen (Sangat Tinggi).

2. Perbaiki Gizi Masyarakat.

- a. Dengan indikatornya Persentase Balita *Wasting* dengan capaian kinerja 126,6 persen (Sangat Tinggi).
- b. Dengan indikatornya Persentase Balita *Stunting* dengan capaian kinerja 134,2 persen (Sangat Tinggi).

3. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak.

- a. Dengan indikatornya Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 16,08 persen (Sangat Rendah).
- b. Dengan indikatornya Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 63,12 persen (Rendah).

Capaian indikator didukung oleh 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ke depan. *Pertama*, Implementasi program prioritas dengan mengacu pada arah kebijakan Gubernur untuk mewujudkan KALTENG BERKAH dan arahan Menteri Kesehatan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *kedua*, *multiple burden of disease*, yaitu: penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyakit oleh karena gaya hidup, *new emerging disease*, dan penyakit lama yang muncul kembali, *ketiga*, Beban ganda permasalahan gizi, *keempat*, mewujudkan tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), *kelima* Pemenuhan tenaga kesehatan, sarana prasarana yang berkualitas dan standarisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan	3
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.....	4
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas	5
E. Struktur Organisasi	15
F. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra).....	30
B. Strategi dan Sasaran.....	32
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
D. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023	35
E. Program Prioritas Pusat dan Daerah	36
F. Instrumen Pendukung.....	36
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	42
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	44
C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023.....	67
BAB IV. PENUTUP	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2023	16
Tabel 1.2	Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2023	17
Tabel 1.3	Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	19
Tabel 1.4	Jumlah dan Jenis Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	22
Tabel 1.5	Ringkasan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	24
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	34
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	35
Tabel 2.3	Anggaran Perubahan Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	36
Tabel 3.1	Kategori pencapaian Sasaran.....	40
Tabel 3.2	Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023	43
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Usia Harapan Hidup	44
Tabel 3.4	Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”	45
Tabel 3.5	Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Capaian Nasional Usia Harapan Hidup.....	45

Tabel 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Persentase Balita <i>Wasting</i> Dan Persentase Balita <i>Stunting</i>	48
Tabel 3.7	Analisis Capaian Indikator Sasaran “Perbaikan Gizi Masyarakat	49
Tabel 3.8	Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Target Nasional Persentase Balita <i>Wasting</i> dan Persentase Balita <i>Stunting</i>	49
Tabel 3.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Indeks).....	58
Tabel 3.10	Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak”	59
Tabel 3.11	Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Target Nasional Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Indeks)	60
Tabel 3.12	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	68
Tabel 3.13	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Per Progran dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	68
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2023.....	71
Tabel 3.15	Analisis Efisiensi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah.....	46
Gambar 3.2	Perkembangan <i>Wasting</i> di Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2023.....	51
Gambar 3.3	Perkembangan <i>Stunting</i> di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023.....	53
Gambar 3.4	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023.....	61
Gambar 3.5	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 (Pejabat Ess II)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pejabat Ess II, III, & IV)
3. Cascading Kinerja
4. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2022
5. Rencana Aksi
6. SOP Pengumpulan Data Kinerja
7. SK Tim Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

BAB.I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja Instansi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga dan institusi pemerintah yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

B. KEDUDUKAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu yang kemudian disempurnakan lagi dengan keluarnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdapat tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dari masing-masing dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan. Adapun tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan serta membantu Kepala Dinas dalam memfasilitasi informasi publik;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, keprotokolan arsip, informasi publik dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan penataan administrasi keuangan;
- g. Pembinaan dan penataan asset/barang milik daerah pada Dinas Kesehatan;
- h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- b. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Penyiapan Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Perumusan Kebijakan Operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- b. Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- b. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing UPT adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Tugas: melaksanakan pelayanan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan Pemantapan Mutu Eksternal Mikrobiologi.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Balai Laboratorium Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan rujukan;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai Laboratorium Kesehatan;
- d. Pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis;
- e. Pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
- f. Pelayanan pengujian higiene sanitasi;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
- h. Penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium;
- i. Pelayanan konsultasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan hasil laboratorium;
- j. Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
- k. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
- l. Pemantapan mutu eksternal mikrobiologi;
- m. Pelaksanaan pemasaran produk Balai Laboratorium Kesehatan;
- n. Penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan laboratorium;
- o. Pelayanan uji sertifikasi analisis kesehatan;
- p. Pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
- q. Pelaksanaan ketatausahaan;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Laboratorium Kesehatan; dan

- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

Tugas: merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Balai Pelatihan Kesehatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan keterampilan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
- d. Penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu pelatihan bidang kesehatan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelatihan Kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pusat Pengembangan Obat Tradisional Pada Dinas Kesehatan

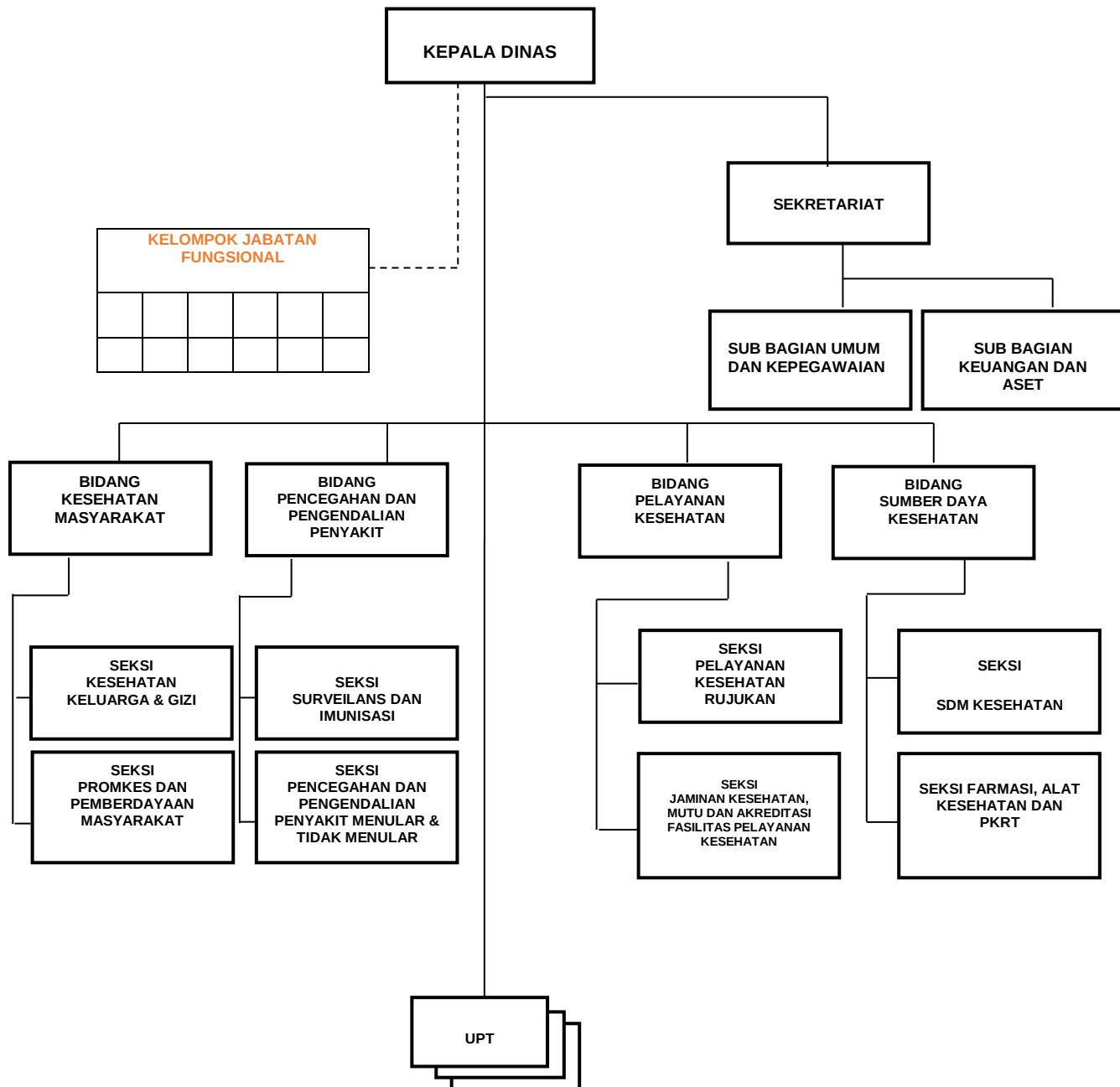
UPT-PPOT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan

terkait penyediaan bahan baku Obat Tradisional dan Pengembangannya

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyuluhan, pengawasan, pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia di Daerah;
- b. Pemberian layanan penyediaan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar baik itu simplisia maupun produk jadi obat tradisional;
- c. Melaksanakan uji mutu dan kualitas bahan baku serta produk obat tradisional;
- d. Melaksanakan kegiatan kultur jaringan tanaman untuk melestarikan tanaman obat yang ada di Daerah;
- e. Melakukan budidaya tanaman obat tradisional serta pengumpulan tanaman obat tradisional di Daerah;
- f. Melakukan promosi produk obat tradisional Provinsi Kalimantan Tengah melalui produk jamu dan simplisia;
- g. Melaksanakan pengembangan dan penelitian tanaman obat asli indonesia sebagai bahan baku obat tradisional terstandarisasi;
- h. Melaksanakan program saintifikasi jamu obat tradisional asli indonesia; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

E. STRUKTUR ORGANISASI



F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan Tugas Pokok fungsi dan Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut maka dapat dirumuskan aspek strategis yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal Daerah dan peluang

(*opportunities*) serta tantangan (*threats*) yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kekuatan (*strength*) yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Kelembagaan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Dinas di Provinsi
- 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan;
- 14 (empat belas) Kelembagaan Kesehatan di Kabupaten/Kota

2. Ketenagaan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal. Adapun jumlah Aparatus Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang di *updating* jumlah kepegawaian pada tahun 2023 sebanyak 166 orang dan dibantu oleh tenaga PHL/Kontrak sebanyak 25 orang. Adapun rincian ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
	Dinkes	
1	Struktural Eselon II	1 Orang
2	Struktural Eselon III	5 Orang
3	Struktural Eselon IV	8 Orang
4	Fungsional :	
	1) Arsiparis Mahir	1 Orang
	2) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1 Orang
	3) Apoteker Ahli Madya	2 Orang
	4) Apoteker Ahli Muda	2 Orang
	5) Administrator Kesehatan Ahli Madya	5 Orang
	6) Administrator Kesehatan Ahli Muda	15 Orang

No.	Jabatan	Jumlah
	7) Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2 Orang
	8) Sanitarian Terampil	1 Orang
5	Staff	59 Orang
	UPT. Bapelkes	
1	Struktural Eselon III	1 Orang
2	Struktural Eselon IV	1 Orang
3	Fungsional :	
	1) Administrator Kesehatan Ahli Madya	2 Orang
	2) Administrator Kesehatan Ahli Muda	1 Orang
	3) Widyaiswara Madya	4 Orang
4	Staff	13 Orang
	UPT. LABKESKAL	
1	Struktural Eselon III	1 Orang
2	Struktural Eselon IV	3 Orang
3	Fungsional :	
	1) Dokter Madya	2 Orang
	2) Dokter Muda	1 Orang
	3) Elektromedik Lanjutan / Mahir	1 Orang
	4) Pranata Labkes Madya	2 Orang
	5) Pranata Labkes Ahli Muda	3 Orang
	6) Pranata Labkes Penyelia	7 Orang
	7) Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan	4 Orang
	8) Pranata Labkes Pelaksana Terampil	1 Orang
	9) Asisten Apoteker Mahir	1 Orang
	10) Perawat Mahir	3 Orang
	11) Perawat Ahli Madya	1 Orang
	Staff	8 Orang
	UPT. PPOT	
1	Struktural Eselon III	1 Orang
2	Struktural Eselon IV	3 Orang
	Jumlah	166

Tabel 1.2
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
	Dinkes	
1	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	1 Orang
	Golongan IV / c	1 Orang

No.	Golongan	Jumlah
	Golongan IV / b	5 Orang
	Golongan IV / a	16 Orang
2	Golongan III / d	31 Orang
	Golongan III / c	16 Orang
	Golongan III / b	14 Orang
	Golongan III / a	11 Orang
3	Golongan II / d	3 Orang
	Golongan II / c	1 Orang
	UPT. Bapelkes	
1	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	-
	Golongan IV / c	3 Orang
	Golongan IV / b	2 Orang
	Golongan IV / a	2 Orang
2	Golongan III / d	4 Orang
	Golongan III / c	4 Orang
	Golongan III / b	1 Orang
	Golongan III / a	4 Orang
3	Golongan II / d	1 Orang
	Golongan II / c	1 Orang
	Golongan II / b	-
	Golongan II / a	-
	UPT. LABKESKAL	
	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	-
	Golongan IV / c	-
	Golongan IV / b	-
	Golongan IV / a	4 Orang
	Golongan III / d	11 Orang
	Golongan III / c	7 Orang
	Golongan III / b	8 Orang
	Golongan III / a	4 Orang
	Golongan II / d	-
	Golongan II / c	2 Orang
	P2OT	
	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	-
	Golongan IV / c	-
	Golongan IV / b	1 Orang
	Golongan IV / a	1 Orang

No.	Golongan	Jumlah
	Golongan III / d	2 Orang
	Golongan III / c	-
	Golongan III / b	-
	Golongan III / a	1 Orang
	Golongan II / d	-
	Golongan II / c	1 Orang
	JUMLAH	166

Tabel 1.3
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	Dinkes :	
	S3	
	Ilmu sosial sosial dan Politik	1 Orang
	S2	
1	Kesehatan Masyarakat	9 Orang
2	Gizi	1 Orang
3	Farmasi	1 Orang
4	Manajemen	3 Orang
5	Pendidikan Sains	1 Orang
6	Administrasi Publik	-
7	Ilmu Kesehatan	1 Orang
8	Manajemen Pemasaran	1 Orang
9	Ilmu Sosial dan Politik	2 Orang
10	Pendidikan	1 Orang
	S1	
1	Farmasi + Profesi	10 Orang
2	Kedokteran + Profesi	7 Orang
3	Kedokteran Gigi + Profesi	1 Orang
4	Ekonomi	5 Orang
5	Hukum	1 Orang
6	Ilmu Sosial dan Politik	3 Orang
7	Informatika	1 Orang
8	Keperawatan	6 Orang
9	Keperawatan + Profesi	-
10	Kesehatan Masyarakat	17 Orang
11	Pendidikan Gizi	2 Orang
12	Psikologi	1 Orang
13	Teknik	2 Orang
14	Teknik Lingkungan	1 Orang
	D4	

1	Pendidikan Bidan	1 Orang
2	Elektromedik	-
	D3	
1	Farmasi	3 Orang
2	Informatika	2 Orang
3	Keperawatan	4 Orang
4	Kesehatan Lingkungan	-
5	Kesejahteraan Sosial	1 Orang
6	Manajemen Informatika	1 Orang
7	Pendidikan Bidan	2 Orang
8	Teknik Elektromedik	1 Orang
9	Analisis Kesehatan	-
	SMA	
1	Sekolah Menengah Atas	16 Orang
	UPT.Bapelkes	
	S2	
1	Kesehatan Masyarakat	2 Orang
2	Administrasi Publik	-
3	Pendidikan Sains	2 Orang
4	Pendidikan	1 Orang
	S1	
1	Kedokteran + Profesi	1 Orang
2	Ekonomi	2 Orang
3	Ilmu Gizi Kesehatan	-
4	Ilmu Sosial dan Politik	-
	D3	
1	Bidan	1 Orang
2	Informatika	1 Orang
3	Kesehatan Lingkungan	1 Orang
4	Keperawatan	2 Orang
	SMA	
	Sekolah Menengah Atas	5 Orang
	UPT. Labkeskal	
	S2	
1	Kesehatan Masyarakat	1 Orang
2	Administrasi Publik	2 Orang
3	Pendidikan Sains	2 Orang
	Manajemen	1 Orang
	S1	
1	Kedokteran + Profesi	3 Orang
2	Keperawatan + Profesi	1 Orang
3	Pendidikan Sains	1 Orang

4	Teknik	1 Orang
5	Kesehatan Masyarakat	2 Orang
6	Administrasi Publik	1 Orang
	Pendidikan Kimia	1 Orang
	D4	
1	Elektromedik	1 Orang
	D3	
1	Analisis Kesehatan	9 Orang
2	Elektromedis	-
3	Farmasi	1 Orang
4	Keperawatan	3 Orang
5	Pendidikan Kimia	3 Orang
	SMA	
1	Sekolah Menengah Atas	2 Orang
	UPT. PPOT	
	S2	
1	Pendidikan Sains	1 Orang
2	Magister Farmasi	1 Orang
	S1	
1	Kesehatan Masyarakat	1 Orang
2	Farmasi	1 Orang
	D3	
1	Farmasi	1 Orang
	Jumlah	166

SuSumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

3. Sarana dan prasarana

Standarisasi sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan jasmani dan rohani, keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, cahaya dan ventilasi yang sehat, penataan yang bernilai estetika, dan perkembangan kantor sesuai volume/beban kerja dan struktur organisasi. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Tengah meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan rumah dinas. Adapun kondisi

sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

KODE	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP			189.311.424.020
1	TANAH			8.498.917.628
1.01	TANAH	13	bidang	8.498.917.628
2	PERALATAN DAN MESIN			96.295.581.426
2.01	ALAT BESAR	13	buah	1.996.194.651
2.02	ALAT ANGKUTAN	84	buah	12.201.824.833
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	95	buah	1.264.983.725
2.04	ALAT PERTANIAN	9	buah	17.826.854
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2725	buah	11.640.828.175
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANC	138	buah	2.134.264.391
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	320	buah	37.006.447.912
2.08	ALAT LABORATORIUM	255	buah	24.896.886.027
2.09	ALAT PERSENJATAAN	67	buah	99.014.200
2.10	KOMPUTER	446	buah	4.850.857.058
2.11	ALAT EKSPLORASI			0
2.12	ALAT PENGEBORAN			0
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			0
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI			0
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA			0
2.16	ALAT PERAGA			0
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	57	buah	73.178.600
2.18	RAMBU - RAMBU			0
2.19	PERALATAN OLAH RAGA			113.275.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			77.989.469.466
3.01	BANGUNAN GEDUNG	33	buah	77.669.091.966
3.02	MONUMEN			23.462.500
3.03	BANGUNAN MENARA			0
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			296.915.000
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			6.283.363.810
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	16	buah	645.899.050
4.02	BANGUNAN AIR	7	buah	498.398.900
4.03	INSTALASI	18	buah	4.844.765.860
4.04	JARINGAN	3	buah	294.300.000
5	ASET TETAP LAINNYA			171.942.690
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	491	buah	154.442.690
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYA	4	buah	17.500.000
5.03	HEWAN			0
5.04	BIOTA PERAIRAN			0
5.05	TANAMAN			0
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA			0
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI			0
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			72.149.000
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	buah	72.149.000
1.5	ASET LAINNYA			
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA			0
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA			0
	ASET TIDAK BERWUJUD			1.373.133.800
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	8	buah	1.373.133.800
	ASET LAIN-LAIN			4.966.019.056
4.01	ASET LAIN-LAIN	1314	buah	4.966.019.056

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

4. Keuangan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah didukung dengan berbagai sumber anggaran. Salah satu sumber dana tahun 2023 adalah berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Realisasi keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan OPD terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DPA OPD Tahun 2023 dimana dana tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam TAPKIN yang telah di tanda tangani bersama antara Kepala OPD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran akuntabilitas keuangan (realisasi keuangan) masing-masing program dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 yang termuat dalam Penetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. DPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 99.335.178.858 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 78.799.472.049 atau dengan serapan dana APBD mencapai 79,33%, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Ringkasan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan	1.136.000.000	1.763.280.500	155,22
Belanja	99.335.178.858	78.799.472.049	79,33
Belanja Operasional	92.456.166.516	74.657.812.349	80,75
Belanja Modal	6.879.012.342	4.141.659.700	60,21
Belanja Tidak Terduga	0	0	0
Belanja Transfer	0	0	0

Sumber: Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efesiensi dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2023.

Kelemahan (*weaknesses*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembangan bagi pejabat/petugas untuk mengembangkan kemampuan serta masih rendahnya kapabilitas.
2. Terbatasnya jumlah tenaga ASN kesehatan dan pengembangan kompetensi untuk setiap ASN.
3. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kemudian aspek strategis eksternal yang merupakan peluang (*opportunities*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

- a. Rencana Strategis Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD) yang menempatkan pembangunan kesehatan yang merata dan berkeadilan adalah program pokok dan prioritas untuk dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Keberadaan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPTD) yang mendukung program/kegiatan pembangunan di bidang kesehatan.
- c. Dukungan kerjasama Internasional dan Nasional untuk membantu di sektor kesehatan seperti *Global Found* yang terlibat dalam penanggulangan HIV AIDS, TB Malaria.
- d. Dukungan Pendanaan dari beberapa sumber dana transfer pusat seperti DAK, DID, DAU, DBH-DR, Dana Desa dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan juga dukungan pendanaan BTT.

Sedangkan aspek strategis eksternal yang merupakan tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Kualitas sebagian besar sumber daya manusia kesehatan yang masih rendah, hal ini sangat berpengaruh pada ketrampilan dan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Adanya peningkatan permasalahan gizi di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 dimana angka *wasting*, *stunting* dan gizi lebih pada balita masih diatas angka nasional sehingga perlu adanya penanganan yang serius.
3. Capaian AKI dan AKB yang belum maksimal, karena kasus kematian yang tercatat baik ibu dan bayi adalah yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Cakupan UCI yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Rasio dokter dan tenaga kesehatan strategis lainnya per 100.000 penduduk yang belum tercapai sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal.
6. Adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal) tahun 2018 yang merupakan indikator kinerja Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Isu-isu strategis bidang kesehatan yang berkembang seperti Program Indonesia Sehat berbasis pendekatan keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).
8. Adanya bencana Banjir yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Tengah.

Isu jumlah kematian ibu dan bayi serta isu status gizi masyarakat masih menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak gizi pada ibu hamil, bayi, balita, dan anak merupakan inverstasi besar bagi pembangunan nasional. Peningkatan status gizi masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan gizi.

Selain itu, isu perubahan paradigma dan penganggaran yang lebih di prioritaskan yaitu pelayanan preventif dan promotif, akreditasi sarana pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan program kesehatan berbasis keluarga.

Tantangan lain pembangunan kesehatan ke depan yang masih memerlukan upaya dan kerja keras adalah pengendalian program penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) dan penyehatan lingkungan. Penyakit menular seperti AIDS, TB, dan malaria di Kalimantan Tengah masih menjadi prioritas pembangunan kesehatan ke depan. Penyakit-penyakit infeksi telah banyak menurun walaupun belum semua dapat dieradikasikan. Namun ke

depan penyakit-penyakit degeneratif/penyakit tidak menular berpotensi besar sebagai penyebab kematian di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Kebiasaan masyarakat sangat besar peranannya dalam menyehatkan lingkungan, untuk itu peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini.

Tantangan besar yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah adalah masih belum terpenuhinya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih perlu pembenahan. Untuk itu ke depan, akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkannya.

Adapun potensi kendala yang akan dihadapi untuk tercapainya indikator sasaran antara lain:

1. Sistem pencatatan dan pelaporan yang masih belum maksimal sehingga data yang dihasilkan secara kualitas dan kuantitas masih kurang.
2. Keadaan ekonomi masyarakat yang menurun sehingga dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai jaminan pembiayaan kesehatan.
3. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal, karena banyak dalam pencapaian suatu indikator kesehatan melibatkan sektor terkait.
4. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat.
5. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil yang masih kurang.
6. Masih kurangnya SDM di Fasilitas Kesehatan serta menumpuknya tenaga kesehatan di perkotaan.

7. Kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana dan kegiatan belum menjadi prioritas.
8. Banyak penduduk yang masih belum merekam data kependudukan sehingga belum bisa menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
9. Masih banyak penduduk yang belum berminat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagian masyarakat belum memenuhi Kriteria kepesertaan sesuai standar Dinas Sosial dan Dukcapil.
10. Beberapa kabupaten kota belum mengalokasikan anggaran APBD untuk JKN.
11. Kurangnya minat dokter spesialis untuk ditempatkan di kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah dan kurangnya kemampuan daerah untuk mendatangkan tenaga dokter spesialis dasar maupun spesialis penunjang untuk di tempat di rumah sakit daerah atau rumah sakit kabupaten.

BAB. II.

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Adapun untuk rencana strategis dalam penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kita masih menggunakan Renstra 2021-2026.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun Visi, Misi dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah: **KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”**.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

2. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui

pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan

B. STRATEGI DAN SASARAN

1. Strategi

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
- b. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- d. Peningkatan pengendalian penyakit
- e. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- f. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09.
- b. Menurunnya persentase Balita Wasting yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%.
- c. Persentase Balita Stunting yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%.
- d. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3.
- e. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan OPD sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat OPD sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan

kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan naskah asli yang telah ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam lampiran, Tahun 2023.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sektor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Kesehatan				
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,19
2.	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7,5
3.		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	18,4
4.	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,9
5.		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	131

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

D. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Cara Perhitungan
Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70,19	Tahun	Jumlah Umur orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu di bagi dengan Jumlah orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu
Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7,5	Persen	(Jumlah balita dengan berat badan/tinggi badan di bawah -2 SD dibagi jumlah balita yang ditimbang dan diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
	Persentase Balita Stunting	18,4	Persen	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di Provinsi Kalimantan Tengah dibagi jumlah balita yang diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,9	Indeks	(Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 1000
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	131	Indeks	(Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Provinsi Kalimantan Tengah

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

				oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 100.000
--	--	--	--	---

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Anggaran Program Prioritas :

Tabel 2.3
Anggaran Perubahan Program Prioritas Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.998.717.170	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.511.744.038	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.827.569.050	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	127.050.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.098.600	
T O T A L		99.335.178.858	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Total Anggaran perubahan Tahun 2023 untuk Program Prioritas berjumlah Rp. **99.335.178.858,-** (**Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah**).

E. PROGRAM PRIORITAS PUSAT DAN DAERAH

Tujuan pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai

apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program Prioritas Nasional dan Daerah merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan nasional dan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Pada periode 2020-2024, program prioritas nasional bidang kesehatan meliputi:

1. Penurunan kematian maternal,
2. Penurunan kematian bayi,
3. Penurunan *stunting*,
4. Penurunan *wasting*, dan
5. Pengendalian penyakit.

Sedangkan program prioritas daerah Provinsi Kalimantan Tengah bidang kesehatan periode tahun 2021-2026 meliputi:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, serta bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yang terlayani 100%.
2. Meningkatkan rasio tempat tidur rumah sakit per jumlah penduduk, dengan kondisi saat ini sebesar 0,94 diharapkan pada tahun ke 5 menjadi 1.24.
3. Meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan.

4. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi/Balita (*Stunting, Wasting, AKB dan AKI*).
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Puskesmas.
6. Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
7. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular.
8. Tersedianya Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi menjadi rujukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Meningkatnya persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, dengan kondisi saat ini sebesar 83% diharapkan pada tahun ke 5 menjadi 98%.
10. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
11. Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan Yang Terintegrasi Dan Terstandarisasi.
12. Meningkatkan Pengembangan Obat Tradisional di Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Peningkatan Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
14. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.
15. Penguatan Jejaring *Public Safety Center* (PSC) 119.
16. Peningkatan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

F. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2023

Instrumen yang mendukung penerapan SAKIP di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat website www.dinkes.kalteng.go.id Website ini

menyediakan informasi yang berkaitan dengan kesehatan (profil kesehatan) dan data yang mendukung kesehatan dan layanan aduan.

2. Aplikasi E Sakip yang bisa diakses melalui website: <http://esakip.dinkes.kalteng.go.id> Aplikasi ini dikembangkan sebagai instrumen untuk mengumpulkan semua data yang terkait dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini sudah memiliki dashboard, berisikan tabel IKU, PK, RKT, DPA, SOP, SKP ASN Laporan SAKIP dan LKIP serta data pendukung lainnya.
3. Komunikasi Gizi yang bisa diakses melalui website: www.sigizi.kemendes.go.id yang berisi website yang dikembangkan Kementerian Kesehatan untuk pelaporan terpadu program gizi yang berisikan tabel indikator, grafik indikator dan laporan kegiatan.
4. Komunikasi Data (Komdat): Sistem informasi untuk menyampaikan laporan capaian program tentang derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan. Situs ini dapat dibuka melalui website www.komdat.kemkes.go.id
5. SPM (Standar Pelayanan Minimal): Sistem informasi capaian SPM kabupaten/kota dan SPM Provinsi melalui <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login>.
6. Pelaporan terpadu TB: SITTB (Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis) adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang dikembangkan Kementerian kesehatan.
7. Kesehatan berupa software TB elektronik yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data untuk penyelesaian laporan triwulan penemuan kasus, hasil konversi, dan hasil pengobatan TB.
8. SIHA (Sistem Informasi HIV dan AIDS): software sistem pencatatan dan pelaporan terpadu yang dikembangkan

Kementrian Kesehatan untuk program HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual.

9. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) adalah suatu program aplikasi komputer untuk pelaksanaan kegiatan menghimpun data PNS, merekam perubahan, serta menyimpan dalam satu database. Dari database dapat dijadikan sumber data dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan output yang dapat dijadikan informasi kepegawaian.
10. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah adalah sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aplikasi ini dapat diakses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (kemendagri.go.id). = <https://kaltengprov.sipd.kemendagri.go.id/>

BAB.III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023***

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Penilaian keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan Skala Ordinal yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1: Kategori Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	> 90 %	Sangat Tinggi (sangat berhasil)
II	75% s/d 90%	Tinggi (berhasil)
III	65% s/d 75%	Sedang (cukup berhasil)
IV	50% s/d 65%	Rendah (kurang Berhasil)
V	< 50 %	Sangat Rendah (tidak berhasil)

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap

instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Capaian 2022	Tahun 2023			
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,74	70,04	70,19	70,27	100.1	Sangat Tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	13,9	5,7	7,5	5.5	126.6	Sangat Tinggi
3		Persentase Balita Stunting	Persen	32,3	12,5	18,4	12.1	134.2	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	7,5	7,3	6,9	12,69	16.08	Sangat Rendah
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	140	146	131	179,3	63,12	Rendah

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan.

Hasil analisis 3 (tiga) sasaran strategis Dinas kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah berikut:

1. Evaluasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan** diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu: Umur Harapan Hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Usia Harapan Hidup

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Jumlah Umur orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu di bagi dengan Jumlah orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan dengan indikator Umur Harapan Hidup pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup dengan capaian kinerja sasaran indicator sebesar 100,1 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1. Usia Harapan Hidup	Tahun	69,79	70,04	70,19	70,27	100.1

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Capaian Nasional Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Nasional	Realisasi	Keterangan
Usia Harapan Hidup	72,13	70,27 Tahun	Masih dibawah capaian nasional

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (***life expectancy at birth***) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Usia Harapan Hidup yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai data awal penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah 69,84 tahun dengan capaian akhir sebesar 71,09 tahun pada akhir renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan (2026). Target usia harapan hidup pada tahun 2023 sebesar 70,19 tahun dengan capaian 70,27 tahun. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.1 Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Gambar diatas diketahui ada peningkatan usia harapan hidup diprovinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS pada Tahun 2023 Realisasi UHH telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70,27 dari target 70,19 dengan capaian kinerja sebesar 100,1% atau melebihi target, Capaian UHH Tahun 2023 meningkat 0,08 poin bila dibandingkan dengan capian UHH tahun 2022 sebesar 70,04. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kalimantan Tengah rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 70,27 tahun.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Faktor pendorong tercapainya UHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya pembangunan Rumah sakit Provinsi di Wilayah Barat yang telah mencapai tahap penyelesaian. Saat jumlah sarana pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Rumah sakit sebanyak 32 unit, 204 puskesmas, Puskemas Pembantu sebanyak 1.147 unit, Unit Transfusi darah 14 unit dan Laboratorium Kesehatan daerah sebanyak 15 unit.
2. Dalam mendukung indikator Usia Harapan Hidup capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2023, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap beberapa faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas adalah:
 - a. Menurunnya persentase balita *wasting* dan *stunting* adalah karena jumlah profesi nutrisisionis mengalami peningkatan dengan dikontraknya tenaga ahli profesi dan CPNS yang tersebar hampir merata di seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini berdampak positif pada meningkatnya sistem surveilans gizi. Sistem ini mulai berjalan dengan lebih integratif sehingga penemuan kasus dapat lebih menyusur ke

lokasi yang lebih terpencil, sehingga intervensi pun dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu meningkatnya daya beli masyarakat memberikan kontribusi dalam pemenuhan ketersediaan pangan di tingkat keluarga yang berimplikasi pada kecukupan nilai gizi anggota keluarga.

- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah terorientasi Kegawatdaruratan pada Maternal dan perinatal sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi dapat langsung tertangani dengan baik, sehingga menurunkan jumlah kematian pada ibu dan bayi.

2. Evaluasi Sasaran Perbaikan Gizi Masyarakat

Tolak ukur capaian sasaran “**Perbaikan Gizi Masyarakat**” diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu: Persentase Balita Wasting dan Persentase Balita Stunting. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Persentase Balita Wasting dan Persentase Balita Stunting

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita <i>Wasting</i>	(Jumlah balita dengan berat badan/tinggi badan di bawah -2 SD dibagi jumlah balita yang ditimbang dan diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
		2. Persentase Balita <i>Stunting</i>	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di Provinsi Kalimantan Tengah dibagi jumlah balita yang diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen

Kinerja sasaran **“Perbaikan Gizi Masyarakat”** dengan indikator persentase balita *wasting* dan persentase balita *stunting* pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. Persentase balita *wasting* dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 126,6 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil) 2. Persentase balita *stunting* dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 134,2 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Analisis Capaian Indikator Sasaran “Perbaikan Gizi Masyarakat”

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1. Persentase Balita <i>Wasting</i>	Persen	7,6	5,7	7,5	5.5	126.6
2. Persentase Balita <i>Stunting</i>	Persen	27.4	12,5	18,4	12.1	134.2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Target Nasional Persentase Balita *Wasting* dan Persentase Balita *Stunting*

Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Keterangan
1. Persentase Balita <i>Wasting</i>	7,3 Persen	5.5 Persen	Tercapai
2. Persentase Balita <i>Stunting</i>	16 Persen	12.1 Persen	Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Balita *Wasting*

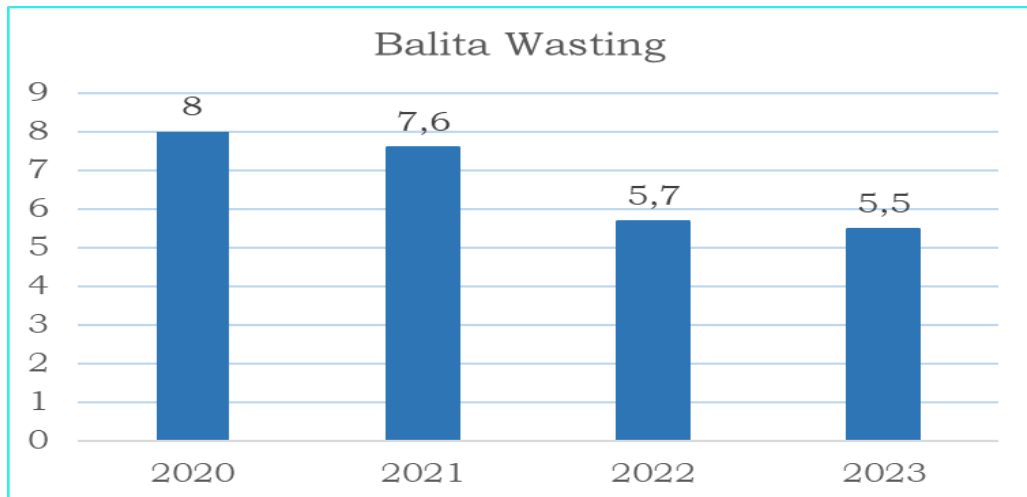
Wasting adalah permasalahan kesehatan yang paling menonjol di negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang yang dampaknya sangat besar. *Wasting* memberikan dampak peningkatan risiko kesakitan pada anak-anak bahkan meningkatkan resiko kematian anak. Anak-anak yang *wasting* akan mudah terkena penyakit infeksi hal ini karena sistem kekebalan tubuh anak yang menurun. Jika Kondisi kurang gizi pada usia anak balita terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatannya dimasa depannya.

Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Pemicu *wasting* biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah. *Wasting* tidak dapat dianggap sepele sebab jika penanganannya terlambat bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

Anak yang menderita stunting akibat kekurangan zat gizi protein secara kronis atau anak yang mengalami *wasting* akibat kehilangan berat badan secara akut dapat dimasukkan ke dalam kriteria anak gizi kurang atau *underweight*. Sebaliknya anak yang memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badan seharusnya pada usia tersebut maka disebut anak menderita obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan dan dapat mengganggu kesehatan yang diukur berdasarkan standar WHO.

Perkembangan kasus *wasting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan stunting tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Perkembangan Wasting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2023

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus *wasting* di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi *wasting* sebesar 8 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7,6 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5,5 persen. Data prevalensi *wasting* yang digunakan bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.

Penurunan prevalensi *wasting* pada balita disebabkan salah satunya karena pemenuhan asupan kalori dan protein melalui pemberian PMT pada balita yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu pelayanan kesehatan dasar pada balita yang sudah tambah baik dan pemenuhi hygiene dan

sanitasi yang memadai ikut memberikan andil pada penurunan *wasting* pada balita.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini khususnya *weight faltering* (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada dibawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu. Untuk anak yang memiliki status gizi buruk dan gizi kurang (*wasting*), dilakukan validasi dan assesment oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan), skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan recall asupan makan. Petugas gizi bersama lintas program dan lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalan data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah. Upaya lainnya untuk menurunkan angka balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan Pemberian Makanan Tambahan berupa biskuit kepada anak usia 6-59 bulan dengan status gizi kurang. Pemberian PMT balita gizi kurang diharapkan mampu mencegah kejadian gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah. Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk dan gizi kurang. Pendampingan dilakukan untuk memantau asupan, pola asuh, dan kesehatan lingkungan yang dilakukan keluarga kepada anak dengan status gizi buruk dan gizi kurang.

b. Prevalensi *Stunting* (TB/U) Balita di Kalimantan Tengah

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia

masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan (Aryastami dan Tarigan, 2017). Balita pendek mencakup dua kategori yaitu pendek dan sangat pendek, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang atau tinggi badan menurut umur balita terhadap standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005 yang memiliki nilai *z-score* yang berada kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) dikategorikan sebagai (pendek/*stunted*) atau memiliki nilai *z-score* yang berada kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) yang dikategorikan sebagai (sangat pendek/*severely stunted*) (Antonio, W. H. O. & Weise, S, 2012).

Perkembangan kasus *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan *stunting* tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3 Perkembangan Stunting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 32,3

persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27,4 persen dan kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 12,5 persen dan terakhir menjadi 12,1 persen pada tahun 2023. Penurunan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi pada tahun 2022 dan tahun 2023 disebabkan karena penggunaan data *stunting* yang bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas Kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.

Tingginya tingkat capaian pada sasaran perbaikan gizi masyarakat disebabkan penanganan gizi kurang, gizi buruk dan gizi pendek dipelayanan kesehatan dasar maupun rujukan sudah lebih optimal, terlatihnya tenaga gizi dan dokter spesialis anak dalam penanganan gizi balita, pemberian makanan tambahan kepada balita sejak terdeteksi kurus untuk mencegah terjadinya gizi buruk, adanya program peningkatan program ASI eksklusif dan partisipasi masyarakat.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan telah terlibat dalam upaya melakukan intervensi spesifik 8000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung *stunting* yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran antara lain:

Faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja terkait dengan perbaikan gizi masyarakat melalui intervensi sensitif dan spesifik *stunting* menurut Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

1. Remaja Putri

Intervensi spesifik yang dilakukan pada remaja putri antara lain melakukan screening status Hb, melakukan screening kesehatan remaja di sekolah, adanya posyandu remaja di wilayah, pemberian suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri di sekolah dan di wilayah, skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), KIE tentang anemia, pentingnya TTD, gizi seimbang, PHBS, Germas. Intervensi sensitifnya antara lain: Edukasi literasi gizi melalui kegiatan AKSI bergizi di sekolah, Posyandu Remaja.

2. Calon Pengantin

Intervensi spesifik yang dilakukan pada calon pengantin antara lain melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah di puskesmas, konseling gizi, konseling persiapan pernikahan melalui psikologi, suplementasi TTD untuk mencegah anemia dan suplemen asam folat untuk persiapan kehamilan. Sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan pada calon pengantin antara lain pendataan calon pengantin oleh kelurahan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA.

3. Ibu Hamil

Intervensi spesifik yang dilakukan pada ibu hamil antara lain ANC terpadu, konseling gizi, kelas ibu, suplementasi TTD dan asam folat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa biskuit untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Intervensi sensitifnya antara lain: Kader Pendampingan ibu hamil, peningkatan akses air minum yang aman, peningkatan akses sanitasi yang layak, akses jaminan kesehatan, akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH), pemberian bantuan protein hewani berupa telur, ayam, dan lele untuk ibu hamil.

4. Ibu Menyusui

Intervensi spesifik yang dilakukan ibu menyusui antara lain Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk merangsang produksi ASI,

pemberian TTD 40 tablet dan vitamin A dosis tinggi sebanyak 2 kapsul untuk memulihkan kesehatan ibu nifas, promosi dan konseling menyusui. Intervensi sensitif yang dilaksanakan antara lain: kelas ibu, kelompok pendukung ibu, kader pendamping ibu menyusui, akses pelayanan Keluarga Berencana (KB), akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)

5. Balita

Intervensi spesifik yang dilakukan pada balita antara lain

- 1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu atau fasyankes
- 2) Promosi dan konseling Pemberian Makan untuk Bayi dan Anak (PMBA)
- 3) Suplementasi Vitamin A
- 4) Suplementasi zinc untuk diare
- 5) Tatalaksana gizi buruk akut
- 6) Pencegahan kecacingan
- 7) Pemberian Makanan Tambahan
- 8) Imunisasi
- 9) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah

1. Orang tua balita tidak merasa anaknya bermasalah gizi.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Pemantauan pertumbuhan mandiri di rumah belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita karena ibu balita tidak memiliki timbangan dan alat ukur panjang/tinggi badan. Pemantauan pertumbuhan mandiri merupakan pemantauan pertumbuhan yang dilaksanakan secara mandiri oleh ibu atau pengasuh balita di rumah, kemudian data BB dan atau TB disetorkan/dilaporkan kepada kader. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi balita yang tidak dapat hadir

ke posyandu ketika jadwal posyandu agar tetap tercatat berat dan tinggi badannya. Namun masih terdapat kelemahan dalam pemantauan mandiri, antara lain:

- a. Alat timbang yang digunakan belum standar (menggunakan timbangan injak kamar mandi, dimana deviasinya sampai 500 gram).
 - b. Cara membaca angka pada timbangan yang kurang tepat (mata tidak sejajar dengan skala timbangan).
 - c. Alat ukur panjang atau tinggi badan yang digunakan tidak standar (menggunakan metline/pita ukur yang tidak dipasang dengan benar).
 - d. Kesalahan teknis pengukuran sehingga meningkatkan risiko data yang kurang valid.
 - e. Saat penimbangan dan pengukuran masih menggunakan pakaian tebal, popok sekali pakai, alas kaki, topi, kunci rambut, saku baju/celana tidak dalam kondisi kosong, dsb.
3. Kurangnya pemanfaatan buku KIA. Pencatatan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di buku KIA tidak lengkap sehingga deteksi dini gagal tumbuh (*weight faltering*) di posyandu tidak berjalan optimal. Balita tidak naik (T) belum dirujuk ke puskesmas.
 4. Konseling/penyuluhan gizi di meja 4 posyandu belum berjalan dengan baik.
 5. Masih rendahnya cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N).
 6. Belum semua balita bermasalah gizi datang ke puskesmas untuk dilakukan validasi dan assesment.
 7. Balita tidak memiliki dokumen kependudukan/tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.
 8. Balita dari pernikahan remaja (ibu masih bersekolah).
 9. Adanya lebih dari 1 balita stunting dalam 1 keluarga.

10. Ibu balita yang bekerja menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anaknya kepada pengasuh balita tanpa dibekali arahan terkait pemberian makan.
11. Ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak.
12. Petugas belum optimal dalam mendampingi balita bermasalah gizi

2. Evaluasi Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

Tolak ukur capaian sasaran “**Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak**” diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu: Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (indeks) dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	(Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 1.000
		2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	(Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

Kinerja sasaran **“Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak”** dengan indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (indeks) dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks) pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 16,8 dengan predikat sangat rendah 2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 63,12 dengan predikat rendah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak”

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	(indeks)	8,4	7,3	6,9	12,69	16,08
2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	(indeks)	214	146	131	179,3	63,12

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Target Nasional Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Keterangan
1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	17,6	12,69	Tercapai
1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	194	179,3	Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status Kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

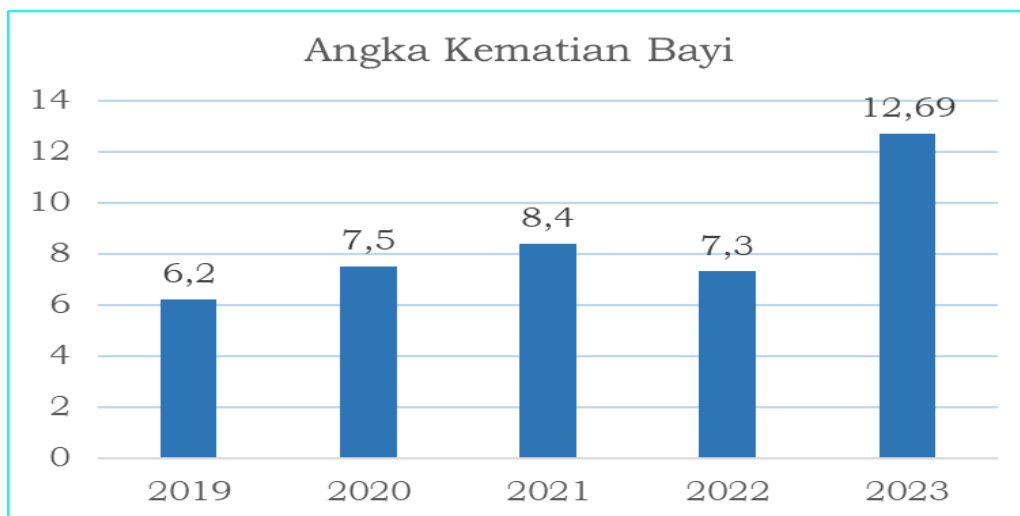
Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.

Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat

dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030.

Gambaran Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini.

Gambar 3.4 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Gambar diatas menggambarkan perkembangan angka kematian pada bayi yang mengalami sedikit mengalami fluktuasi namun capaian yang telah diperoleh jauh dibawah target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 angka kematian bayi berada pada angka 6,2 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,3 per 1.000 kelahiran hidup dan Kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 12,69 per 1.000 kelahiran hidup.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi untuk kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, masih belum

mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,3. Namun jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 berjumlah 517 bayi. Bayi paling banyak meninggal di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 107 bayi, kemudian Kota Palangka Raya sebanyak 92 bayi dan Kabupaten Kapuas sebanyak 46 bayi. Kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023, paling banyak terjadi 1 bulan pertama kehidupan (neonatal) 454 bayi (87,82 persen), sisanya postnatal sebanyak 63 bayi (12,18 persen). Penyebab utama kematian neonatal di Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyebab lain-lain sebesar 137 bayi (30,17 persen), Asfiksia sebanyak 133 bayi (29,29 persen) dan Berat Badan Lahir Rendah/dan prematuritas (27,75 persen). Sedangkan penyebab utama kematian bayi usia postnatal adalah penyebab lain-lain sebesar 36 bayi (57,14 persen), Kondisi perinatal sebanyak 10 bayi (15,87 persen) dan Pneumonia sebanyak 9 bayi (14,28 persen). Berdasarkan data diatas masalah kematian neonatal mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor pada ibu selama hamil dan ibu melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi status kesehatan pada saat remaja dan masa - masa sebelumnya.

b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk

menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tujuan ke 1 yaitu mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH pada tahun 2030.

Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Gambaran AKI di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut ini.

Gambar 3.5 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

Gambar diatas menggambarkan trend kematian pada ibu yang terjadi cukup fluktuatif, pada tahun 2019 angka kematian ibu berada pada angka 166 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan menjadi 214 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 dan turun kembali menjadi 143 pada tahun 2022 dan naik kembali menjadi 179,3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023.

Terkait dengan target dan realisasi indikator sasaran angka kematian ibu untuk kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 122. Namun jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, indikator sasaran Angka Kematian Ibu yang cukup fluktuatif, hal ini memiliki arti jumlah kasus kematian ibu mengalami fase naik dan turun. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai risiko dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Risiko dekat secara langsung dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan kesehatan/penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Selain itu terdapat juga risiko jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu melalui pengaruhnya terhadap risiko antara, Yaitu faktor sosiokultural dan faktor ekonomi, seperti status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dalam masyarakat dan tingkat ekonomi ibu dan/atau keluarganya.

Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu antara lain:

- 1) Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan standar 6 kali dan tidak semua ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh: beberapa fasyankes masih sulit di akses, kesiapan fasyankes, pembiayaan dan faktor sosial budaya yang masih kental.
- 2) Sistem rujukan yang belum terintegrasi dimana beberapa fasyankes primer dan sekunder masih menggunakan rujukan manual.
- 3) Kemampuan/Kompetensi tenaga kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kedaruratan maternal dan neonatal, keterbatasan peralatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Tidak semua Puskesmas perawatan mampu PONED/Penanganan Kegawat darurat maternal dan neonatal. Penanganan komplikasi obstetrik maternal masih rendah.
- 4) Belum semua puskesmas memiliki alat deteksi resiko dan komplikasi kehamilan (USG) dan dokter umum yang ada di puskesmas belum semuanya mendapatkan pelatihan penggunaan USG dasar sehingga ada keterlambatan dalam mendeteksi resiko dan komplikasi kehamilan.
- 5) Belum semua puskesmas melaksanakan program kesehatan pelayanan kespro (catin dan PUS) terutama dalam melaksanakan skrining layak hamil.
- 6) Meskipun pertolongan persalinan oleh nakes sudah cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu namun Persalinan di Fasilitas Kesehatan juga masih rendah. Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah sehingga ada beberapa ibu

bersalin mengalami komplikasi pada saat melahirkan tidak mendapatkan pelayanan dan penanganan yang terstandar (terlambat mendapatkan pertolongan).

Dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas kesehatan,
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode *blended learning*,
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, P4K, Posyandu remaja, dan
- 4) Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan E kohort.
- 5) Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

Akuntabilitas keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan OPD terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DPA OPD Tahun 2023 dimana dana tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja yang telah di tanda tangani bersama antara Kepala OPD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran akuntabilitas keuangan (realisasi keuangan) masing-masing program dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 yang termuat dalam Penetapan Kinerja (PK).

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efesiensi dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban Urusan Kesehatan yang mengampu beberapa program yang dilaksanakan yaitu sebanyak 5 Program dan beberapa kegiatan yang terbagi habis pada 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPT yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pelatihan Kesehatan serta P2TO, sedangkan Pagu Anggaran di tahun 2023 sebesar Rp. 99.335.178.858,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 78.799.472.049 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh

Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 79,33 persen dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.998.717.170	30.328.453.302	91,90
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.511.744.038	39.472.355.827	69,85
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.827.569.050	8.081.694.620	91,55
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	115.392.100	90,82
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.098.600	801.576.200	92,12
T O T A L		99.335.178.858	78.799.472.049	79,33

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.998.717.170	30.328.453.302	91,90
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	438.436.166	287.600.577	65,60

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

	Perangkat Daerah			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.513.543.117	20.608.360.087	91,54
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	207.757.625	196.697.795	94,68
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.000.000	357.986.080	87,31
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.044.601.277	1.945.228.151	95,14
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.767.399.225	2.654.760.300	95,93
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.528.309.260	3.215.655.765	91,14
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.670.500	1.062.164.547	97,57
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.511.744.038	39.472.355.827	69,85
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	16.175.780.730	11.260.421.895	69,61
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	36.926.427.308	24.874.908.928	67,36
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	183.000.000	178.513.380	97,55
4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.226.536.000	3.158.511.624	97,89
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.827.569.050	8.081.694.620	91,55
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	5.551.265.800	4.999.849.807	90,07

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.276.303.250	3.081.844.813	94,06
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	115.392.100	90,82
1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	127.050.000	115.392.100	90,82
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.098.600	801.576.200	92,12
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	612.900.000	578.504.200	94,39
2	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	182.198.600	169.150.000	92,84
3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	53.922.000	71,90

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Semua sub kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,19	70,27	100,1	99.335.178.858	78.799.472.049	79,33
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7,5	5,5	126,6			
		Persentase Balita Stunting	18,4	12,1	134,2			
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,9	12,69	16,08			
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	131	179,3	63,12			

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Tabel 3.15 Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (69,85%) 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (91,55%) 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (90,82%) 4. Program	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (30,15%) 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (8,45%) 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (9,18%) 4. Program
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persentase Balita Wasting		
		Persentase Balita Stunting	Persentase Balita Stunting		
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Tidak mencapai (≥100%)		
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Tidak mencapai (≥100%)		

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (92,12%) 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (91,90%)	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (7,88%) 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (8,1%)
--	--	--	--	--	---

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian 5 sasaran strategis dengan 3 sasaran berpredikat sangat tinggi dan 1 sasaran berpredikat sangat rendah dan 1 sasaran berpredikat rendah, dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran a) “Meningkatnya kualitas kesehatan” b) “Perbaikan gizi masyarakat” dan c) “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” telah mencukupi dan ada efisiensi anggaran.

1. Efisiensi anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat: sebesar 30,15% efisiensi tersebut diantaranya terdapat pada kegiatan paling banyak ada di Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
2. Efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan: 8,45%. Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal misalnya Bantuan tugas belajar yang tidak terserap. sisa belanja honor narasumber pelatihan, perjalanan dinas (transport peserta).

3. Efisiensi anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman: 9,18% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap pada Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan.
4. Efisiensi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan: 7,88% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi dan Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.
5. Efisiensi anggaran pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota: 8.1% efisiensi program pendukung yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

D. Prestasi dan Penghargaan

Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan sebagai Provinsi Dengan Indeks Persepsi Masyarakat Terbaik Terhadap Pelayanan Puskesmas tahun 2023.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) Award 2023.

3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah meraih terbaik Harapan 2 dalam Kategori penilaian Website e-ASPIRASI tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

E. Inovasi

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya manusia bukan sebagai penghambat dalam mencapai sasaran kinerja, bahkan dapat sebagai pemicu berbagai ide kreatif dan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai inovasi sebagai upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan:

1. Penggunaan aplikasi E SAKIP sebagai instrumen untuk mengumpulkan semua data yang terkait dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini sudah memiliki dashboard, berisikan tabel IKU, PK, RKT, DPA, SOP, SKP ASN Laporan SAKIP dan LKIP serta data pendukung lainnya.
2. Penggunaan aplikasi STR-Metal yaitu sebuah aplikasi untuk legalisir STR melalui digital, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan legalisir tanpa harus ke Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB.IV

P E N U T U P

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan 3 Sasaran dengan 5 (lima) indikator

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2023.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Kegiatan program-program pembangunan kesehatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam rencana kegiatan tiap tahun. Adapun rincian capaian kinerja untuk 3 Sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas kesehatan” terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,1 persen kategori Sangat Tinggi.
2. **Sasaran 2** “Perbaikan gizi masyarakat” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 130,4 persen kategori Sangat Tinggi.
3. **Sasaran 3** “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 39,6 persen kategori Sangat Rendah.

Adapun alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.99.335.178.858,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.799.472.049,- dengan persentase penyerapan sebesar 79,33%.

Masalah pembangunan kesehatan tidak dapat terselesaikan oleh jajaran Dinas Kesehatan saja namun memerlukan kerjasama dan peran lintas sektor yang optimal. Disamping itu, pembangunan

yang kita laksanakan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan berwawasan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam bentuk pembiasaan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat maupun kemandirian dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan melalui JKN juga sangat diperlukan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah.

L A M P I R A N



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkesprovkalteng1@gmail.com

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

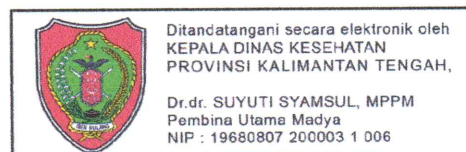
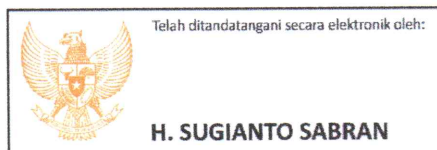
Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414

e-mail : dinkesprovkalteng1@gmail.com

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkesprovkalteng1@gmail.com

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	$\frac{\text{Jumlah Seluruh kematian berdasarkan Age Specific Death Rate (ASDR)}}{\text{Jumlah Seluruh Kasus Kematian}} \times 100\%$	BPS
2	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita	$\frac{\text{Jumlah Balita wasting}}{\text{Jumlah Balita yang Diukur}} \times 100\%$	Dinkes Provinsi
3		Persentase Balita Stunting (%)	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita yang Diukur}} \times 100\%$	Dinkes Provinsi
4	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinkes Provinsi
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup disuatu wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinkes Provinsi

Pihak Kedua,

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112
Telp./Fax (0536) 3220414 e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112
Telp./Fax (0536) 3220414 e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,19
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7,5
3.		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	18,4
4.	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,9
5.		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	131

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 48.098.016.545	
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 9.977.909.050	
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Rp. 127.050.000	
4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp. 870.098.600	
	Rp. 59.073.074.195	

Palangka Raya, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No: 09 Telp. (0536) 3221717, 3224383, 3220214 Fax. (0536) 3220414, 3228825
PALANGKA RAYA 73111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zainuri, SH, M.Kes**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama,

Zainuri, SH, M.Kes
NIP. 19690710 199103 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No: 09 Telp. (0536) 3221717, 3224383, 3220214 Fax. (0536) 3220414, 3228825
PALANGKA RAYA 73111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Presentase keterlaksanaan	Persen	100
		Nilai LKIP Dinas Kesehatan	Poin	62,78
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Poin	71,74
		Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Persen	88,73
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,44
		Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Persen	100
		Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Persen	100
		Persentase kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar dan jenjang kompetensi	Persen	100
3.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengembangan Teknologi Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengembangan Teknologi Kesehatan	Persen	100

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 438.436.166	
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 150.215.125	
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 360.000.000	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.103.243.100	
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.119.017.631	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.585.237.286	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 601.900.900	
8. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 3.095.805.413	
9. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 140.000.000	
10. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 392.229.500	
TOTAL	Rp. 13.986.085.121	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama,



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Zainuri, SH, M.Kes
NIP. 19690710 199103 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr.Fery Iriawan, MPH

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr.dr.Suyuti Syamsul, MPPM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama

dr.Fery Iriawan, MPH

NIP. 19750120 200501 1 005

Pihak Kedua

Dr.dr.Suyuti Syamsul, MPPM

NIP. 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Persen	88%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN3)	Persen	92%
		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	80%
		Cakupan Posyandu aktif	Persen	55 %
		Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas	Persen	43 %
		Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	40 %
		Persentase Tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	60 %
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Persen	65 %
		Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja	Persen	60 %
		Kabupaten/kota yang melaksanakan Olahraga	Persen	60 %
2	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Stunting pada balita	Persen	14 %
		Persentase Wasting pada balita	Persen	7 %
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	Persen	11,5 %
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen	55 %
		Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilans Gizi	Persen	100 %

	Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Rp.	1.458.065.240,-	
1.	Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Anak	Rp.	24.000.000,-	APBD
2.	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita	Rp.	100.000.000,-	APBD
3.	Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS	Rp.	100.000.000,-	APBD
4.	Pembentukan Tim AMPSR Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.	200.000.000,-	DNF
5.	Pertemuan Penguatan Aplikasi Simatneo, MPDN, E-kohort, Komdat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.	100.000.000,-	APBD
6.	Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita bagi Petugas Kesehatan Tingkat Puskesmas/ FKTP	Rp.	100.000.000,-	DNF
7.	Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	Rp.	24.000.000,-	APBD
8.	Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan Bagi Catin	Rp.	100.000.000,-	DNF
9.	KIT Balita (KIT PPAM Kespro Bencana)	Rp.	132.522.000,-	APBD
10.	KIT Ibu Hamil (KIT PPAM Kespro Bencana)	Rp.	74.658.000,-	APBD
11.	KIT Lansia (KIT PPAM Kespro Bencana)	Rp.	90.750.000,-	APBD
12.	Penguatan Pelayanan Kesehatan terhadap Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KTP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rp.	100.000.000,-	APBD
13.	Monev Kespro	Rp.	135.135.240,-	DNF
14.	Monev Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	Rp.	50.000.000,-	APBD
15.	Orientasi Penggunaan Panduan Praktis untuk caregiver informal pada Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	Rp.	100.000.000,-	APBD
16.	Sosialisasi/ Advokasi/ Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia (HLUN/ LS)	Rp.	25.000.000,-	APBD
II	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.	1.034.984.400,-	
1	Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi dan Monev Kegiatan Gizi (OT)	Rp.	129.720.000,-	APBD
2	Penyuluhan Deteksi Dini Stunting bagi Kader Posyandu	Rp.	123.695.000,-	APBD
3	Pertemuan Koordinasi Pengelola Program Gizi	Rp.	143.648.000,-	APBD
4	Konsultasi Program Gizi	Rp.	39.000.000,-	APBD
5	Pembinaan Surveilans Gizi	Rp.	129.720.000,-	DNF
6	Pertemuan Konvergensi LP/LS Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Tk. Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (%)	Rp.	142.003.000,-	DNF
7	Monev Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Dan Intervensi Penanggulangan Stunting Tahun 2022 (OT)	Rp.	182.198.400,-	DNF
8	Monev Program gizi ke kabupaten dan konsultasi program gizi ke pusat	Rp.	145.000.000,-	APBD

III	Pengelolaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.146.901.900,-	
1	Penyediaan Media dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan Terkait GERMAS	Rp.	135.078.300,-	APBD
2	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Bersama DWP Dinkes Prov. Kalteng	Rp.	150.000.000,-	APBD
3	Konsultasi Pusat Promkes	Rp.	40.170.000,-	APBD
4	Penggerakan Masyarakat Aksi Bergizi di Provinsi dan daerah (4 kali)	Rp.	154.720.000,-	DAK – NF
5	Penggerakan Masyarakat Cegah Stunting di Provinsi dan daerah (3 kali)	Rp.	49.980.000,-	DAK – NF
6	Penggerakan Masyarakat dalam mendukung aktifkan Posyandu di daerah (3 kali)	Rp.	75.000.000,-	DAK – NF
7	Penggerakan Masyarakat Bumil Sehat di Provinsi dan daerah (2 kali)	Rp.	51.575.000,-	DAK – NF
8	Jambore Kader Tingkat Provnsi Kalimantan Tengah (1 kali)	Rp.	182.198.600,-	DAK – NF
9	Penggerakan Masyarakat dalam mendukung Implementasi GERMAS Aktifitas Fisik dan Deteksi Dini di Provinsi dan/atau daerah (6 kali)	Rp.	308.180.000,-	DAK – NF
IV	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.	295.000.000,-	
1	Pendampingan Keberlanjutan SBS (Stop Buang Air Besar Sebarangan)	Rp.	75.175.000,-	DAK-NF
2	Pendampingan Intervensi Kesehatan Lingkungan	Rp.	74.825.000,-	DAK-NF
3	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Rp.	53.035.000,-	DAK-NF
4	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah medis fasyankes (RS dan Puskesmas)	Rp.	68.730.000,-	DAK-NF
V	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.	191.927.000,-	
1	Monitoring dan evaluasi MBH	Rp.	70.500.000,-	DAK-NF
2	Senam Jumat pagi bersama ASN dan tenaga Kontrak	Rp.	10.000.000,-	DAK-NF
3	Pemeriksaan Kebugaran jasmani dengan metode aplikasi SIPGAR untuk ASN Dinkes dan OPD lainnya	Rp.	4.277.000,-	APBD
4	Pendampingan pelaksanaan Germas Aktifitas Fisik ditatanan fasilitas pelayanan kesehatan	Rp.	107.150.000,-	DAK-NF

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

Dr.dr.Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200001 1 006

Pihak Pertama

dr.Fery Iriawan, MPH
NIP. 19750120 200501 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. DAMAR PRAMUSINTA, M.P.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Persentase Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan	Persen	22,2
2	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) % (45/100.000)	Persen	29.5
3	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase obat dan vaksin esensial di puskesmas	Persen	92
4	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	55,30

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

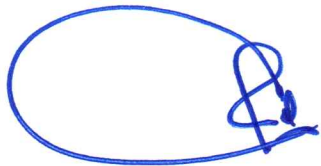
No	Kegiatan	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tenaga Kesehatan	5.000.000.000	PAD
2	Validasi Data Nakes ke Kab/Kota	83.163.000	PAD
3	Peningkatan kapasitas nakes teladan	517.000.000	PAD
4	Pembinaan institusi pendidikan kesehatan	18.750.000	PAD
5	Penilaian nakes teladan	455.000.000	PAD
6	Fasilitasi koordinasi program dokter internship ke kab/kota	367.000.000	PAD
7	Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kabupaten / Kota	10.000.000	PAD
8	Pengadaan Obat Buffer dan Alat Kesehatan	530.000.000	PAD
9	Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP	573.229.600	PAD
10	TIM Perencanaan Obat Terpadu	10.000.000	PAD
11	Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke Pusat	10.000.000	PAD
12	Pemusnahan Obat dan BHP	100.000.000	PAD
13	Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas (Kabupaten/Kota)	140.221.675	PAD
14	Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	19.320.000	PAD

15	Monev Sarana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	107.730.000	PAD
16	Monev Keamanan Pangan dan Kosmetik di Kab/Kota	143.039.225	PAD
17	Analisa dan Evaluasi Ketersediaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (NPP) di Sarana Pelayanan Kesehatan	81.750.000	PAD
18	Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO	47.349.952	PAD
19	Koordinasi Peningkatan Distribusi Kefarmasian ke Kementerian Kesehatan dan Balai Penelitian dan Pengembangan	110.250.000	PAD
20	Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi Dalam Rangka Mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota (P4TO)	287.300.000	PAD
21	Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu	636.770.940	PAD
22	Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak	268.496.988	PAD
23	Pengadaan Obat Program Gizi	3.202.395.670	PAD
24	Peningkatan Kapasitas SDM P4TO	150.000.000	PAD
25	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker Puskesmas di Kab/Kota Se-Kalimantan Tengah	257.892.800	PAD
TOTAL		13.126.659.850	PAD

Palangka Raya, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY KELANA, SKM, M. Si

Jabatan : KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

EDDY KELANA, SKM, M. Si
NIP. 197305261993031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase realisasi Jasa Medis terhadap pendapatan Labkes	%	100
2.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah pengujian parameter laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat setiap tahunnya	Tes	21.546 tes
3.		Laporan Tahunan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1
4.		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83
5.		Persentase pemenuhan alat dan bahan laboratorium	%	100

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

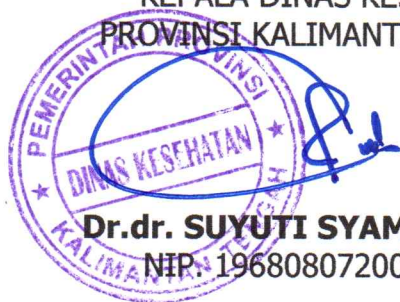
No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jasa Medis Balai Labkes	236.000.000	PAD
2.	Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium di BLK	40.000.000	PAD
3.	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan	100.000.000	PAD
4.	Pengadaan Bahan Kimia di BLK	937.064.760	PAD
5.	Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	48.000.000	PAD
6.	Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat	71.114.700	PAD
7.	Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	10.000.000	PAD
8.	Kaji Ulang Manajemen (KUM)	10.000.000	PAD
9.	Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium Kesehatan	3.750.000	PAD
10.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan	40.263.500	PAD
11.	Pelayanan Pelanggan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	228.000.000	PAD
12.	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
TOTAL		1.774.192.960	

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,

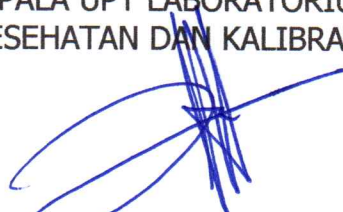
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI



EDDY KELANA, SKM, M. Si
NIP. 197305261993031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Layumuatulu, SKM, MAP**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19671112 199002 2 003

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19680807 200003 1 006

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

**KEPALA BALAI PELATIHAN
KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP. 19671112 199002 2 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

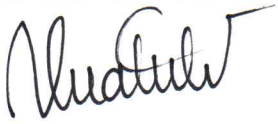
Jalan Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Nakes yang dilatih	Orang	30
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen evaluasi Pasca Pelatihan yang sudah dilaksanakan sebagai data akreditasi Bapelkes	Dokumen	1
3.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Akreditasi Institusi	Dokumen	Terakreditasi
4.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah laporan Pengukuran Index Kepuasan Peserta Latih di Bapelkes	Dokumen	1
5.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Sinergitas Kediklatan Pelatihan Institusi Bapelkes Ke kab/Kota	Dokumen	7
6.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Persentase pejabat struktural dan staf Bapelkes yang ditingkatkan pengetahuannya melalui konsultasi kediklatan	Orang	10
7.	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah tim kaji banding BLUD	Orang	10
8.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Penyusunan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Dokumen	1

Sub Bagian	Anggaran	Keterangan
1. Pelatihan Tim Penilai Jabfung	Rp. 124.000.000	Triwulan II
2. Akreditasi Institusi Bapelkes	Rp. 89.700.000	Triwulan I dan II
3. Konsultasi Ke Pusat (Bapelkes)	Rp. 110.000.000	Triwulan I, II, III dan IV
4. Kaji Banding Pelaksanaan BLUD Institusi Bapelkes	Rp. 280.000.000	Triwulan I dan II
5. Sinergitas Kediklatan Pelatihan Institusi Bapelkes Ke kab/Kota	Rp. 83.850.000	Triwulan I

6. Evaluasi Pasca Pelatihan	Rp. 60.225.000	Triwulan III
7. Pengukuran Index Kepuasan Peserta Latih di Bapelkes	Rp. 5.500.000	Triwulan III
8. Penyusunan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Rp. 4.101.750	Triwulan IV

	Palangka Raya, 30 Januari 2023
 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  LAYUMUATULU, SKM, MAP NIP. 19671112 199002 2 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112 Telp (0536) 427039 Fax 4270391
e-mail: infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
NIP.19760903 200802 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	65
		Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL)	%	95
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pandu PTM >80% Puskesmas	Kab / Kota	8

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten	14.355.640	P2PM
2	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan kecacingan	93.760.000	P2PM
3	Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif)	62.916.200	P2PM
4	Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA	62.836.500	P2PM
5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pra-eliminasi penularan HIV, Sfilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak	79.355.000	P2PM
6	Revitalisasi Kapasitas Pengelola Malaria pada Fase pemeliharaan eliminasi	84.056.470	P2PM
7	Assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di Kabupaten/Kota	67.843.389	P2PM
8	Penilaian Eliminasi Malaria	57.600.000	P2PM
9	Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis	52.200.000	P2PM
10	Survey Kontak Penderita Kusta (Kabupaten Kota)	50.000.000	P2PM
11	Pengadaan Kelambu Malaria	152.999.961	P2PM
12	Penyelidikan Epidimiologi Dugaan Kasus Malaria sesuai Pedoman	50.000.000	P2PM
13	Penyelidikan Epidimiologi Demam Berdarah Dengue (DBD)	50.000.000	P2PM
14	Penyelidikan Epidimiologi Lonjakan Kasus Kusta dan Rumor Kasus Frambusia	50.000.000	P2PM
15	Penyelidikan Epidimiologi Kasus Zoonosis	50.000.000	P2PM
16	Evaluasi Manajemen Pelayanan Imunisasi di Fasyankes	70.619.200	Surveillance dan Imunisasi
17	Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Pelaksanaan Imunisasi Rutin	98.984.300	Surveillance dan Imunisasi
18	Manajemen Suvervisi Sportif/SS dalam Pelaksanaan Imunisasi	65.984.300	Surveillance dan Imunisasi
19	Supervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi	90.314.730	Surveillance dan

	Data UCI dan BIAS		Imunisasi
20	Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	89.124.800	Surveillance dan Imunisasi
21	Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB, Wabah, dan Bencana	69.057.860	Surveillance dan Imunisasi
22	Konsultasi ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi	30.960.000	Surveillance dan Imunisasi
23	Verifikasi Signal dan Pelacakan Kasus PD3I Penyakit Berpotensi KLB	69.057.860	Surveillance dan Imunisasi
24	Pengawasan Kebijakan KTR (7 Tatanan)	95.000.000	PTM
25	Koordinasi Pelaksanaan RBM	60.000.000	PTM
26	Monev Deteksi Dini Katarak di kab/kota	97.400.000	PTM
27	Monitoring dan Evaluasi Program Haji	60.000.000	PTM
28	Pertemuan Rujukan Kasus IVA dan SADANIS	90.000.000	PTM
29	Koordinasi Pelaksanaan Gangguan DM dan Gangguan Metabolik	319.000.000	PTM
30	Sosialisasi Deteksi Dini IVA dan SADANIS bagi Tenaga Kesehatan	107.300.000	PTM
Total		2.329.726.210	

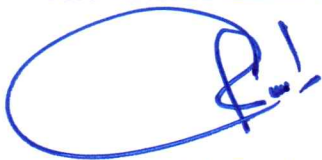
Palangka Raya, Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006



dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
NIP.19760903 200802 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SITI RAHMAH, SKM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAINURI, SH.,M.kes

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

ZAINURI, SH.,M.Kes
NIP. 19690710 199103 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hj. SITI RAHMAH, SKM
NIP. 19701005 199002 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan bersih	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Berkala dan kenaikan pangkat	Persen	100
		Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Persen	100
		Data profil kesehatan yang akurat dan terkumpul tepat waktu	Dokumen	1
		Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan uji kopetensi	Orang	300

Anggaran Keuangan Kinerja 2023

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000	PAD
2	Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000	PAD
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	75.000.000	PAD
4	Penyediaan alat tulis kantor	125.000.000	PAD
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	99.999.000	PAD
6	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	100.000.000	PAD
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	75.000.000	PAD
8	Penyediaan spanduk/umbul-umbul	100.000.000	PAD
9	Penyediaan Bahan/Material Pameran dan Pawai Hari Kalteng	300.000.000	PAD
10	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	PAD
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	268.176.000	PAD
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	342.825.000	PAD
13	Penyediaan makanan dan minuman	50.851.000	PAD
14	Dukungan Kelembagaan untuk pengembangan RS Provinsi Wilayah Barat	392.392.100	PAD
15	Sistim Kearsipan online	15.000.000	PAD
16	Pengelolaan Arsip Dinamis	11.464.000	PAD
17	Pengelolaan tata persuratan perkantoran	13.536.000	PAD
18	Pengembangan dan Pengelolaan PPID	59.000.000	PAD
19	Pengadaan peralatan gedung kantor	169.000.000	PAD

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
20	Pengadaan Generator untuk Coldromm Instalasi Farmasi	250.000.000	PAD
21	Pengadaan Sport Center dan Music Center	225.000.000	PAD
22	Pengadaan Mobil dan Motor Listrik	780.017.631	PAD
23	Pengadaan trafo dan Pemasangan/perbaikan Instalasi listrik	69.000.000	PAD
24	Pembuatan dan pemeliharaan taman	34.144.799	PAD
25	Pengadaan AC sentral, Meja Partisi dan Toilet Lobby kantor juga area parker dan Revitalisasi Toilet Bapelkes	991.855.201	PAD
26	Pembuatan ruang rapat kerja sub koordinator perencanaan dan evaluasi	200.000.000	PAD
27	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	PAD
28	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.103.822.966	PAD
29	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	75.000.000	PAD
30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	100.000.000	PAD
31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000	PAD
32	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Bulan)	74.999.000	PAD
33	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	321.901.900	PAD
34	Pemeliharaan dan peningkatan jaringan LAN	30.000.000	PAD
35	Penyusunan Buku Profil Kesehatan (BUKU)	140.000.000	PAD
36	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	200.000.000	PAD
37	Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten/Kota	73.210.000	PAD
38	Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Aparatur (orang)	100.000.000	PAD
39	Sinergitas Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	19.019.500	PAD
TOTAL		7.510.214.097	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH


ZAINURI, SH., M.Kes
NIP. 19690710 199103 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Hj. SITI RAHMAH, SKM
NIP. 19701005 199002 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EVI MAHLINA, SST, M.Kes

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAINURI, SH.,M.kes

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 28 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

ZAINURI, SH.,M.Kes
NIP. 19690710 199103 1 007

EVI MAHLINA, SST, M.Kes
NIP. 19771127200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya sistem pelaporan dan Penatausahaan Keuangan Aset	1.Laporan perencanaan anggaran subbag keuangan dan aset	Dokumen	100%
		2.Laporan Rekonsiliasi keuangan dan aset	Dokumen	100%
		3.Penyediaan gaji dan tunjangan terpenuhi	Dokumen	100%
		4.Laporan rencana kebutuhan barang milik daerah(RKBMD)	Dokumen	100%
		5.Laporan Keuangan akhir tahun	Dokumen	100%
		6.Laporan Inventarisasi aset dan pengamanan BMD	Dokumen	100%
		7.Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset	Dokumen	100%
		8.Laporan realisasi keuangan	persentase	90%
		9.Ketepatan Laporan Keuangan	Waktu	100%

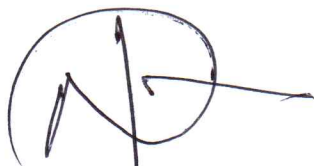
Anggaran Keuangan Kinerja 2023

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp.22.472.951.617,00	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor/Gaji Tenaga Honorer	Rp. 1.594.414.320,00	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 400.000.000,00	
4	Penyusunan RKBMD	Rp. 8.208.500,00	
5	Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah	Rp 126.356.625,00	
6	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Rp. 13.183.500,00	
7	Rekonsiliasi keuangan	Rp. 5.000.000,00	
8	RekonsiliasiAset	Rp. 3.150.000,00	
9	Pertemuan Pengelolaan Aset	Rp. 4.975.000,00	
10	Pertemuan Pengelolaan Keuangan	Rp. 6.440.000,00	
11	PenyusunanLaporanCapaian dan RealisasiKeuangan	Rp. 6.258.500,00	
12	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 17.918.000,00	
TOTAL		RP.24.658.172.562,00	

Palangka Raya, 28 Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



ZAINURI, SH., M.Kes
NIP. 19690710 199103 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



EVI MAHLINA, SST, M.Kes
NIP. 19771127200012 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Tetiana, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr.Fery Iriawan, MPH

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr.Fery Iriawan, MPH

NIP. 19750120 200501 1 005

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama

Agus Tetiana, SKM

NIP. 19840810 200604 2 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Posyandu aktif	Persen	55 %
		Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas	Persen	43 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Media dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan Terkait GERMAS	Rp. 135.078.300	PAD
2. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Bersama DWP Dinkes Prov. Kalteng	Rp. 150.000.000	PAD
3. Konsultasi Pusat Promkes	Rp. 40.170.000	PAD
4. Penggerakan Masyarakat Aksi Bergizi di Provinsi dan daerah (4 kali)	Rp. 154.720.000	DAK – NF
5. Penggerakan Masyarakat Cegah Stunting di Provinsi dan daerah (3 kali)	Rp. 49.980.000	DAK – NF
6. Penggerakan Masyarakat dalam mendukung aktifkan Posyandu di daerah (3 kali)	Rp. 75.000.000	DAK – NF
7. Penggerakan Masyarakat Bumil Sehat di Provinsi dan daerah (2 kali)	Rp. 51.575.000	DAK – NF
8. Jambore Kader Tingkat Provnsi Kalimantan Tengah (1 kali)	Rp. 182.198.600	DAK – NF
9. Penggerakan Masyarakat dalam mendukung Implementasi GERMAS Aktifitas Fisik dan Deteksi Dini di Provinsi dan/atau daerah (6 kali)	Rp. 308.180.000	DAK – NF

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

dr.Fery Iriawan, MPH
NIP. 19750120 200501 1 005

Agus Tetiana, SKM
NIP. 19840810 200604 2 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiku Rahman

Jabatan : Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr.Fery Iriawan, MPH

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr.Fery Iriawan, MPH

NIP. 19750120 200501 1 005

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama

Taufiku Rahman

NIP. 19650317 198903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail: dinkes@kalteng.go.id

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023
Plt. KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLARAGA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	40
		Persentase Tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	60
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	65
		Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja	%	60
		Kabupaten/kota yang melaksanakan Olahraga	%	60

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLARAGA		Rp. 486.927.000,-	
KESEHATAN LINGKUNGAN		Rp. 295.000.000,-	
	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 295.000.000,-	
1	Pendampingan Keberlanjutan SBS (Stop Buang Air Besar Sebarangan)	Rp. 75.175.000,-	
2	Pendampingan Intervensi Kesehatan Lingkungan	Rp. 74.825.000,-	
3	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Rp. 53.035.000,-	
4	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah medis fasyankes (RS dan Puskesmas)	Rp. 68.730.000,-	
5	Bimtek dalam rangka mendukung program PPSP	Rp. 23.235.000,-	
KESEHATAN KERJA DAN OLARAGA		RP. 191.927.000,-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	RP. 191.927.000,-	
1	Monitoring dan evaluasi MBH	Rp. 70.500.000,-	
2	Senam Jumat pagi bersama ASN dan tenaga Kontrak	Rp. 10.000.000,-	
3	Pemeriksaan Kebugaran jasmani dengan metode aplikasi SIPGAR untuk ASN Dinkes dan OPD lainnya	Rp. 4.277.000,-	
4	Pendampingan pelaksanaan Germas Aktifitas Fisik ditatanan fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 107.150.000,-	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT

dr. FERY IRIAWAN, MPH
NIP 197501202005011005

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR KESEHATAN
LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA &
OLARAGA

TAUFIKU RAHMAN
NIP 196503171989031009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadrianadie, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr.Fery Iriawan, MPH

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr.Fery Iriawan, MPH

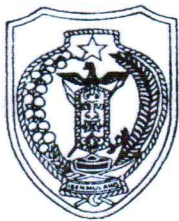
NIP. 19750120 200501 1 005

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama

Hadrianadie, SKM

NIP. 19651207 198903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Persen	95%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN3)	Persen	92%
		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	80%
2	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Stunting pada balita	Persen	14 %
		Persentase Wasting pada balita	Persen	7 %
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	Persen	11,5 %
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen	55 %
		Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilans Gizi	Persen	100 %

	Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Rp.	1.458.065.240,-	
1.	Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Anak	Rp.	24.000.000,-	APBD
2.	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita	Rp.	100.000.000,-	APBD
3.	Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS	Rp.	100.000.000,-	APBD
4.	Pembentukan Tim AMPSR Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.	200.000.000,-	DNF
5.	Pertemuan Penguatan Aplikasi Simatneo, MPDN, E-kohort, Komdat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.	100.000.000,-	APBD
6.	Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita bagi Petugas Kesehatan Tingkat Puskesmas/ FKTP	Rp.	100.000.000,-	DNF
7.	Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	Rp.	24.000.000,-	APBD
8.	Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan Bagi Catin	Rp.	100.000.000,-	DNF
9.	KIT Balita (KIT PPAM Kespro Bencana)	Rp.	132.522.000,-	APBD
10.	KIT Ibu Hamil (KIT PPAM Kespro Bencana)	Rp.	74.658.000,-	APBD
11.	KIT Lansia (KIT PPAM Kespro Bencana)	Rp.	90.750.000,-	APBD

12	Penguatan Pelayanan Kesehatan terhadap Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KTP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rp.	100.000.000,-	APBD
13	Monev Kespro	Rp.	135.135.240,-	DNF
14	Monev Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	Rp.	50.000.000,-	APBD
15	Orientasi Penggunaan Panduan Praktis untuk caregiver informal pada Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	Rp.	100.000.000,-	APBD
16	Sosialisasi/ Advokasi/ Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia (HLUN/LS)	Rp.	25.000.000,-	APBD
II	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.	1.034.984.400,-	
1	Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi dan Monev Kegiatan Gizi (OT)	Rp.	129.720.000,-	APBD
2	Penyuluhan Deteksi Dini Stunting bagi Kader Posyandu	Rp.	123.695.000,-	APBD
3	Pertemuan Koordinasi Pengelola Program Gizi	Rp.	143.648.000,-	APBD
4	Konsultasi Program Gizi	Rp.	39.000.000,-	APBD
5	Pembinaan Surveilans Gizi	Rp.	129.720.000,-	DNF
6	Pertemuan Konvergensi LP/LS Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Tk. Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (%)	Rp.	142.003.000,-	DNF
7	Monev Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Dan Intervensi Penanggulangan Stunting Tahun 2022 (OT)	Rp.	182.198.400,-	DNF
8	Monev Program gizi ke kabupaten dan konsultasi program gizi ke pusat	Rp.	145.000.000,-	APBD

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



dr.Fery Iriawan, MPH

NIP. 19750120 200501 1 005



Hadrianadie, SKM

NIP. 19651207 198903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARLINAE, S.Si,Apt, M.Si
Jabatan : KEPALA SEKSI FARMASI, ALKES DAN PKRT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI FARMASI, ALKES
DAN PKRT DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MARLINAE, S.Si,Apt, M.Si
NIP. 19750325 200012 2 002

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persen	92,00
		2. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	Persen	55,30

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp).	Keterangan
1.	Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kabupaten / Kota	10.000.000,00	PAD
2.	Pengadaan Obat Buffer dan Alat Kesehatan	530.000.000,00	PAD
3.	Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP	573.229.600,00	PAD
4.	TIM Perencanaan Obat Terpadu	10.000.000,00	PAD
5.	Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke Pusat	10.000.000,00	PAD
6.	Pemusnahan Obat dan BHP	100.000.000,00	PAD
7.	Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas (Kabupaten/Kota)	140.221.675,00	PAD
8.	Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	19.320.000,00	PAD
9.	Monev Sarana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	107.730.000,00	PAD
10.	Monev Keamanan Pangan dan Kosmetik di Kab/Kota	143.039.225,00	PAD
11.	Analisa dan Evaluasi Ketersediaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (NPP) di Sarana Pelayanan Kesehatan	81.750.000,00	PAD
12.	Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO	47.349.952,00	PAD
13.	Koordinasi Peningkatan Distribusi Kefarmasian ke Kementerian Kesehatan dan Balai Penelitian dan Pengembangan	110.250.000,00	PAD
14.	Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi Dalam Rangka Mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota (P4TO)	287.300.000,00	PAD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA MAGDALENA, SKM

Jabatan : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MAYA MAGDALENA, SKM
NIP. 19830314 200604 2 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Dokter dan Paramedis	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (9 Nakes)	Persentase	22.2
		Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) % (45/100.000)	Persentase	29.5

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tenaga Kesehatan	5.000.000.000	
2	Validasi Data Nakes ke Kab/Kota	83.163.000	
3	Peningkatan kapasitas nakes teladan	517.000.000	
4	Pembinaan institusi pendidikan kesehatan	18.750.000	
5	Penilaian nakes teladan	455.000.000	
6	Fasilitasi koordinasi program dokter internship ke kab/kota	367.000.000	
TOTAL		6.440.913.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MAYA MAGDALENA, SKM
NIP. 19830314 200604 2 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan : Yos Sudarso No.09 Telp. (0536) 3221767, 3220414, Fax. 3220414

E-Mail :

PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Diah Mustika Sarah Nasution
NIP : 19770310 200501 2 006
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP : 19680807 200003 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

PIHAK PERTAMA

dr. Diah Mustika Sarah Nasution
NIP. 19770310 200501 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan : Yos Sudarso No.09 Telp. (0536) 3221767, 3220414, Fax. 3220414
E-Mail :
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Rp	10.502.411.780	
	Operasional Pembangunan RS Rujukan Kelas B	Jumlah dokumen operasional (administrasi, akomodasi, transportasi dan kegiatan lainnya) dalam persiapan pembangunan Rumah sakit rujukan Kelas B di Kalimantan Tengah	Rp	153.788.780	
	Konsultasi Perencanaan pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahapan pengawasan berkala (MYC)	Jumlah Dokumen Konsultan FS, Master Plann dan DED 2 RS Rujukan Kelas B di Kalimantan Tengah	Rp	1.098.623.000	
	Operasional dalam rangka Pengawasan dan Persiapan Pembangunan RS Regional Rujukan Kelas B (Pengadaan Tanah)		Rp	9.250.000.000	
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Prasarana Pendukungnya RSUD HANAU (DAK FISIK)		Rp		
2	Pengembangan Rumah Sakit		Rp	150.000.000	
	Penguatan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)	Jumlah RS yang mendapatkan pengawasan pelayanan kesehatan secara eksternal di kalimantan tengah	Rp	150.000.000	

8.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Rp	90.000.000	
	Monev dan Bimtek Manual Rujukan	Persentase RS Provinsi/Kabupaten/Kota baik RS Pemerintah maupun swasta yang dapat memenuhi prosedur dan ketentuan Rumah sakit secara hukum baik dalam hal perijinan maupun standart pelayanan, melaksanakan pelaporan RS Online, SIRS, ASPAK secara rutin.	Rp	90.000.000	
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Rp	400.000.000	
	Pelayanan Operasi Katarak	Jumlah mata yang dioperasi massal gratis untuk 3 kab/kota di kalimantan tengah	Rp	400.000.000	

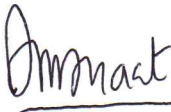
Palangka Raya, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

PIHAK PERTAMA



dr. Diah Mustika Sarah Nasution
NIP. 19770310 200501 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan : Yos Sudarso No.09 Telp. (0536) 3221767, 3220414, Fax. 3220414

E-Mail :

PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rita Juliawaty, SKM, M.Si
NIP : 19730729 199703 2 007
Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

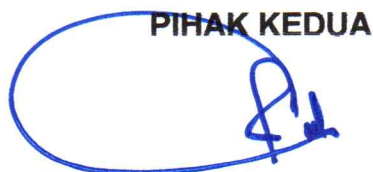
Nama : Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP : 19680807 200003 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA


Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

PIHAK PERTAMA


Rita Juliawaty, SKM, M.Si
NIP. 19730729 199703 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan : Yos Sudarso No.09 Telp. (0536) 3221767, 3220414, Fax. 3220414
E-Mail :
PALANGKA RAYA 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN	Persentase cakupan kepesertaan JKN	%	94
2	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	%	80
		Persentase FKRTL terakreditasi	%	75

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Rp 15.036.819.278	
		Monitoring Jaminan Kesehatan ke kab/Kota	Rp 200.000.000	
		Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Tingkat Provinsi	Rp 180.000.000	
		Sinkronisasi dan Konsolidasi Program JKN	Rp 50.000.000	
		Premi Kartu Kalteng Berkah	Rp 14.606.819.278	
2	Fasilitasi Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Rp 589.800.000	
		Program Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB)	Rp 389.800.000	
		Monev Penyelenggaraan Mutu Fasyankes Lainnya	Rp 200.000.000	

Palangka Raya, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

PIHAK PERTAMA

Rita Juliawaty, SKM, M.Si
NIP. 19730729 199703 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp. (0536) 3221767, 3220424 Fax. 3220424

e-mail: infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, KESEHATAN TRADISIONAL DAN KEGAWATDARURATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Agustina Ponasti Dewi, M.Si

Jabatan : Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kegawadaruratan

NIP : 19730807 200212 2 002

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr .dr Suyuti Syamsul MPPM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

NIP : 19680807 200003 1 006

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Palangka Raya, 16 Januari 2023
Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMNTAN TENGAH**

**SUBKOORDINATOR PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER, PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL DAN
KEGAWADARURATAN**

Dr.dr. Suyuti Syamsul.MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

dr. Agustina Ponasti/Dewi, M.Si
NIP. 19730807 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp. (0536) 3221767, 3220424 Fax. 3220424

e-mail: infodinkes@gmail.com

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL DAN KEGAWADARURATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu	Persentase Mutu Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	94,65

Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Rp. 943.680.000	
	Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Layanan UTD Daerah	Rp. 180.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Layanan UTD Daerah	RP 133.680.000	
	Pertemuan dan Koordinasi dan Evaluasi Layanan Klinik	RP. 180.000.000	
	Bimbingan dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer	RP. 300.000.000	
	Analisis hasil PIS PK Terintegrasi lintas Program	RP. 150.000.000	

Palangka Raya, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUB KOORDINATOR PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER, PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL DAN
KEGAWADARURATAN

Dr.dr Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

dr. Agustina Ponasti Dewi, M.Si
NIP. 19730807 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAINER DANNY P.MAMAHIT., SKM, MKM

Jabatan : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. RIZA SYAHPUTRA, MAP

Jabatan : KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

dr. RIZA SYAHPUTRA, MAP
NIP. 19760903 200802 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

RAINER DANNY P.M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (<i>Treatment Coverage</i>)	Persentase	50
		Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	Persentase	<105
		Kabupaten Kota Yang mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria	Kabupaten/ Kota	12
		Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Persentase	85
		Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi HIV)	Persentase	<0,19
		<i>Incidence Rate</i> (IR)	Persentase	<15
		<i>Case Fatality Rate</i> (CFR)	Persentase	<1
		Kabupaten Kota yang melakukan penilaian Eradikasi Frambusia	Kabupaten/ Kota	8
		Persentase ODHA dan Pasien Hemodialisa ditemukan Hepatitis C	Persentase	5
		Prevalensi Kusta 1/10.000 Penduduk	Persentase	<1

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten	14.355.640	P2PM
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan Kecacingan	93.760.000	P2PM
3.	Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif)	62.916.200	P2PM
4.	Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA	62.836.500	P2PM
5.	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan pra-eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak	79.355.000	P2PM
6.	Revitalisasi Kapasitas Pengelola Malaria pada fase pemeliharaan eliminasi	84.056.470	P2PM
7.	assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di kabupaten/kota	67.843.389	P2PM
8.	Penilaian Eliminasi Malaria	57.600.000	P2PM
9.	Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis	52.200.000	P2PM
10.	Survey Kontak Penderitaan Kusta (Kabupaten Kota)	50.000.000	P2PM
11.	Pengadaan Kelambu Malaria	152.999.961	P2PM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

12.	Penyelidikan Epidmiologi Dugaan Kasus Malaria Sesuai Pedoman	50.000.000	P2PM
13.	Penyelidikan Epidmiologi Demam Berdarah Dengue (DBD)	50.000.000	P2PM
14.	Penyelidikan Epidmiologi Lonjakan Kasus Kusta dan Rumor Kasus Frambusia	50.000.000	P2PM
15.	Penyelidikan Epidmiologi Kasus Zoonosis	50.000.000	P2PM
TOTAL		977.923.160	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

dr. RIZA SYAHPUTRA, MAP
NIP. 19760903 200802 1 002

RAINER DANNY P.M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : .YAESAR WAWAN, SKM.,MPH

Jabatan : KEPALA SEKSI SURVEILANCE DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. RIZA SAPUTRA,M.AP

Jabatan : KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak penama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH


dr. RIZA SAPUTRA, M.AP
NIP. 19760903 200802 1002

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI SURVEILANCE DAN
IMUNISASI DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH


YAESAR WAWAN, SKM, MPH
NIP. 19690316 198903 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap IDL .	%	95

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Evaluasi Manajemen Pelayanan Imunisasi di Fasyankes	70.619.200	
2	Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Pelaksanaan Imunisasi Rutin	98.984.300	
3	Manajemen Supervisi Sportif/SS dalam Pelaksanaan Imunisasi	65.984.300	
4	Supervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi Data UCI dan BIAS	90.314.730	
5	Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa(KLB) dan Bencana	89.124.800	
6	Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB,Wabah dan Bencana	69.057.860	
7	Konsultasi ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi	30.960.000	
8	Verifikasi Signal dan Pelacakan Kasus PD3I Penyakit Berpotensi KLB	69.057.860	
Total		584.103.050	

KEPALA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH,

dr. RIZA SAPUTRA, M.AP
NIP. 19760903 200803 200802 1002

KEPALA SEKSI SURVEILANCE DAN
IMUNISASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YAESAR WAWAN,SKM,MPH
NIP. 19690316 198903 1003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULKA SUSANA, S.SiT,M.Kes

Jabatan : KETUA TIM KERJA PTM DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. RIZA SYAHPUTRA, M.A.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

dr. RIZA SYAHPUTRA, M.A.P
NIP. 19760903 200802 1 002

Pihak Pertama,

KETUA TIM KERJA PTM
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

YULKA SUSANA, S.SiT,M.Kes
NIP. 19660731 198911 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pandu PTM >80% Puskesmas	Kab/Kota	8

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	KegiatanDetkesi	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1.	Pengawasan Kebijakan KTR (7 tatanan)	95.000.000,-	PAD
2.	Koordinasi Pelaksanaan RBM	60.000.000,-	PAD
3.	Monev Deteksi dini Katarak di kab/Kota	97.400.000,-	DAU/PAD
4.	Monitoring dan evaluasi Program Haji	60.000.000,-	PAD
5.	Pertemuan Rujukan Kasus IVA dan SADANIS	90.000.000,-	PAD
6.	Koordinasi Pelaksanaan Gangguan DM dan Gangguan Metabolik	319.000.000,-	DNF
7.	Sosialisasi Deteksi Dini IVA dan SADANIS bagi Tenaga Kesehatan	107.300.000,-	PAD
TOTAL		767.700.000,-	

Palangka Raya, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

dr. RIZA SYAHPUTRA, M.A.P
NIP. 19760903 200801 1 002

Pihak Pertama,

KETUA TIM KERJA PTM
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

YULKA SUSANA, S.SiT,M.Kes
NIP. 19660731 198911 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDA PRIHATIN, S.Kep., M.A.P.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19770406 199702 2 001

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LAYUMUATULU, SKM, MAP**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19671112 199002 2 003

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2023

**KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP. 19671112 199002 2 003

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

IDA PRIHATIN, S.Kep., M.A.P.
NIP. 19770406 199702 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Tim Kaji Banding	Orang	10
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Presentasi pembinaan dan pengetahuan Pejabat Struktural, Jafung dan staf	Orang	10
3.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Penyusunan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Dokumen	1
4.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Sinergitas Kediklatan Pelatihan Institusi Bapelkes Ke kab/Kota	Dokumen	7

Sub Bagian	Anggaran	Keterangan
1. Kaji Banding Pelaksanaan BLUD Institusi Bapelkes	Rp. 280.000.000	Triwulan I dan II
2. Konsultasi Ke Pusat (Bapelkes)	Rp. 110.000.000	Triwulan I, II, III dan IV
3. Penyusunan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Rp. 4.101.750	Triwulan IV
4. Sinergitas Kediklatan Pelatihan Institusi Bapelkes Ke kab/Kota	Rp. 83.850.000	Triwulan I

Palangka Raya, 30 Januari 2023

**KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAYU MUATULU, SKM, MAP
NIP. 19671112 199002 2 003

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

IDA PRIHATIN, S.Kep., M.A.P.
NIP. 19770406 199702 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. ERNY SUSILAWATY**
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Balai Pelatihan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19780409 200501 2 016

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LAYUMUATULU, SKM, MAP**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19671112 199002 2 003

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2023

**KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP. 19671112 199002 2 003

**KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELATIHAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dr. ERNY SUSILAWATY
NIP. 19780409 200501 2 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN
BALAI PELATIHAN KESEHATANPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Nakes yang dilatih	Orang	30
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen evaluasi Pasca Pelatihan yang sudah dilaksanakan sebagai data akreditasi Bapelkes	Dokumen	1

Sub Bagian	Anggaran	Keterangan
1. Pelatihan Tim Penilai Jabfung	Rp. 124.000.000	Triwulan II
2. Evaluasi Pasca Pelatihan	Rp. 60.225.000	Triwulan III

Palangka Raya, 30 Januari 2023

**KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP. 19671112 199002 2 003

**KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELATIHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dr. ERNY SUSILAWATY
NIP. 19780409 200501 2 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIYANTO, S.Kep., M.A.P.**
Jabatan : Kepala Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Balai Pelatihan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19780510 200003 1 001

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LAYUMUATULU, SKM, MAP**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
NIP : 19671112 199002 2 003

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2023

**KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP. 19671112 199002 2 003

**KEPALA SEKSI AKREDITASI DAN
PENGENDALIAN MUTU
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SUPRIYANTO, S.Kep., M.A.P.
NIP. 19780510 200003 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI AKREDITASI DAN PENGENDALIAN MUTU
BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Akreditasi Institusi	Dokumen	Terakreditasi
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah laporan Pengukuran Index Kepuasan Peserta Latih di Bapelkes	Dokumen	100 %

Sub Bagian	Anggaran	Keterangan
1. Akreditasi Institusi Bapelkes	Rp. 89.700.000	Triwulan I dan II
2. Pengukuran Index Kepuasan Peserta Latih di Bapelkes	Rp. 5.500.000	Triwulan III

Palangka Raya, 30 Januari 2023

**KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP. 19671112 199002 2 003

**KEPALA SEKSI AKREDITASI DAN
PENGENDALIAN MUTU
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SUPRIYANTO, S.Kep., M.A.P.
NIP. 19780510 200003 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS, S. Si, M. M. Kes

Jabatan : Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EDDY KELANA, SKM, M. Si

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,

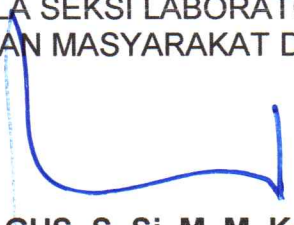
KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI



EDDY KELANA, SKM, M. Si
NIP 197305261993031007

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT DAN KLINIK



AGUS, S. Si, M. M. Kes
NIP 197008011998031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah parameter laboratorium klinik yang diikutsertakan dalam Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Parameter	30
2.		Jumlah parameter laboratorium kesehatan masyarakat yang terakreditasi ISO 17025	Parameter	26
3.		Laporan hasil Audit Internal	Dokumen	1
4.		Laporan hasil Kaji Ulang Manajemen	Dokumen	1

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	48.000.000	PAD
2.	Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat	71.114.700	PAD
3.	Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	10.000.000	PAD
4.	Kaji Ulang Manajemen (KUM)	10.000.000	PAD
TOTAL		139.114.700	

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,

PEMERINTAH KABUPATEN PALANGKA RAYA

DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

EDDY KELANA, SKM, M. Si

NIP 197305261993031007

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DAN KLINIK

AGUS, S. Si, M. M. Kes

NIP 197008011998031009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INA ARLENY

Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi pada UPT
Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EDDY KELANA, SKM, M. Si

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah

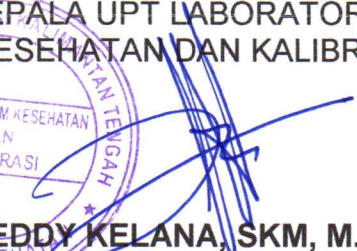
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

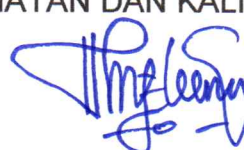
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,


**KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI**

EDDY KELANA, SKM, M. Si
NIP 197305261993031007

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN ALAT
KESEHATAN DAN KALIBRASI**

INA ARLENY
NIP 197108031993032007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara secara rutin sesuai rekomendasi fabrikan, jumlah dan waktu penggunaan, dan saat adanya gangguan fungsi peralatan atau kecurigaan	Alat	10
2.		Laporan pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Dokumen	1
3.		Persentase sampah (limbah padat non B3), limbah cair dan limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	%	100
4.		Jumlah peralatan laboratorium yang mempengaruhi mutu hasil pengujian/pemeriksaan yang dikalibrasi sesuai prosedur yang ditetapkan	Alat	224

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan	100.000.000	PAD
2.	Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium Kesehatan	3.750.000	PAD
3.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan	40.263.500	PAD
4.	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
TOTAL		194.013.500	

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,

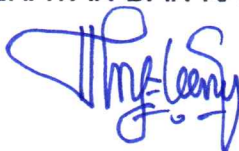


KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

EDDY KELANA, SKM, M. Si
NIP 197305261993031007

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN ALAT
KESEHATAN DAN KALIBRASI



INA ARLENY
NIP 197108031993032007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RUSTAM EFFENDY, S. Kep. MAP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EDDY KELANA, SKM, M. Si

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

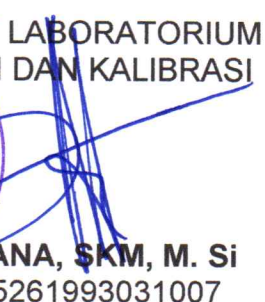
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

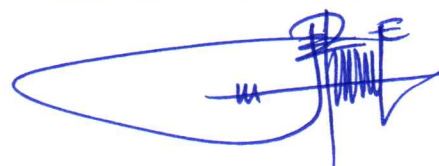
Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,


**KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI**

EDDY KELANA, SKM, M. Si
NIP. 197305261993031007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



M. RUSTAM EFFENDY, S. Kep. MAP
NIP. 198108142005011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah bulan tersedianya jasa medis	Bulan	12
2.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Meningkatkan kemampuan pelayanan laboratorium kesehatan dalam melakukan pengujian sampel	Alat	10
3.		Tersedianya macam BHP untuk melakukan pemeriksaan spesimen	Paket	1
4.		Jumlah sampel pengujian yang dilayani	Sampel	3.637

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jasa Medis Balai Labkes	236.000.000	PAD
2.	Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium di BLK	40.000.000	PAD
3.	Pengadaan Bahan Kimia di BLK	937.064.760	PAD
4.	Pelayanan Pelanggan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	228.000.000	PAD
TOTAL		1.441.064.760	

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,

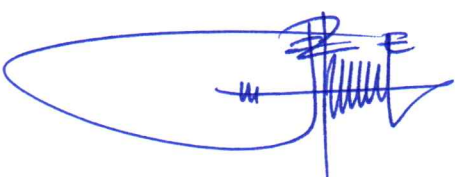
KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI



EDDY KELANA SKM, M. Si
NIP. 197305261993031007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



M. RUSTAM EFFENDY, S. Kep. MAP
NIP 198108142005011010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Pertama,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

H. SUGIANTO SABRAN

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,19
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7,5
3.		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	18,4
4.	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,9
5.		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	131

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 56.511.744.038	
2.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 8.827.569.050	
3.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Rp. 127.050.000	
4.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp. 870.098.600	

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 4270391 Fax 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rainer Danny P. Mamahit, SKM., MKM**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM**

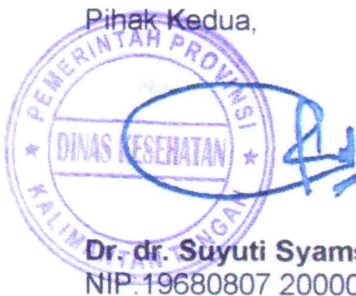
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

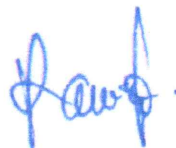
Pihak Kedua,



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP.19680807 200003 1 006

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Pertama,



Rainer Danny P. Mamahit, SKM., MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 4270391 Fax 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Presentase keterlaksanaan	Persen	100
		Nilai LKIP Dinas Kesehatan	Poin	62,78
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Poin	71,74
		Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Persen	88,73
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,44
		Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Persen	100
		Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Persen	100
		Persentase kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar dan jenjang kompetensi	Persen	100
3.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengembangan Teknologi Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan dan PengembanganTeknologi Kesehatan	Persen	100

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

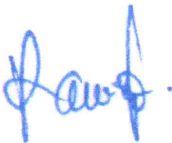
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 438.436.166	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 22.513.543.117	
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 207.757.625	
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 410.000.000	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.044.601.277	
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.262.654.430	
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.292.309.260	
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 882.670.500	
9. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 450.000.000	
10. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 2.937.058.268	
11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 183.000.000	
12. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp. 273.210.000	
13. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 119.019.500	
TOTAL	Rp. 36.014.260.143	

Palangka Raya, Oktober 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP.19680807 200003 1 006



Rainer Danny P. Mamahit, SKM., MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. DAMAR PRAMUSINTA, M.P.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Persentase Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan	Persen	22,2
2	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) % (45/100.000)	Persen	29.5
3	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase obat dan vaksin esensial di puskesmas	Persen	92
4	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	55,30

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tenaga Kesehatan	3.800.000.000	PAD
2	Validasi Data Nakes ke Kab/Kota	83.163.000	PAD
3	Peningkatan kapasitas nakes teladan	682.000.000	PAD
4	Penilaian nakes teladan	455.000.000	PAD
5	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (UMPEG)	200.000.000	PAD
6	Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten / Kota (UMPEG)	73.210.000	PAD
7	Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kabupaten / Kota	10.000.000	PAD
8	Pengadaan Obat Buffer dan Alat Kesehatan	530.000.000	PAD
9	Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Provinsi Ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (kab/kota)	1.650.204.402	DAK NON FISIK

10	TIM Perencanaan Obat Terpadu	10.000.000	PAD
11	Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke Pusat	10.000.000	PAD
12	Pemusnahan Obat dan BHP	100.000.000	PAD
13	Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas (Kabupaten/Kota)	140.221.675	PAD
14	Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	19.320.000	PAD
15	Monev Sarana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	107.730.000	PAD
16	Monev Keamanan Pangan dan Kosmetik di Kab/Kota	143.039.225	PAD
17	Analisa dan Evaluasi Ketersediaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (NPP) di Sarana Pelayanan Kesehatan	81.750.000	PAD
18	Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO	47.349.952	PAD
19	Koordinasi Peningkatan Distribusi Kefarmasian ke Kementerian Kesehatan dan Balai Penelitian dan Pengembangan	144.442.500	PAD
20	Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi Dalam Rangka Mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota (P4TO)	253.107.500	PAD
21	Pengadaan Obat Program Gizi dan KIA	4.107.663.598	DAK NON FISIK
22	Pemeliharaan Instalasi Farmasi dan Gudang Vaksin	55.515.100	PAD
23	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker Puskesmas di Kab/Kota Se-Kalimantan Tengah	257.892.800	PAD
24	Pengadaan Reagen Kanker Servix	38.043.000	PAD
25	Pengumpulan Tanaman Obat untuk pengembangan	39.245.000	PAD
26	Pengolahan Jamu Skala Laboratorium	8.000.000	PAD
TOTAL		13.046.897.752	

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua,

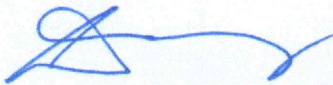
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112 Telp (0536) 427039 Fax 4270391
e-mail: infodinkes@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
Jabatan : KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 16 Oktober 2023

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama

KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
NIP.19760903 200802 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	94
		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	84
		Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL)	%	94

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

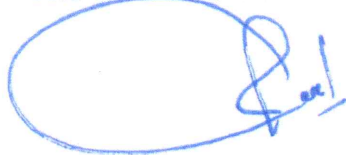
No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten	14.355.640	P2PM
2	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan kecacingan	93.760.000	P2PM
3	Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif)	62.916.200	P2PM
4	Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA	62.836.500	P2PM
5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pra-eliminasi penularan HIV, Sfilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak	79.355.000	P2PM
6	Revitalisasi Kapasitas Pengelola Malaria pada Fase pemeliharaan eliminasi	84.056.470	P2PM
7	Assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di Kabupaten/Kota	67.843.389	P2PM
8	Penilaian Eliminasi Malaria	57.600.000	P2PM
9	Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis	52.200.000	P2PM
10	Survey Kontak Penderita Kusta (Kabupaten Kota)	50.000.000	P2PM
11	Pengadaan Kelambu Malaria	152.999.961	P2PM
12	Penyelidikan Epidimiologi Dugaan Kasus Malaria sesuai Pedoman	50.000.000	P2PM
13	Penyelidikan Epidimiologi Demam Berdarah Dengue (DBD)	50.000.000	P2PM
14	Penyelidikan Epidimiologi Lonjakan Kasus Kusta dan Rumor Kasus Frambusia	50.000.000	P2PM
15	Penyelidikan Epidimiologi Kasus Zoonosis	50.000.000	P2PM
16	Efektivitas Kasus TBC melalui Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT)	35.412.000	P2PM (Perubahan)
17	Desiminasi Program Pelepasan Nyamuk Wolbachia untuk penanggulangan DBD	40.312.000	P2PM (Perubahan)
18	Pengadaan Mesin Fogging	20.000.000	P2PM (Perubahan)
19	Evaluasi Manajemcn Pelayanan Imunisasi di Fasyankes	70.619.200	Surveillance dan Imunisasi
20	Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Pelaksanaan	98.984.300	Surveillance dan

	Imunisasi Rutin		Imunisasi
21	Manajemen Suvervisi Sportif/SS dalam Pelaksanaan Imunisasi	65.984.300	Surveillance dan Imunisasi
22	Supervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi Data UCI dan BIAS	90.314.730	Surveillance dan Imunisasi
23	Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	89.124.800	Surveillance dan Imunisasi
24	Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB, Wabah, dan Bencana	69.057.860	Surveillance dan Imunisasi
25	Konsultasi ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi	30.960.000	Surveillance dan Imunisasi
26	Verifikasi Signal dan Pelacakan Kasus PD3I Penyakit Berpotensi KLB	69.057.860	Surveillance dan Imunisasi
27	Pengawasan Kebijakan KTR (7 Tatanan)	95.000.000	PTM
28	Koordinasi Pelaksanaan RBM	60.000.000	PTM
29	Monev Deteksi Dini Katarak di kab/kota	97.400.000	PTM
30	Monitoring dan Evaluasi Program Haji	60.000.000	PTM
31	Pertemuan Rujukan Kasus IVA dan SADANIS	90.000.000	PTM
32	Koordinasi Pelaksanaan Gangguan DM dan Gangguan Metabolik	319.000.000	PTM
33	Sosialisasi Deteksi Dini IVA dan SADANIS bagi Tenaga Kesehatan	107.300.000	PTM
Total		2.425.450.210	

Palangka Raya, 16 Oktober 2023

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama

KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
NIP.19760903 200802 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILYK RAKHMAWATY, SKM, MPH

Jabatan : PIt. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. RIZA SYAHPUTRA, MAP

Jabatan : KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



dr. RIZA SYAHPUTRA, MAP
NIP. 19760903 200802 1 002

Pihak Pertama,

PIt. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

LILYK RAKHMAWATY., SKM, MPH
NIP. 19700621 199312 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (<i>Treatment Coverage</i>)	Persentase	50
		Keberhasilan Pengobatan TBC (succes Rate)	Persentase	90%
		Kabupaten Kota Yang mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria	Kabupaten/ Kota	12
		Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Persentase	85
		Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi HIV)	Persentase	<0,19
		<i>Incidence Rate</i> (IR)	Persentase	<15
		<i>Case Fatality Rate</i> (CFR)	Persentase	<1
		Kabupaten Kota yang melakukan penilaian Eradikasi Frambusia	Kabupaten/ Kota	8
		Persentase ODHA dan Pasien Hemodialisa ditemukan Hepatitis C	Persentase	5
		Prevalensi Kusta 1/10.000 Penduduk	Persentase	<1
		Persentase Oralit dan Zinc pada balita	Persentase	50
		Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan Pneumonia sesuai standar	Persentase	55



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten	14.355.640	P2PM
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan Kecacingan	93.760.000	P2PM
3.	Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif)	62.916.200	P2PM
4.	Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA	62.836.500	P2PM
5.	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan pra-eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak	79.355.000	P2PM
6.	Revitalisasi Kapasitas Pengelola Malaria pada fase pemeliharaan eliminasi	84.056.470	P2PM
7.	assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di kabupaten/kota	67.843.389	P2PM
8.	Penilaian Eliminasi Malaria	57.600.000	P2PM
9.	Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis	52.200.000	P2PM
10.	Survey Kontak Penderitaan Kusta (Kabupaten Kota)	50.000.000	P2PM
11.	Pengadaan Kelambu Malaria	152.999.961	P2PM
12.	Penyelidikan Epidmiologi Dugaan Kasus Malaria Sesuai Pedoman	50.000.000	P2PM
13.	Penyelidikan Epidmiologi Demam Berdarah Dengue (DBD)	50.000.000	P2PM
14.	Penyelidikan Epidmiologi Lonjakan Kasus Kusta dan Rumor Kasus Frambusia	50.000.000	P2PM
15.	Penyelidikan Epidmiologi Kasus Zoonosis	50.000.000	P2PM
16.	Efektivitas Kasus TBC melalui pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT)	35.412.000	P2PM (perubahan)
17.	Desiminasi Program Pelepasan Nyamuk Waolbachia untuk penanggulangan DBD	40.312.000	P2PM (Perubahan)
18.	Pengadaan Mesin Fogging	20.000.000	P2PM (Perubahan)
TOTAL		1.073.647.160	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



dr. RIZA SYAHPUTRA, MAP
NIP. 19760903 200802 1 002

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

LILYK RAKHMAWATY, SKM, MPH
NIP. 19700621 199312 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA MAGDALENA, SKM

Jabatan : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. DAMAR PRAMUSINTA, M.P.H

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, M.P.H
NIP. 19760310 200312 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MAYA MAGDALENA, SKM
NIP. 19830314 200604 2 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Persentase Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan	Persen	22,2
2	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) % (45/100.000)	Persen	29.5

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tenaga Kesehatan	3.800.000.000	PAD
2	Validasi Data Nakes ke Kab/Kota	83.163.000	PAD
3	Peningkatan kapasitas nakes teladan	682.000.000	PAD
4	Penilaian nakes teladan	455.000.000	PAD
5	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (UMPEG)	200.000.000	PAD
6	Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten / Kota (UMPEG)	73.210.000	PAD
TOTAL		5.293.373.000	

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, M.P.H
NIP. 19760310 200312 1 008

MAYA MAGDALENA, SKM
NIP. 19830314 200604 2 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax.
4270391 e-mail : infodinkes@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA DWI ASTUTININGSIH, S.Far, Apt
Jabatan : KEPALA SEKSI FARMASI, ALKES DAN PKRT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 4 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala Seksi Farmasi, Alkes dan PKRT
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

ANITA DWI ASTUTININGSIH, S.Far, Apt
NIP. 19860830 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Meningkatnya persentase obat dan vaksin esensial di puskesmas	Persen	92,00
2	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	55,3

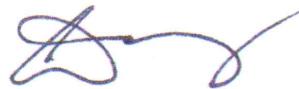
ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2023

No	Kegiatan	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1	Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kabupaten / Kota	10.000.000	PAD
2	Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke Pusat	10.000.000	PAD
3	Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1.650.204.402	PAD
4	On Job Training Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika	81.750.000	PAD
5	Monev Keamanan Pangan dan Kosmetik di Kab/Kota	143.039.225	PAD
6	Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas	140.221.675	PAD
7	Pengadaan Obat Buffer dan Alat Kesehatan	530.000.000	PAD
8	TIM Perencanaan Obat Terpadu	10.000.000	PAD
9	Pemusnahan Obat dan BHP	100.000.000	PAD
10	Pengadaan Obat Program Gizi	3.202.395.670	PAD
11	Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu	636.770.940	PAD
12	Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak	268.496.988	PAD
13	Koordinasi Peningkatan Distribusi Kefarmasian ke Kementrian Kesehatan dan Balai Penelitian dan Pengembangan	110.250.000	PAD
14	Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi Dalam Rangka Mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota (P4TO)	287.300.000	PAD
15	Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO	47.349.952	PAD
16	Pemeliharaan Instalasi Farmasi dan Gudang Vaksin	55.615.100	PAD

17	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker Puskesmas di Kab/Kota Se-Kalimantan Tengah	257.892.800	PAD
18	Pembelian Reagen Ca Serviks	38.043.100	PAD
19	Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	19.320.000	PAD
20	Monev Sarana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	107.730.000	PAD
TOTAL		7.706.379.852	

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP 19760310 200312 1 008

Palangka Raya, 4 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Farmasi, Alkes dan PKRT
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah



ANITA DWI ASTUTININGSIH, S.Far,Apt
NIP. 19860830 201001 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EVI MAHLINA, SST, M.Kes

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rainer Danny P.M,SKM.,MKM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Rainer Danny P.M,SKM.,MKM
NIP. 1986120920093 1 001

Palangka Raya, 12 Oktober 2023
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Evi Mahlina, SST, M.Kes
NIP. 19771127200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya sistem pelaporan dan Penatausahaan Keuangan Aset	1.Laporan perencanaan anggaran subbag keuangan dan aset	Dokumen	100%
		2.Laporan Rekonsiliasi keuangan dan aset	Dokumen	100%
		3.Penyediaan gaji dan tunjangan terpenuhi	Dokumen	100%
		4.Laporan rencana kebutuhan barang milik daerah(RKBMD)	Dokumen	100%
		5.Laporan Keuangan akhir tahun	Dokumen	100%
		6.Laporan Inventarisasi aset dan pengamanan BMD	Dokumen	100%
		7.Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset	Dokumen	100%
		8.Laporan realisasi keuangan	persentase	90%
		9.Ketepatan Laporan Keuangan	Waktu	100%

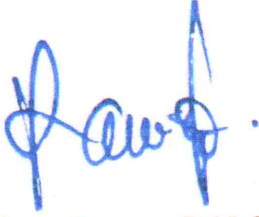
Anggaran Keuangan Kinerja 2023

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp.22.472.951.617,00	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor/Gaji Tenaga Honorer	Rp. 1.594.414.320,00	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 400.000.000,00	
4	Penyusunan RKBMD	Rp. 8.208.500,00	
5	Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah	Rp 126.356.625,00	
6	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Rp. 13.183.500,00	
7	Rekonsiliasi keuangan	Rp. 5.000.000,00	
8	RekonsiliasiAset	Rp. 3.150.000,00	
9	Pertemuan Pengelolaan Aset	Rp. 4.975.000,00	
10	Pertemuan Pengelolaan Keuangan	Rp. 6.440.000,00	
11	Penyusunan Laporan Capaian dan Realisasi Keuangan	Rp. 6.258.500,00	
12	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 17.918.000,00	
TOTAL		RP.24.658.172.562,00	

Palangka Raya, 12 Oktober 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



Rainer Danny P.M,SKM.,MKM
NIP. 1986120920093 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



Evi Mahlina, SST, M.Kes
NIP. 19771127200012 2 001



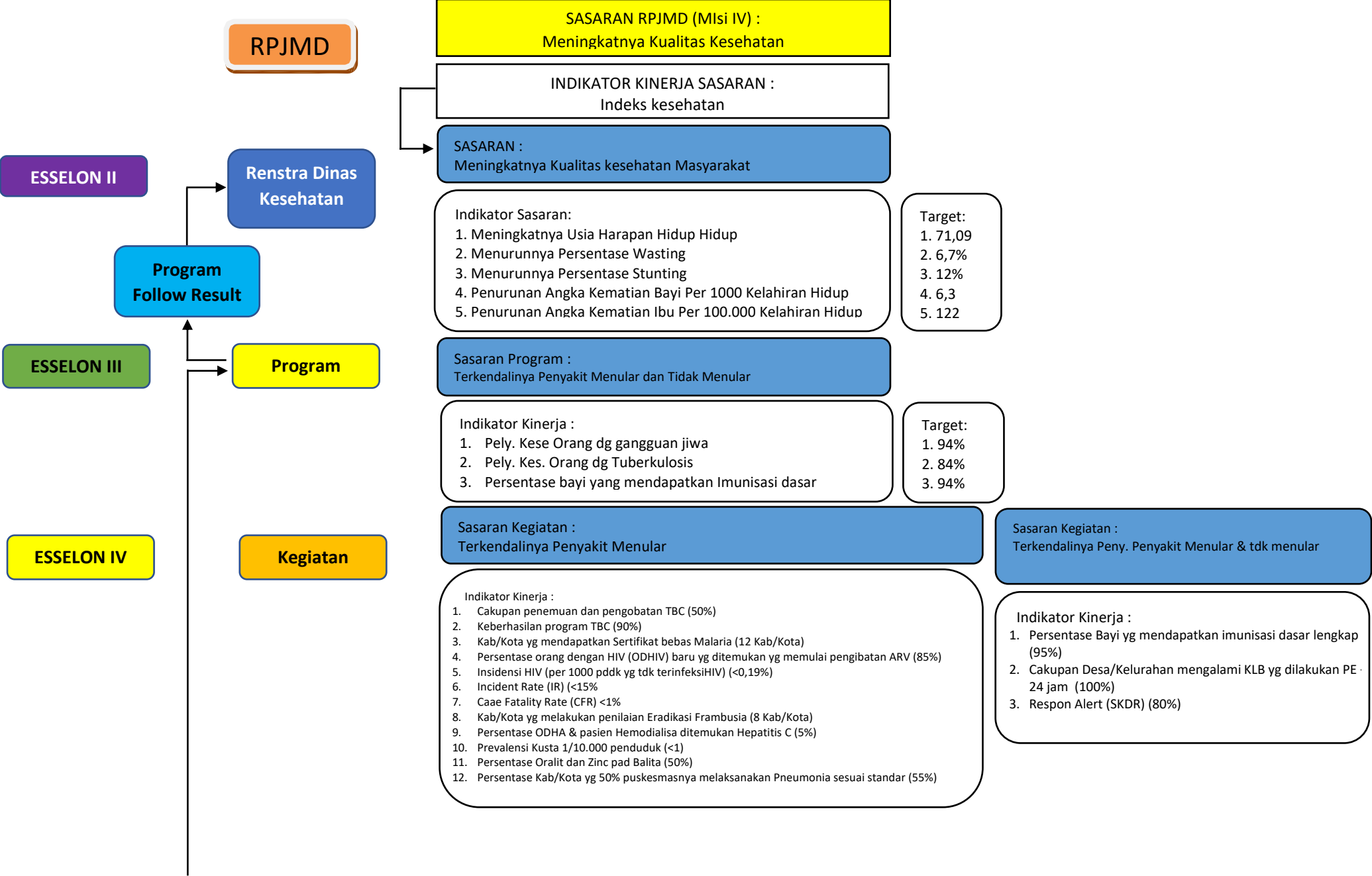
CASCADING PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

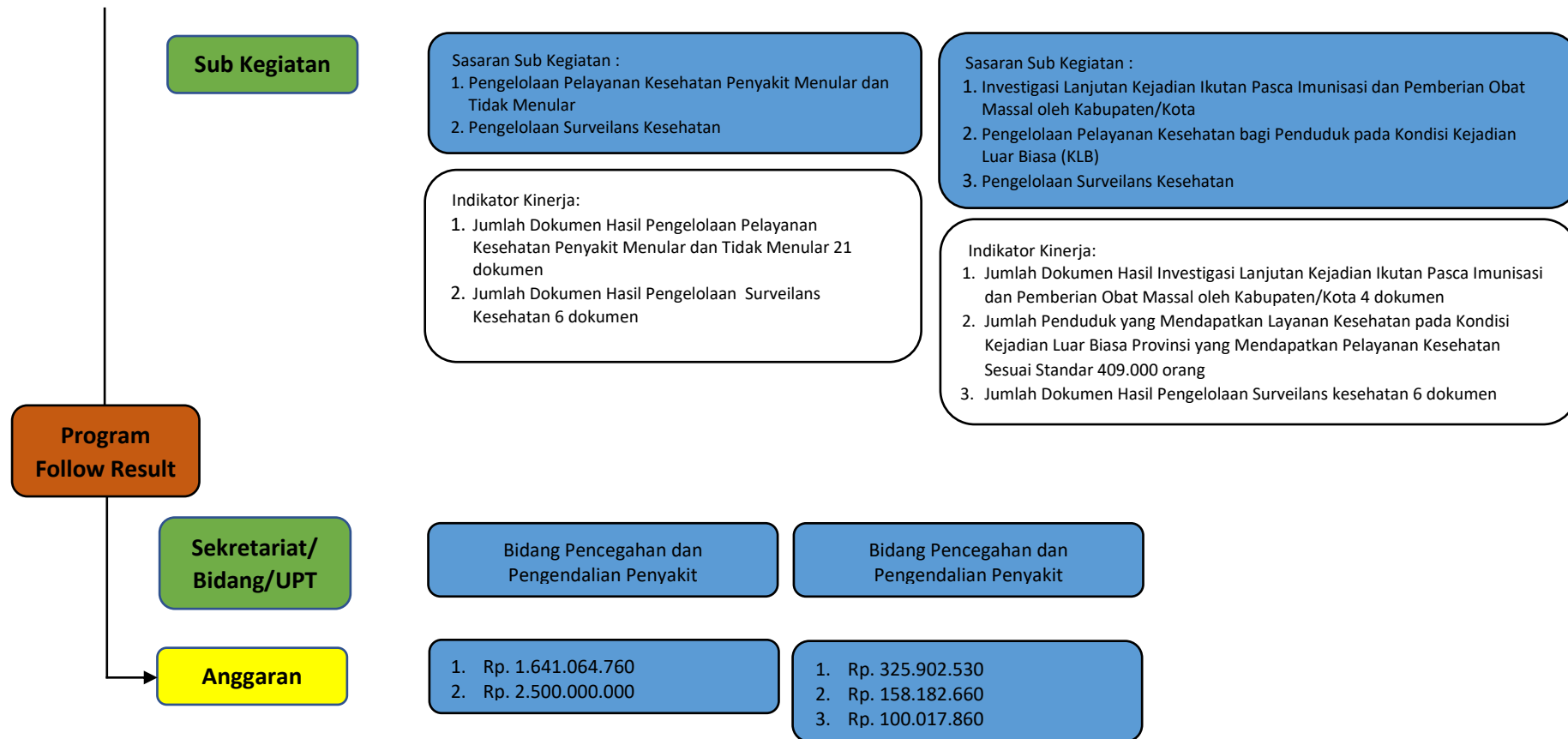
**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA

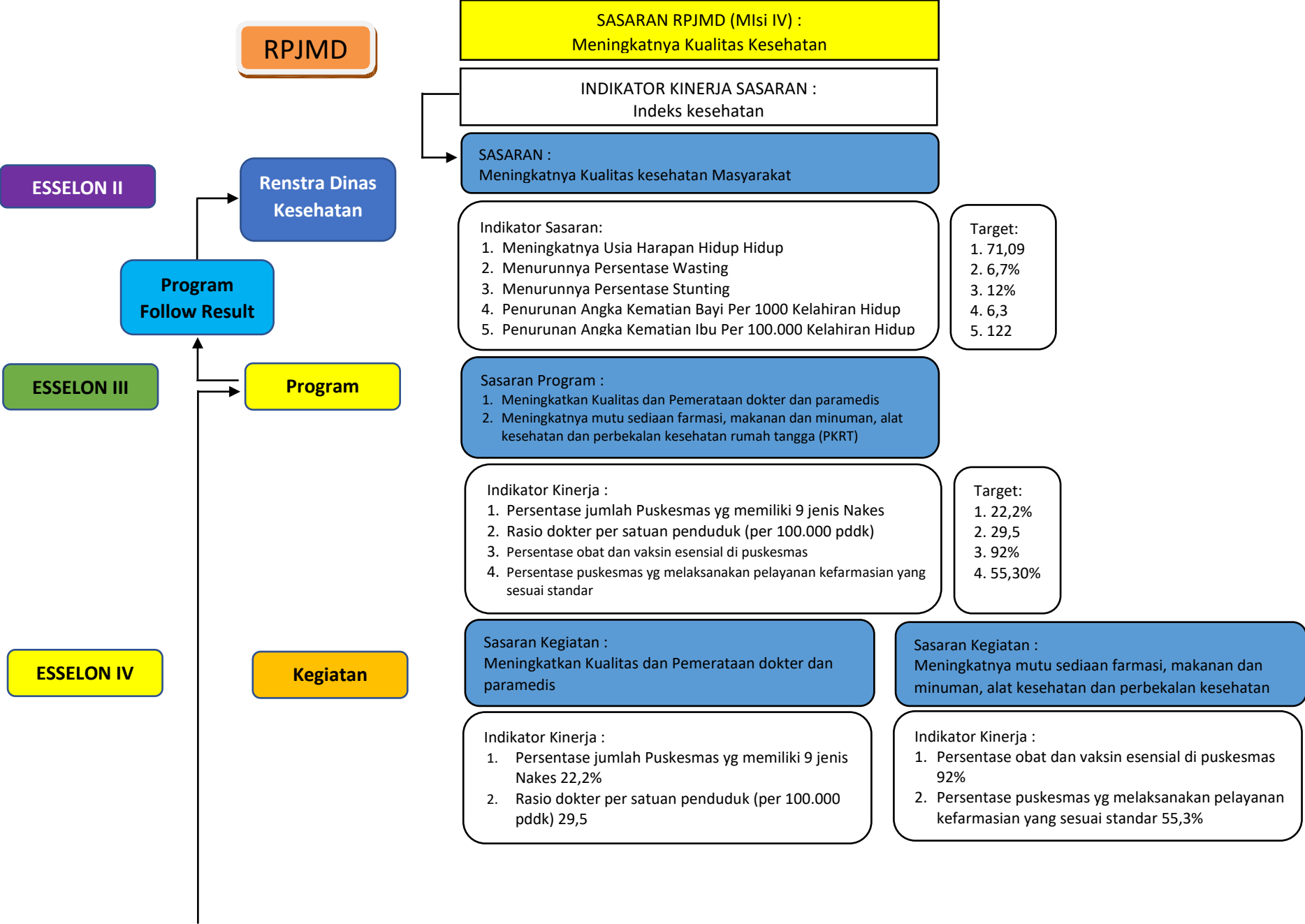
2023

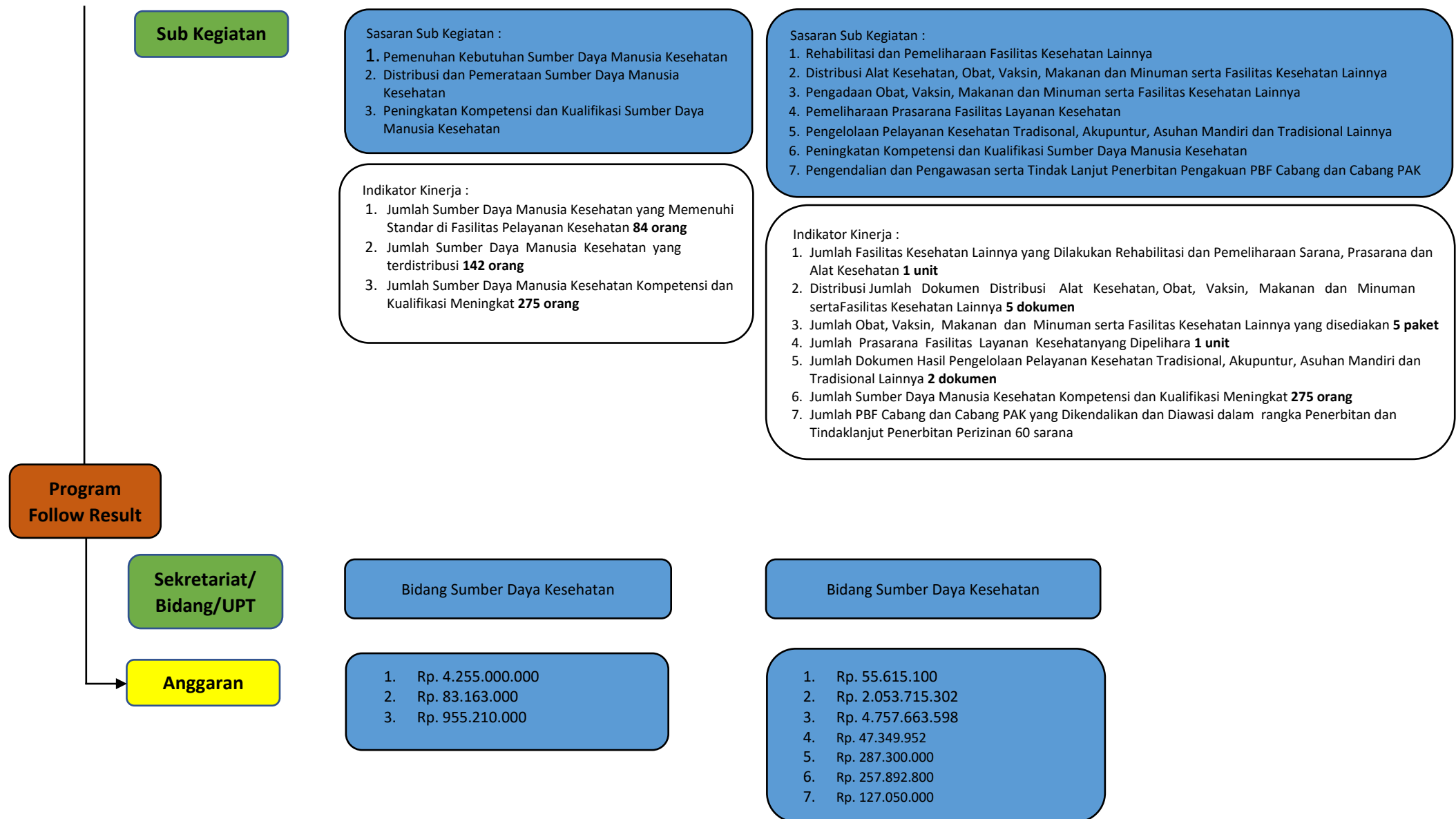
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



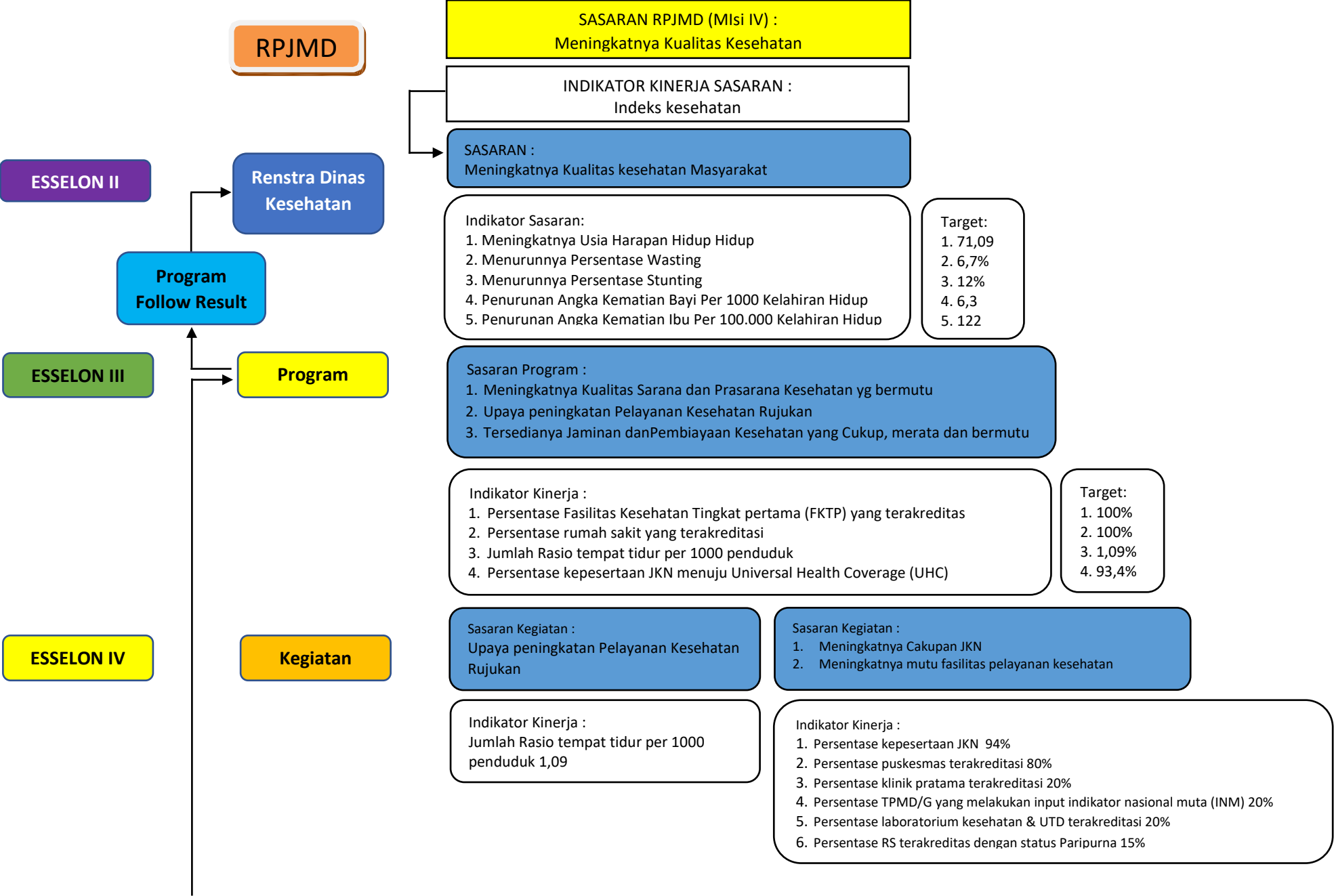


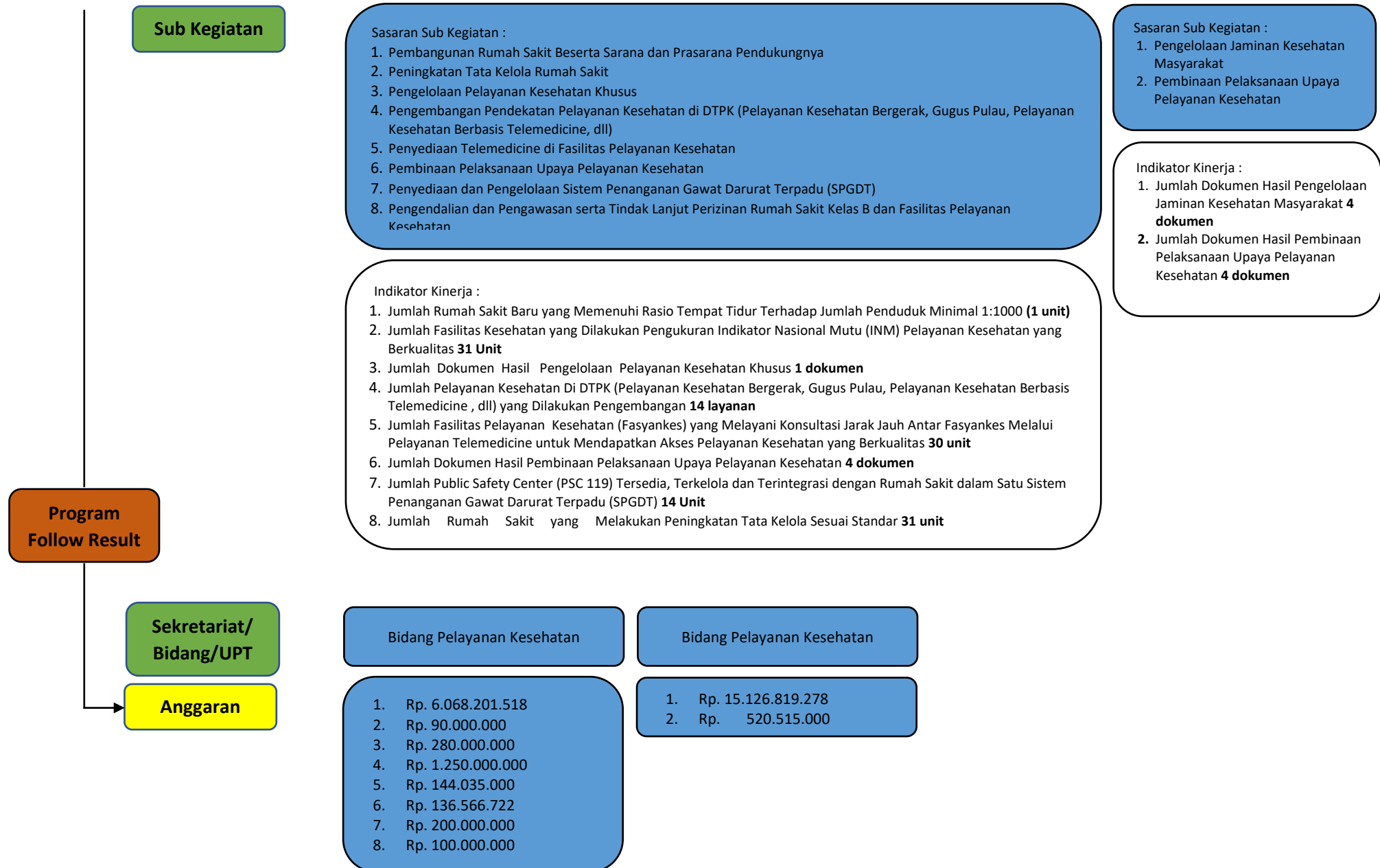
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



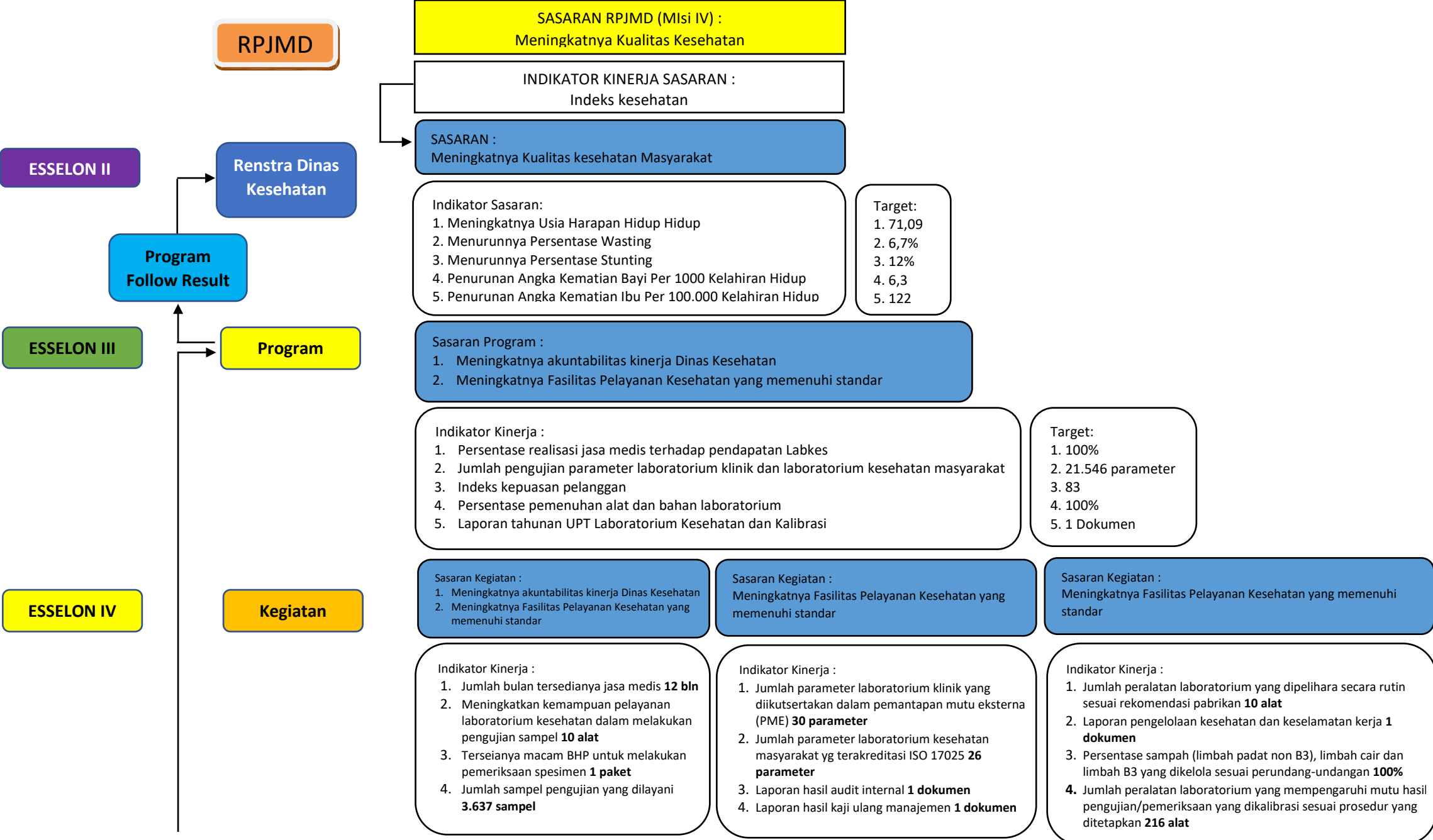


Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



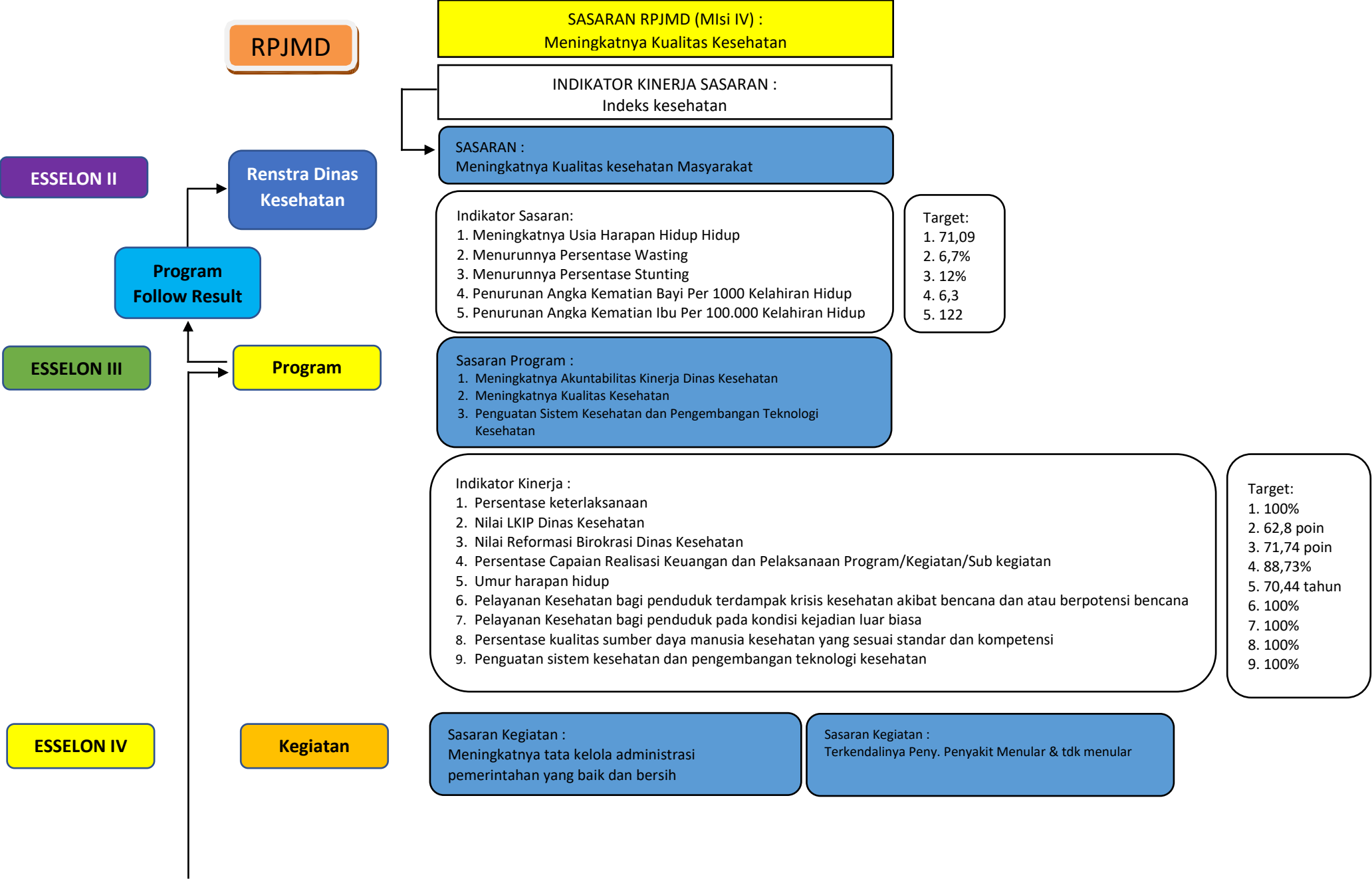


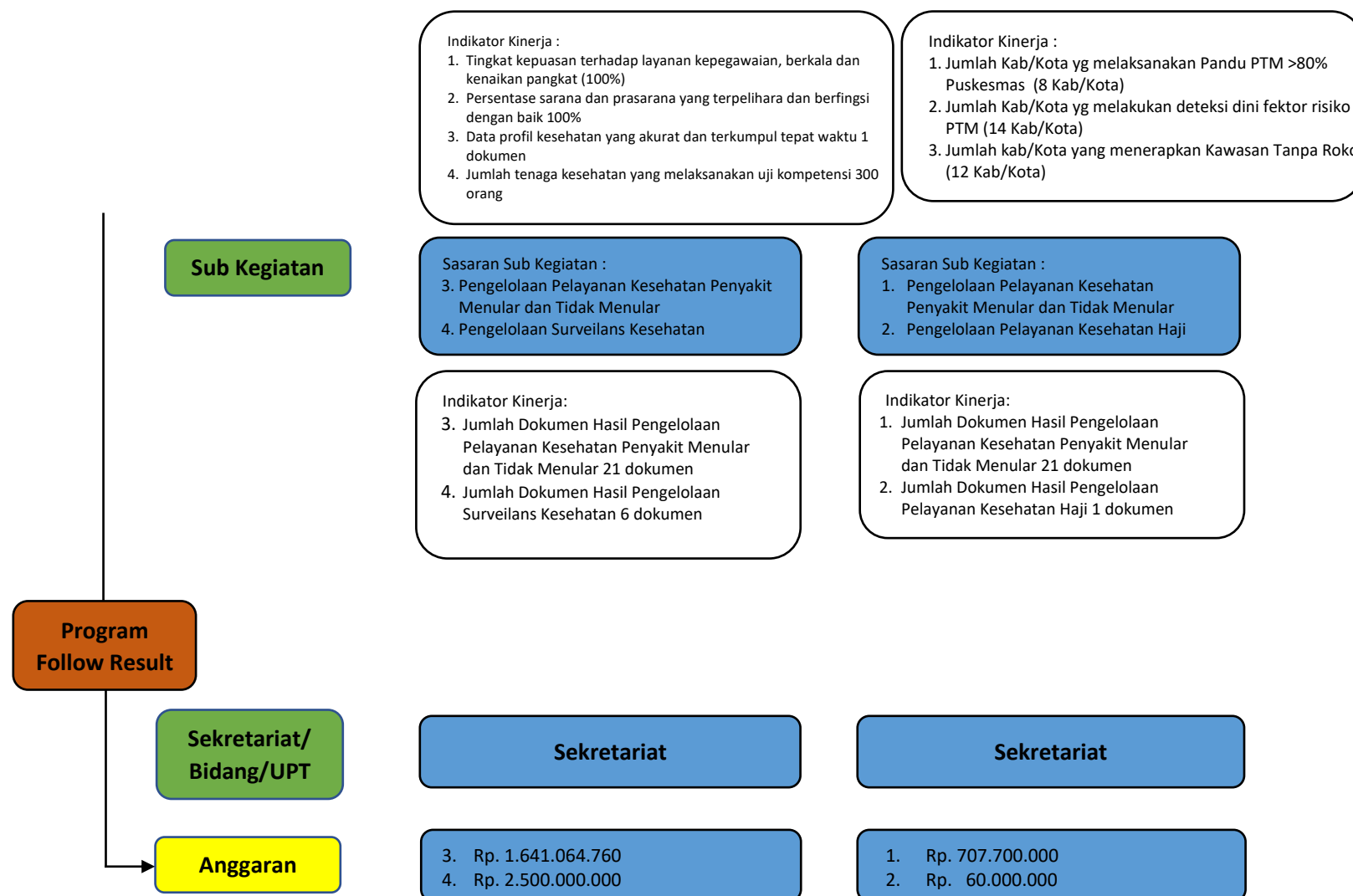
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



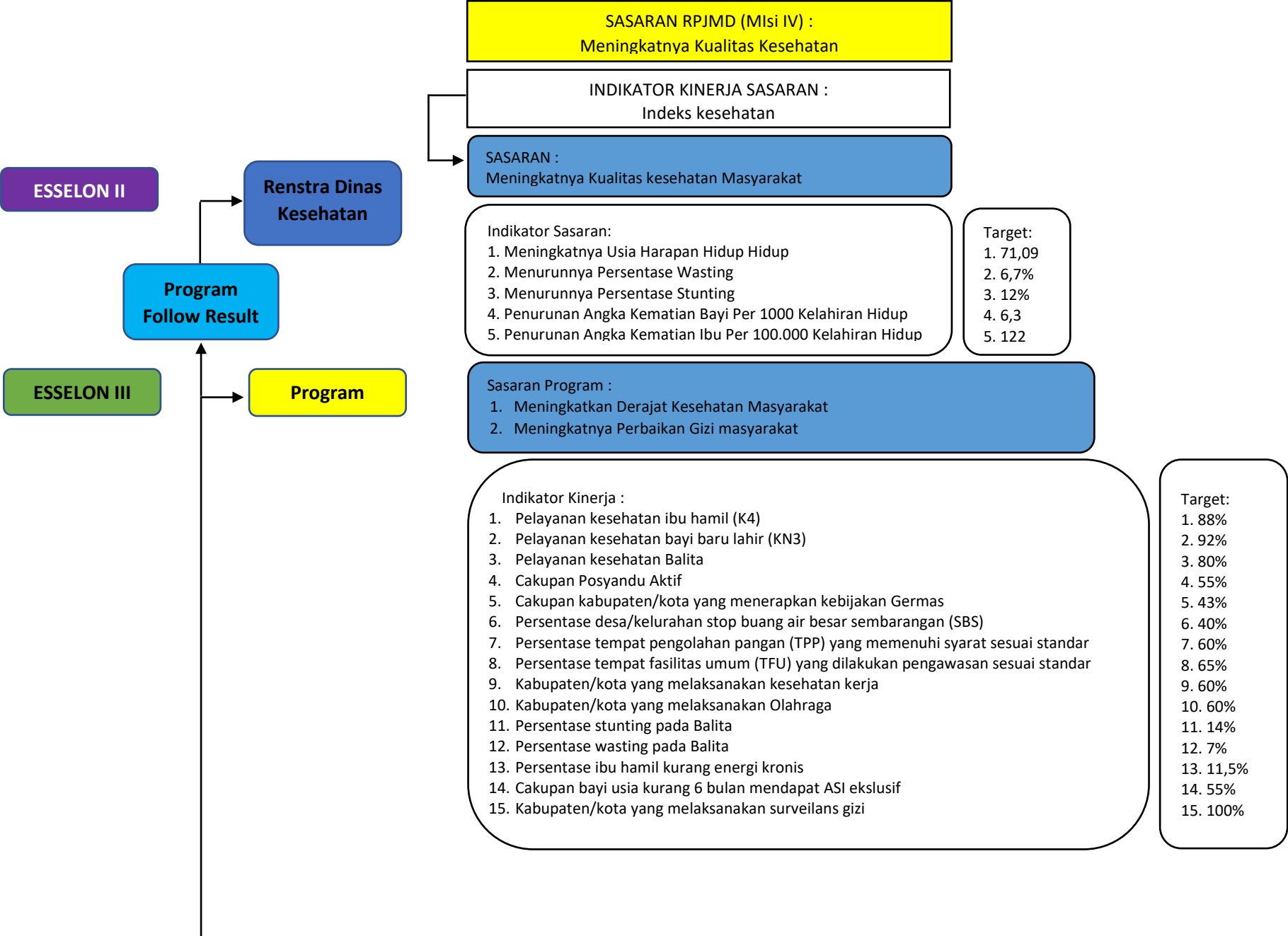
Program Follow Result	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Sasaran Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Sasaran Sub Kegiatan : 1. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Indikator Kinerja : 1. Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara 5 Unit 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 3 Unit	Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 3 Unit	Indikator Kinerja : 1. Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara 5 unit 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 3 Unit
	Sekretariat/ Bidang/UPT	UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
	Anggaran	1. Rp. 1.641.064.760 2. Rp. 2.500.000.000	Rp. 149.786.000	1. Rp. 100.000.000 2. Rp. 173.750.000

Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing





Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



ESSELON IV

Kegiatan

Sasaran Kegiatan :
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Perbaikan Gizi masyarakat

Sasaran Kegiatan :
Meningkatkan Promosi Kesehatan Dan Pembedayaan Masyarakat

Sasaran Kegiatan :
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) 95%
2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3) 92%
3. Pelayanan kesehatan Balita 80%
4. Persentase stunting pada Balita 14%
5. Persentase wasting pada Balita 7%
6. Persentase ibu hamil kurang energi kronis 11,5%
7. Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif 55%
8. Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi 100%

Indikator Kinerja :
1. Cakupan Posyandu Aktif
2. Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas

Indikator Kinerja :
1. Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)
2. Persentase tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar
3. Persentase tempat fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
4. Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
5. Kabupaten/kota yang melaksanakan Olahraga

Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan :
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan :
1. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

Sasaran Sub Kegiatan :
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Indikator Kinerja :
1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 8 dokumen
2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8 dokumen

Indikator Kinerja :
1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 dokumen
2. Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 3 dokumen
3. Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 dokumen
4. Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 1 dokumen

Indikator Kinerja :
1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 dokumen
2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 dokumen

Program Follow Result

Sekretariat/
Bidang/UPT

Anggaran

Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Rp. 1.458.065.240
2. Rp.1.034.984.400

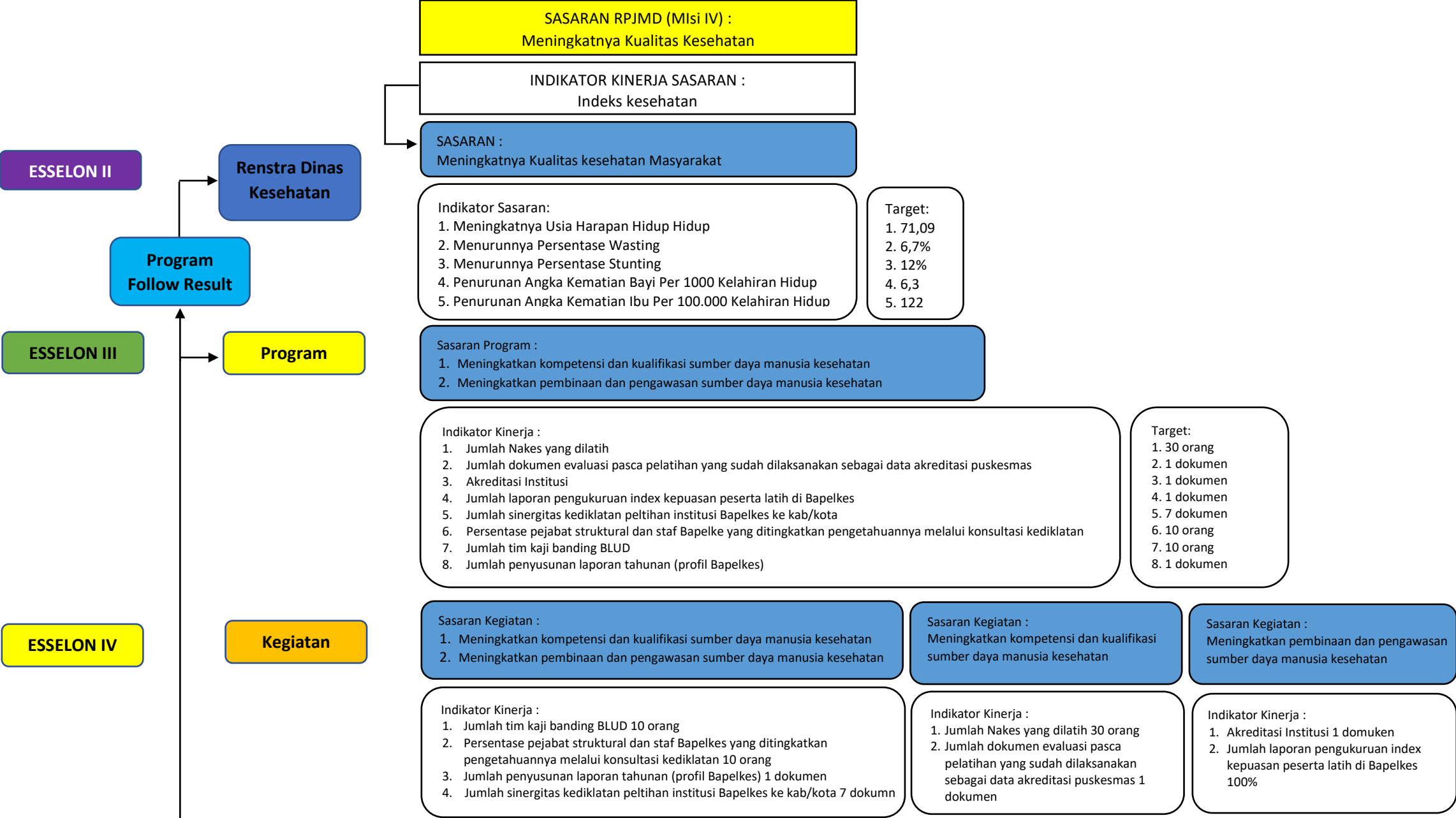
Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Rp. 276.803.300
2. Rp. 612.900.000
3. Rp. 182.198.600
4. Rp. 75.000.000

Bidang Kesehatan Masyarakat

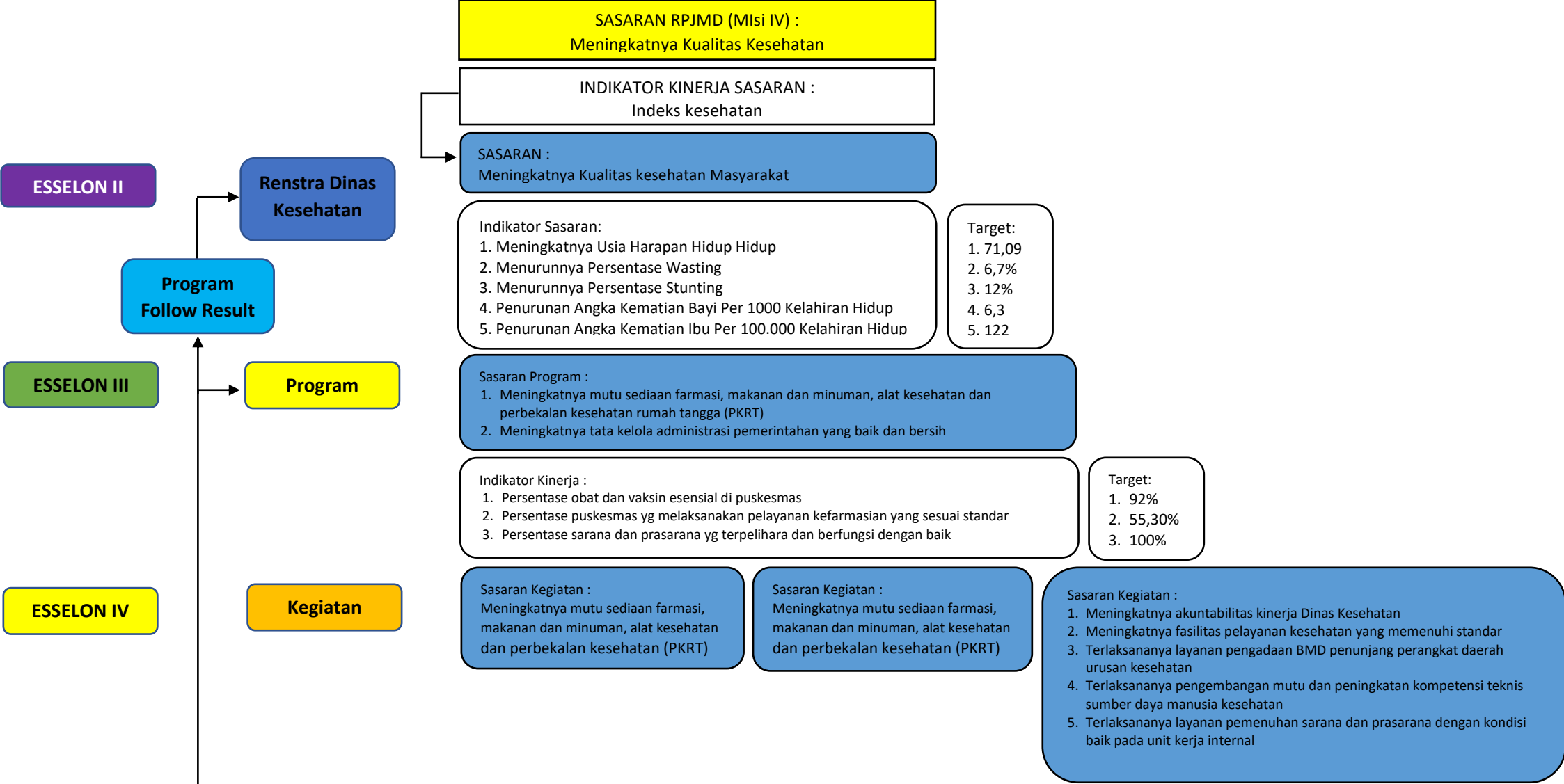
1. Rp. 295.000.000
2. Rp. 191.927.000

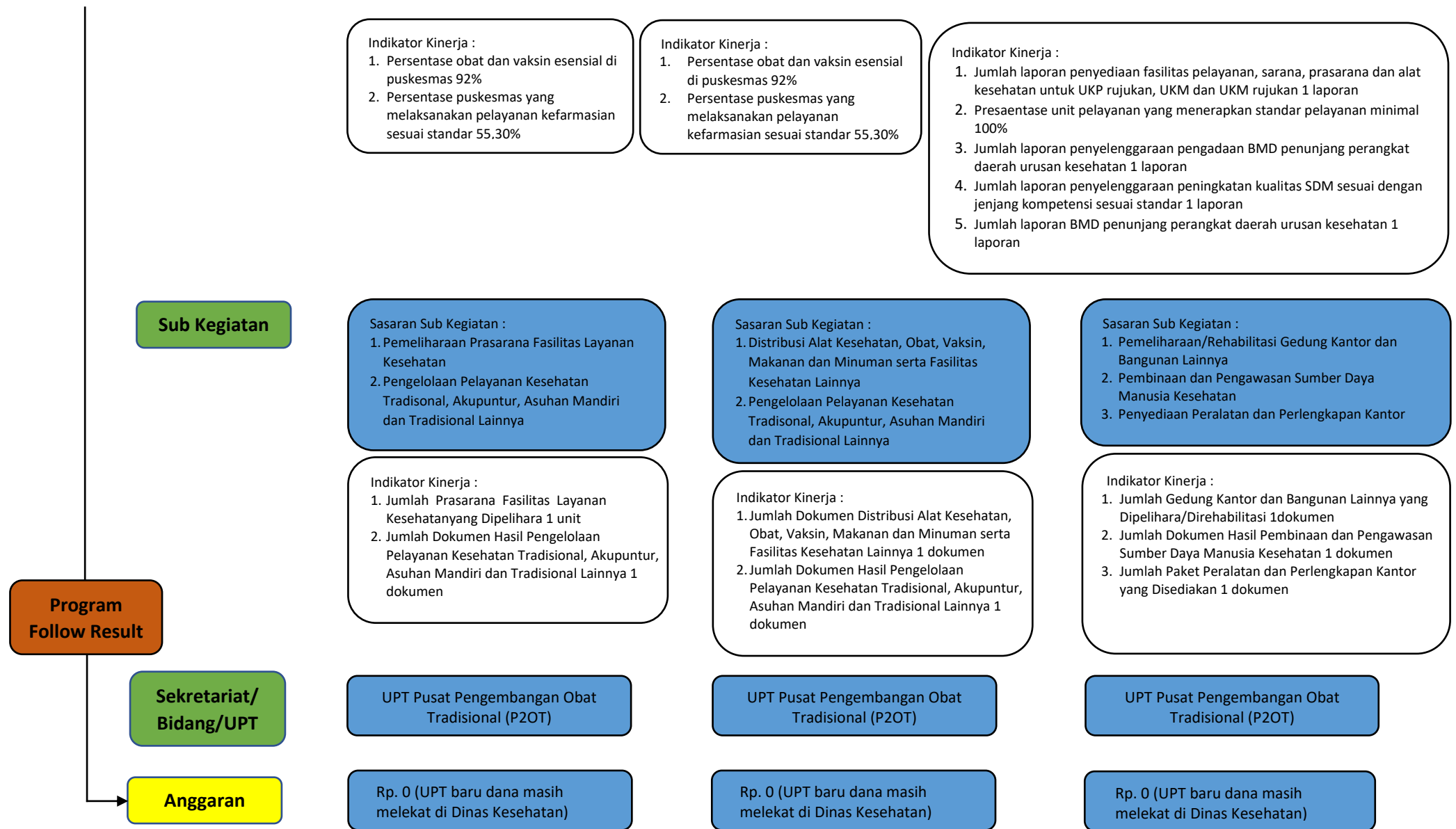
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing





Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing





Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Membuat SK Tim Penyusunan SAKIP	Membuat SK Tim Penyusunan SAKIP agar mempermudah dalam penyusunan SAKIP	Terlampir
2	Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja dan tahapan pengukuran data kinerja	Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja dan tahapan pengukuran data kinerja berdasarkan dasar hukum yang berlaku	Terlampir
3	Menggunakan teknologi informasi untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Mempelajari teknologi yang akan digunakan dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar berjalan efektif dan efisien	Terlampir
4	Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menyusun anggaran, evaluasi dalam pencapaian kinerja	Menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menyusun anggaran, evaluasi dalam pencapaian kinerja, untuk menetapkan perencanaan kinerja selanjutnya	Belum Terlaksana
5	Sosialisasi atas informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai	Melakukan sosialisasi atas informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai, sehingga mendapat perhatian bersama	Terlampir
6	Reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja	Melakukan reviu secara internal terhadap dokumen laporan kinerja sebelum di formalkan	Terlampir
7	Evaluasi kinerja internal secara berkala	Melaksanakan evaluasi kinerja internal secara berkala dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, dengan didukung dokumen hasil evaluasi yang formal	Terlampir
8	Dokumen Perencanaan Kinerja dapat menyajikan informasi yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	Menyusun dokumen Perencanaan Kinerja agar dapat menyajikan informasi yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	Terlampir
9	Dokumen Perencanaan Kinerja dapat menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang dapat menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Terlampir
10	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV	Membuat Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV	Terlampir
11	Laporan Evaluasi Mandiri Eselon III dan IV	Membuat Laporan Evaluasi mandiri Eselon III dan IV	Terlampir
12	Pada BAB III belum dijelaskan secara rinci untuk setiap realisasi yang mengacu kepada IKU dan membuat program/kegiatan yang menunjang IKU	Pada BAB III dijelaskan secara rinci untuk setiap realisasi yang mengacu kepada IKU dan membuat program/kegiatan yang menunjang IKU	Pada BAB III sudah menjelaskan secara rinci untuk setiap realisasi yang mengacu kepada IKU dan membuat program/kegiatan yang menunjang IKU
13	Pada BAB II belum menyajikan Program Prioritas Pusat dan Daerah	Pada BAB II menyajikan Program Prioritas Pusat dan Daerah	Pada BAB II sudah menyajikan Program Prioritas Pusat dan Daerah

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPH
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

LAMPIRAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,19	70,19	70,19	70,19	70,19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan, kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita (%)	7,5	7	7	7,5	7,5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)
		Persentase Balita Stunting (%)	18,4	14	14	18,4	18,4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Dinkes Prov Kalteng yang berkualitas
								Penyusunan Dokumen Perencanaan (dokumen)	Jumlah dokumen Perencanaan Dinkes Prov Kalteng yang berkualitas
3.	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	Koordinasi dan Evaluasi Dokumen DAK Kesehatan (kab/kota)	Jumlah dukungan koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen DAK Kesehatan (kab/kota)
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
								Penyusunan dokumen RKA Dinas Kesehatan dan UPT (dokumen)	Jumlah dokumen RKA Dinkes dan UPT yang tersusun sesuai dokumen perencanaan (dokumen)
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	131	131	131	131	131	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
								Rapat lintas program penyusunan dokumen perencanaan (orang)	Jumlah Rapat lintas program Bidang Kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan (orang)
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								Rapat Lintas Bidang dan Program dalam rangka pencapaian Kinerja bidang kesehatan (kali)	Jumlah Rapat Lintas Bidang Kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja bidang kesehatan (kali)
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja
								Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah dokumen penyusunan kinerja yang tersusun (dokumen)
								Penyusunan LAKIP (dokumen)	Jumlah Laporan Kinerja Dinkes Prov.Kalteng
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN (Bulan)
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Gaji Dan Tunjangan ASN (bulan)	Jumlah bulan tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
								Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan rekonsiliasi keuangan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
								Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan keuangan
								Pertemuan Pengelolaan Keuangan (Kegiatan)	Jumlah rutin/berkala Pertemuan Pengelolaan Keuangan
								Pertemuan Pengelolaan Asset dan Persediaan (Kegiatan)	Jumlah rutin/berkala Pertemuan Asset dan Persediaan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD
								Penyusunan Laporan Capaian dan realisasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penyusunan capaian dan realisasi keuangan SKPD
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	layanan administrasi barang milik daerah (Layanan)
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Rapat Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah (bulan)	Jumlah Asuransi Bangunan Gedung Kantor milik SKPD
								Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
								Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah (BMD) (dokumen)	Jumlah Kabupaten /Kota yang mendapat Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah (BMD)
								Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah , Jenis, Lokasi Keadaan dan Data lainnya Tercatat lengkap keberadaan Data Barang pada Dinkes Kalteng
								Rekoniliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekoniliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Rapat Rekoniliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rutin/berkala Rapat Rekoniliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas (persen)
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas Harian
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
								Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Formal
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum Dinas kesehatan dan UPTD (Layanan)
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	Persentase pencahayaan di ruang kerja dan disekitar kantor semakin baik
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan alat tulis kantor (bulan)	Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor Bapelkes
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
								Penyediaan peralatan rumah tangga (Bulan)	Jumlah item terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
								Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan (bulan)	Jumlah bulan terpenuhi Penggandaan /fotocopy dan cetak administrasi perkantoran
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	Persentase anggaran penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
								Penyediaan Spanduk/Umbul2	
								Penyediaan Bahan/Material Pameran dan Pawai Hari Kalteng	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyediaan makanan dan minuman (bulan)	tersedianya makan dan minum rapat (Bulan)
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	adanya kesepakatan antara pusat dan provinsi dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan (Bulan)
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)	adanya kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/ kota dalam hal pelaksanaan kegiatan (Bulan)
								Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	tersedianya makan dan minum rapat (Bulan)
								Dukungan Kelembagaan untuk pengembangan RS Provinsi Wilayah Barat	
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Sistim Kearsipan Online	Persentase tersedianya sistem kearsipan online
								Pengelolaan Arsip Dinamis	
								Pengelolaan tata persuratan perkantoran	
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Pengembangan dan Pengelolaan PPID (bulan)	Jumlah dukungan pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Prov.Kalteng (tim)
								E-Health Terpadu	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan pengadaan barang milik daerah (Layanan)
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
								Pengadaan Mebel di Dinkes dan Furniture Kamar Bapelkes	Jumlah paket pengadaan barang Mebel di Bapelkes
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
								Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai (%)
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Pengadaan trafo dan Pemasangan / perbaikan Instalasi listrik	Presentase jumlah anggaran
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Pembuatan dan Pemeliharaan Taman	
								Pengadaan AC sentral, Meja Partisi dan Toilet Lobby kantor juga area parkir	
								Revitalisasi Toilet Bapelkes	
								Pembuatan ruang rapat kerja sub koordinator perencanaan dan evaluasi	Jumlah ruang rapat kerja yang disediakan
								Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran P2OT	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Prov.Kalteng
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan jasa penunjang Dinas kesehatan dan UPTD (Layanan)
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	Jumlah bulan Tersedianya materiail dan benda pos lainnya dan terlaksananya pengiriman surat dan paket sarana kesehatan se-kalteng (Bulan)
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	Jumlah bulan terbayarnya tagihan komunikasi, air dan listrik (Bulan)
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan dan jasa kebersihan kantor/Gaji tenaga honorer

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Penyediaan jasa administrasi keuangan (Bulan)	Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan
								Penyediaan jasa kebersihan kantor/Gaji Tenaga Honoror	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor/Gaji tenaga honoror
								Jasa Medis Balai Labkes	Jumlah bulan tersedianya jasa medis balai labkes
								Medical Check Pegawai Dinkes dan UPT	
								Biaya Rujukan berobat Pegawai Dinkes dan UPT	
								Retribusi Sampah Dinas Kesehatan dan UPT	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal (persen)
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	persentase anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional R-4
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (bulan)	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan di Bapelkes
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Bulan)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala untuk Tower air dan pengecatan
								Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
								Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan LAN	Persentase anggaran untuk tersedianya Sarana Jaringan LAN (Local Area Network)
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (persen)
								Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta kualitas peralatan kesehatan fasilitas kesehatan (persen)
								Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
								Operasional Pembangunan RS Rujukan Kelas B	Jumlah dokumen operasional (administrasi, akomodasi, transportasi dan kegiatan lainnya) dalam persiapan pembangunan Rumah sakit rujukan Kelas B di Kalimantan Tengah
								Konsultasi Perencanaan pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahapan pengawasan berkala (MYC)	Jumlah Dokumen Konsultan FS, Master Plann dan DED 2 RS Rujukan Kelas B di Kalimantan Tengah
								Operasional dalam rangka Pengawasan dan Persiapan Pembangunan RS Regional Rujukan Kelas B (Pengadaan Tanah)	
								Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
								Penguatan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)	Jumlah RS yang mendapatkan pengawasan pelayanan kesehatan secara eksternal di kalimantan tengah
								Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll) yang Dilakukan Pengembangan
								Pelayanan Kesehatan Lapangan (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan lapangan dalam menunjang kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan tertentu yang memerlukan pelayanan langsung ke masyarakat (Kegiatan)
								Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatanyang Disediakan
								Pengadaan Mobil ambulance	
								Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara
								Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium di BLK	Persentase pemenuhan jumlah dan jenis bahan penunjang pakai habis untuk pengujian laboratorium klinik dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat
								Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara secara rutin sesuai rekomendasi fabrikasi, jumlah dan waktu penggunaan, dan saat adanya gangguan fungsi peralatan atau kecurigaan
								Pengadaan Bahan Kimia di BLK	Persentase pemenuhan jumlah dan jenis bahan kimia dan bahan penunjang untuk pengujian laboratorium klinik dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat
								Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatanyang Dipelihara
								Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO	Jumlah peralatan yang dilakukan pemeliharaan dan revitalisasi Peralatan P4TO

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatanyang Berkualitas
								Monev penguatan jejaring telemedicine	Kab/kota yang rumah sakit nya telah memenuhi kualifikasi standar pelayanan kesehatan (30 RS, Kriteria disesuaikan)
								Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
								Biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari Instalasi Farmasi Provinsi Ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (kab/kota)	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di fasilitas Kesehatan (kab/kota)
								Koordinasi peningkatan distribusi kefarmasian ke kementerian kesehatan dan balai penelitian dan pengembangan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi peningkatan distribusi kefarmasian Provinsi dan Pusat
								Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas (Kabupaten Kota)	Jumlah orang yang melaksanakan monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas ke 14 kab/kota
								Monev Keamanan Pangan dan Kosmetik di Kab/Kota (Persentase)	Jumlah orang yang melaksanakan monev keamanan pangan dan kosmetik ke 14 kab/kota
								Monev peningkatan ketersediaan, mutu obat dan alat kesehatan di kab/kota	Persentase kesesuaian obat untuk Fasilitas kesehatan Kab/Kota sesuai dengan Formularium Nasional
								Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan
								Pengadaan obat buffer dan alat kesehatan	Tersedianya obat buffer dan bahan habis pakai
								Koordinasi kefarmasian dan alat kesehatan ke pusat	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
								Tim Perencanaan Obat Terpadu	Terselenggaranya Rapat Tim perencanaan Obat Terpadu tiap triwulan dalam rangka sinergis pengelolaan obat terkait One Gate Policy (Kebijakan Satu Pintu)
								Pemusnahan obat dan BHP	Terlaksananya kegiatan pemusnahan Obat dan BHP
								Pengadaan Obat program Gizi dan KIA	Tersedianya obat program Gizi dan KIA
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
								Analisis Hasil PIS-PK Terintegrasi Lintas Program di Tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan analisis data PIS-PK untuk intervensi lanjut dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Puskesmas
								Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (Persen)
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar
								Tim Terpadu Krisis Kesehatan (Tim)	Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan (Tim)
								Buffer stock PMT Balita (Bencana)	Tersedianya biskuit PMT Balita untuk buffer stock bencana
								Buffer stock PMT Ibu Hamil (Bencana)	Tersedianya biskuit PMT ibu hamil untuk buffer stock bencana
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
								Tim gerak cepat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana	Persentase lokasi KLB yang telah dikunjungi oleh Tim Terpadu KLB/Bencana
								Tim terpadu kejadian luar biasa (KLB) Tingkat Provinsi (tim)	Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) (Tim)
								Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB, wabah dan bencana	Persentase kasus KLB yang telah dilakukan Penyelidikan Epidemiologi
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
								Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Anak (OT)	Jumlah Tenaga Kesga melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Anak
								Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita (OT)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
								Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah
								Pembentukan Tim AMPSR Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
								Pertemuan Penguatan Aplikasi Simatneo, MPDN, E-kohort, Komdat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
								Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita bagi Petugas Kesehatan Tingkat Puskesmas/ FKTP	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita
								Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	Jumlah orang yang melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
								Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan Bagi Catin	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
								KIT Balita (KIT PPAM Kespro Bencana)	Jumlah Paket Kit Individu Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM) Kesehatan Reproduksi
								KIT Ibu Hamil (KIT PPAM Kespro Bencana)	
								KIT Lansia (KIT PPAM Kespro Bencana)	
								Penguatan Pelayanan Kesehatan terhadap Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KTP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
								Monev Kespro	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Monev Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
								Orientasi Penggunaan Panduan Praktis untuk caregiver informal pada Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	Jumlah Kabupaten/ Kota menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
								Sosialisasi/ Advokasi/ Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia (HLUN/ LS)	Jumlah Kabupaten/ Kota menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
								Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi dan Monev Kegiatan Gizi (OT)	Jumlah Tenaga Gizi yang melaksanakan Pelacakan dan Konfirmasi masalah gizi dan Monev Kegiatan Gizi di 14 Kab/Kota (OT)
								Penyuluhan Deteksi Dini Stunting bagi Kader Posyandu (OT)	Jumlah Kader Posyandu yang diberi Penyuluhan Deteksi Dini Stunting pada Balita 14 Kab/Kota (orang)
								Pertemuan Koordinasi Pengelola Program Gizi (OT)	Kegiatan Koordinasi petugas gizi - kesga dalam Pengelolaan Program Gizi
								Konsultasi Program Gizi (OT)	Jumlah Tenaga Gizi yang melakukan Konsultasi Program Gizi ke Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI
								Pembinaan Surveilans Gizi	Jumlah Tenaga Gizi yang melaksanakan Kegiatan Pembinaan Surveilans Gizi di 14 Kab/Kota
								Pertemuan Konvergensi LP/LS Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Tk. Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (%)	Kegiatan Pertemuan Konvergensi LP/LS dalam upaya percepatan perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2023
								Monev Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Dan Intervensi Penanggulangan Stunting Tahun 2022 (OT)	Jumlah Tim Percepatan Perbaikan Gizi yang melaksanakan Kegiatan Monev Dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat dan Intervensi Penanggulangan Stunting di 14 Kabupaten/ Kota
								Monev Program Gizi ke Kabupaten dan Konsultasi Program Gizi ke Pusat	Jumlah tenaga gizi yang melaksanakan kegiatan pembinaan surveilans gizi di 14 kab/kota
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
								Senam Jumat pagi bersama ASN dan tenaga kontrak (BULAN)	Jumlah bulan terselenggaranya Senam Jumat pagi bersama ASN dan Tenaga Kontak (Bulan)
								Pengukuran kebugaran jasmani dengan metode aplikasi SIPGAR untuk ASN dinkes dan OPD lainnya	Jumlah ASN Dinkes dan OPD lainnya yang mengikuti pemeriksaan kebugaran
								Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan senam hamil di puskesmas, sanam lansia di posyandu lansia di posyandu lansia dan pada kelompok masyarakat (Jantung sehat, Prolanis) serta pemantauan kebugaran anak SD/MI	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan olahraga di tingkat puskesmas, klub olahraga lainnya dan kebugaran anak SD/MI
								Penilaian MBH (Mitra Bhakti Husada) Tingkat Provinsi	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
								Bimtek ke kab/ kota dalam rangka percepatan pencapaian target TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) yang bersertifikat laik hygiene sanitasi	Jumlah kab/ kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka percepatan pencapaian target TPP yang memenuhi syarat dan bersertifikat laik hygiene sanitasi
								Pembinaan dan Pengawasan limbah medis pada fasyankes Se Kalteng	Jumlah kab/ kota yang dilakukan pembinaan dan pengelolaan limbah medis fasyankes se Kalimantan Tengah
								Monitoring keberlanjutan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	Jumlah kabupaten/ kota yang dibina dan dilakukan pengawasan keberlanjutan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
								Pendampingan intervensi kesehatan lingkungan	Jumlah kabupaten/ kota yang dilakukan Pendampingan intervensi kesehatan lingkungan untuk mendukung percepatan tercapainya target indikator program kesehatan lingkungan
								Konsultasi dan koordinasi program Kesehatan Lingkungan ke luar daerah	jumlah petugas yang melakukan konsultasi dan koordinasi program Keseling
								Bimbingan teknis dalam rangka mendukung program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya bimtek dalam rangka Mendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
								Konsultasi Pusat PROMKES, KESMAS	Kab/kota melakukan implementasi kebijakan germas, kab/kota melakukan pembinaan Pokjanal Posyandu
								Penyediaan Media dalam penyebarluasan informasi kesehatan terkait Germas	Jumlah Kab/Kota yang menjadi sasaran penyebarluasan media Germas sebanyak 14 Kab/Kota
								Penggerakan Masyarakat Cegah Stunting di Provinsi dan di Daerah	Jumlah kegiatan penggerakan masyarakat cegah stunting di Provinsi dan di Daerah selama tahun 2023 sebanyak 3 kali
								Penggerakan Masyarakat Bumi Sehat di Daerah dan Provinsi	Jumlah kegiatan penggerakan masyarakat Bumi Sehat di Daerah dan Provinsi selama tahun 2023 sebanyak 2 kali
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
								Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi dalam rangka mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota (P4TO)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi dalam rangka mendukung GERMAS
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
								Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten	Jumlah Kab/kota yang angka kesembuhan dan angka keberhasilan pengobatan TB kusta 90% (kab/kota)
								Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan Kecacingan (Kabupaten Kota)	Jumlah Kab/Kota yang risiko penularan filariasis kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10% (Kabupaten Kota)
								Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif) (Kabupaten Kota)	Meningkatnya jumlah pengetahuan pengelola program Diare, Tyfoid dan Hepatitis (Kabupaten Kota)
								Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA (Kabupaten Kota)	Terlaksananya Koordinasi dengan petugas pengelola dalam tatalaksana ISPA (Kabupaten Kota)
								Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan pra-eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak (kab/kota)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan peta jalan Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis dari Ibu ke Anak di Tahun 2022 (Kabupaten Kota)

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Revitalisasi Kapasitas Pengelola Malaria pada fase pemeliharaan eliminasi (Kabupaten Kota)	Jumlah Kab/kota yang angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun (Kabupaten Kota)
								Assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di kabupaten/kota	Jumlah Kabuaten/Kota Bebas Frambusia dan melaksanakan surveilans frambusia
								Penilaian Eliminasi Malaria	Jumlah Kab/kota yang angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun (Kabupaten Kota)
								Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis	Jumlah Kab/Kota yang risiko penularan filariasis kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10% (Kabupaten Kota)
								Survey Kontak Penderitaan Kusta (Kabupaten Kota)	Kasus kusta tanpa cacat (Kabupaten Kota)
								Pengawasan ke Kabupaten dan Kota yang Melaksanakan Kebijakan KTR 100% di 7 Tatanan	Jumlah kab/kota yang melaksanakan implementasi KTR di 7 tatanan
								Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40 % populasi
								Monev Deteksi dini Katarak di Kab/Kota (Kabupaten Kota)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada 40% populasi (Kabupaten Kota)
								Pertemuan Rujukan kasus Deteksi Dini Iva dan SADANIS di Kab/Kota (Kabupaten Kota)	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun (Kabupaten Kota)
								Koordinasi Pelaksanaan Gangguan Diabetes Melitus (DM) dan Gangguan Metabolik (Kabupaten Kota)	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM pada ≥ 80 % populasinya
								Sosialisasi Deteksi Dini IVA dan Sadanis bagi Tenaga Kesehatan(Kabupaten)	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun
								Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Pencegahan Penyakit	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti rapat koordinasi teknis dalam pengendalian penyakit
								Pengadaan Kelambu Malaria	
								Konsultasi Bidang P2P ke Kementerian Kesehatan RI/Dinkes Provinsi Prioritas	
								Pembinaan Utilisasi Sistem Informasi surveilans penyakit menular terpadu	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
								Monitoring dan evaluasi program kesehatan haji	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
								koordinasi pelayanan kesehatan jiwa dan napza di kabupaten kota	jumlah ODGJ berat yang mendapatkan layanan
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis
								Analisa dan evaluasi ketersediaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi (NPP) di sarana pelayanan kesehatan	Jumlah Kab/kota yang telah tersedia dokumen hasil analisa dan evaluasi ketersediaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi (NPP) di sarana pelayanan kesehatan di 14 kab/kota
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
								Pelayanan Operasi Katarak	Jumlah mata yang dioperasi massal gratis untuk 3 kab/kota di kalimantan tengah
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
								Monitoring Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota/Rumah Sakit/Puskesmas yang pelaksanaan JKN nya termonitor
								Sinkronisasi dan Konsolidasi Program JKN	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Program JKN antara pusat dan daerah
								Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Tingkat Provinsi	Jumlah Pertemuan Monev JKN tingkat Provinsi yang dilaksanakan
								Premi Kartu Kalteng Berkah	Jumlah masyarakat tidak mampu yang masuk di Program PBI JKN/KIS
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
								Konsultasi ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan konsultasi ke pusat program surveillance dan imunisasi
								Verifikasi Signal dan pelacakan kasus PD3i Penyakit Berpotensi KLB	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap suatu bencana
								Penyelidikan Epidemiologi Dugaan Kasus Malaria Sesuai Pedoman	
								Penyelidikan Epidemiologi Demam Berdarah Dengue (DBD)	Persentase angka kasus kematian akibat dengue menurun
								Penyelidikan Epidemiologi Lonjakan Kasus Kusta dan Rumor Kasus Frambusia	
								Penyelidikan Epidemiologi Kasus Zoonosis	Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
								Monitoring, evaluasi pelaksanaan program (Kali)	Jumlah fasilitasi/monev/konsultasi pelaksanaan program kesehatan
								Rapat kerja bidang kesehatan se Kalimantan Tengah (orang)	Jumlah Kebijakan bidang kesehatan yang tersinergitas antar bidang dan program pada kab/kota (orang)
								Koordinasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab./Kota (Kab/kota)	Jumlah kab/kota yang memiliki layanan kesehatan standar
								Pemantauan Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan (Kab/kota)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan DAK bidang kesehatan sesuai ketentuan (kab/kota)
								Fasilitasi Adinkes	
								Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
								Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan	Faskes di Kab/kota yang melaksanakan updating data ASPAK, RS Online, SISRUTE dan SIRANAP secara rutin dan disiplin (30 RS, 14 Dinkes kab/kota)
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mutu fasyankes FKRTL	Terlaksananya Monev di 20 RS di Kab/Kota, meliputi data Rumah Sakit yang menerapkan Indikator Nasional Mutu

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Cluster Binaan /Tim pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPCB/TPMDK)	Terlaksananya Monev TPCB di 14 Kab/Kota dan data puskesmas yang terakreditasi serta puskesmas yang menerapkan Indikator Nasional Mutu
								Bimbingan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan bimbingan & evaluasi pelayanan kesehatan primer, agar memiliki fasilitas pelayanan kesehatan primer yang terstandarisasi, & ter-registrasi sesuai standar
								Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
								Evaluasi Manajemen Pelayanan Imunisasi di Fasyankes	Jumlah fasyankes yang dilakukan Pemantauan pelaksanaan imunisasi pada fasilitas pelayanan kesehatan
								Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Pelaksanaan Imunisasi Rutin	Jumlah kab/kota yang melaksanakan Akselerasi kegiatan imunisasi dalam rangka evaluasi dan validasi data capaian imunisasi
								Manajemen Supervisi Sportif/SS dalam Pelaksanaan Imunisasi	Jumlah kab/kota yang dilakukan manajemen supervisi dan analisis dalam pelaksanaan imunisasi rutin yang terintegrasi dengan program lain
								Supervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi Data UCI dan BIAS	Persentase kabupaten kota minimal 80 % imunisasi dasar lengkap (IDL)
								Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
								Jejaring Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten Kota yang melaksanakan penanganan Gawat darurat terpadu yang terkoordinasi dengan baik melalui jaringan mandiri 119 di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Standart SPGDT
								Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
								Monitoring dan Evaluasi Layanan Unit Transfusi Darah Daerah	Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan monitoring & evaluasi Unit Transfusi Daerah sesuai standar
								Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Layanan Unit Transfusi Darah Daerah	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Layanan Unit Transfusi Darah
								Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Klinik di Kalteng	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Klinik di Kalteng
								Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan
								Penyusunan Analisis Determinan Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen determinan kesehatan yang di analisis pada kab/kota
								Kegiatan Inovasi Dinkes	
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	kab/kota yang mengimplementasikan sistem informasi kesehatan (kab/kota)
								Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
								Penyusunan Buku Profil Kesehatan (BUKU)	Jumlah dokumen buku profil kesehatan dan buku saku kesehatan dinkes prov.kalteng yang tersusun tepat waktu (buku)
								Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
								Pengembangan dan Pengelolaan PPID (bulan)	jumlah dukungan pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Prov.Kalteng (tim)
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (persen)
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
								Monev Sistem Rujukan Terintegrasi (kabupaten kota)	Jumlah Kabupaten kota yang melaksanakan Rujukan Terintegrasi berbasis online dalam pelaksanaan Kegiatan Fasyankes di Kalimantan Tengah
								Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan
								Monev dan Bimtek Manual Rujukan	Persentase RS Provinsi/Kabupaten/Kota baik RS Pemerintah maupun swasta yang dapat memenuhi prosedur dan ketentuan Rumah sakit secara hukum baik dalam hal perijinan maupun standart pelayanan, melaksanakan pelaporan RS Online, SIRS, ASPAK secara rutin.
								Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
								Hibah KPA (layanan)	
								Hibah PMI(layanan)	
								Pemantapan Mutu Eksternal (PME) pengujian laboratorium klinik	Jumlah parameter laboratorium klinik yang diikutsertakan dalam Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
								Akreditasi parameter pengujian laboratorium kesehatan masyarakat	Jumlah parameter laboratorium kesehatan masyarakat yang terakreditasi ISO 17025

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	Laporan Hasil Audit Internal
								Kaji Ulang Manajemen	Laporan Hasil Kaji Ulang Manajemen
								Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Laboratorium kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan K3
								Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan	Persentase sampah (limbah padat non B3), limbah cair dan limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan
								Pelayanan Pelanggan Laboratorium Kesehatan	Jumlah sampel pengujian yang dilayani
								Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan	
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
								Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Tersedianya dokumen untuk mendukung perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah (Dokumen)
								Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
								Bantuan Biaya Pendidikan untuk tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberi bantuan pendidikan di wilayah Prov. Kalteng
								Penilaian Nakes Teladan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat predikat tenaga kesehatan teladan se kalimantan tengah
								Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Validasi Data Nakes ke Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data tenaga kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan jenjang kompetensi sesuai standar (Persentase)
								Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat
								Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker Puskesmas di Kab/Kota Se-Kalimantan Tengah	Jumlah peserta Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker Puskesmas di Kab/Kota
								Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang mengikuti uji kompetensi sebagai persyaratan kenaikan jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dan yang akan beralih jenjang ke jabatan fungsional keahlian
								Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten / Kota	Jumlah pengelola program pembinaan jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi kriteria dalam hal pengorganisasian dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan di unit kerjanya di Kabupaten / Kota
								Pelatihan Tim Penilai Jafung Kesehatan	Jumlah Tim Penilai Jafung yang mendapat sertifikat pelatihan Tim Penilai Jafung Kesehatan pada pelatihan terakreditasi
								Peningkatan Kapasitas SDM P4TO	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM P4TO
								Pelatihan Antenatal Care dan Pemeriksaan USG Bagi Dokter Puskesmas	Jumlah Nakes (Doker) mengikuti Pelatihan Antenatal Care dan Pemeriksaan USG Bagi Dokter Puskesmas
								Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan	Jumlah Nakes (Bidan) mengikuti Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan
								Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan Lanjut Usia
								Peningkatan Kapasitas Nakes Teladan	Jumlah nakes yang ditingkatkan pengetahuan melalui Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan
								Monitoring Dan Evaluasi Pasca Pelatihan Program Gizi	Jumlah Tenaga Gizi yang melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pasca Pelatihan Program Gizi
								Pelatihan Konseling Menyusui Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan Konseling Menyusui bagi tenaga kesehatan puskesmas
								Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak	Kegiatan Konseling PMBA bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
								Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Aparatur (orang)	jumlah dukungan pengelolaan manajemen jabatan fungsional adminkes dinkes
								Sinergitas Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan yang selaras antar lintas sektor
								Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan	Jumlah dokumen institusi pendidikan yang dibina di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
								Akreditasi Institusi Bapelkes	Terakritisasinya Institusi Bapelkes, ada Tim Dokumen Mutu dan Tim Pengendali Mutu untuk Akreditasi Institusi Bapelkes
								Konsultasi ke Pusat (Bapelkes)	Jumlah tenaga Pejabat struktural, Pejabat Fungsional dan staf yang melaksanakan Konsultasi guna meningkatkan mutu kediklatan dan terlaksananya akreditasi institusi
								Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah dokumen/laporan hasil evaluasi pasca pelatihan yang sudah dilaksanakan sebagai data akreditasi Bapelkes
								Pengukuran Index kepuasan peserta latih	Jumlah laporan Index kepuasan peserta latih
								Penyusunan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Jumlah Laporan tahunan (profil bapelkes) yang tersusun
								Sinergitas kediklatan pelatihan ke kabupaten	Adanya MoU pada 14 Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, adanya data dan informasi jumlah pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun berjalan
								Fasilitasi Koordinasi Program Dokter Internship Ke Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi koordinasi program dokter internship ke kabupaten/kota yang di kunjungi
								Kaji Banding Pelaksanaan BLUD Institusi Bapelkes	Terlaksananya kaji banding pelaksanaan BLUD Institusi BAPELKES ke 2 lokus terpilih beserta kegiatan workshop BLUD
								PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan dan Kesesuaian obat serta pelaksanaan pelayanan kefarmasian Fasilitas kesehatan Kab/Kota (persen)
								Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	tersedianya Sumber Daya di Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan sampling produk alkes dan PKRT dengan benar (Persentase)
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan
								Pemeriksaan lapangan dalam rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	Jumlah sarana yang dilaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Provinsi
								Monev Sarana dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah sarana yang dimonitoring dan dievaluasi
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif (persen)
								Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (Persentase)
								Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Provinsi
								Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng	Jumlah Kab/Kota yang menerima pendampingan pemberdayaan masyarakat bersama mitra potensial DWP Dinkes Prov.Kalteng sebanyak 6 Kab/Kota

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Penggerakan Massa dalam Mendukung Implementasi Germas Aktivitas Fisik dan Deteksi Dini di Provinsi dan/atau Daerah	Jumlah kegiatan penggerakan massa dalam mendukung implementasi Germas khususnya aktivitas fisik dan deteksi dini di Provinsi dan/atau Daerah sebanyak 6 kali
								Penggerakan Masyarakat Aksi Bergizi di Daerah	Pelaksanaan Penggerakan Masyarakat Aksi Bergizi di Daerah sebanyak 4 kali dalam tahun 2023
								Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Terjadinya perubahan menuju PHBS di masyarakat (Persentase)
								Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
								Penyediaan Media dalam Penyeberluasan Informasi Kesehatan terkait Covid-19	Jumlah layanan media yang digunakan dalam mendukung edukasi terkait Covid-19 (layanan)
								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	UKBM yang menjalankan secara aktif kegiatan promotif (Persentase)
								Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
								Bimbingan Teknis Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Bimbingan Teknis terkait Germas sebanyak 14 Kab/Kota

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
5 DOK					
5 Dokumen	-	3	1	1	Melakukan penyusunan dan pencetakan dokumen perencanaan yaitu DPA, DPPA, Renja Perubahan, RAK dan RAK perubahan
14 Kab/Kota	-	5	6	3	Melakukan dukungan koordinasi serta melayani konsultasi, serta mengevaluasi pelaksanaan DAK Kesehatan
2 Dokumen	-	2	-	-	Menyusun serta mencetak dokumen RKA dari semua bidang dan UPT
4 kali	-	4	-	-	Melakukan koordinasi terkait RKA Perubahan serta melakukan penyusunan dan pencetakan RKA Perubahan
4 Kali	-	4			Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan UPT terkait pencapaian Kinerja bidang kesehatan
1 Dokumen	-	1	-	-	Membuat laporan LKPJ dan LPPD
1 Dokumen	-	1	-	-	Membuat laporan LAKIP
Orang	175	175	175	175	Terlaksananya Pembayaran Belanja Pegawai
Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Terlaksananya Belanja Pegawai
Dokumen					
Laporan	3	3	3	3	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan
Dokumen					
Dokumen	-	2	-	2	Terlaksananya Dokumen Penyusunan Laporan keuangan
Kali	-	1	-	-	Terlaksananya Pertemuan Pengelolaan Keuangan
Kali	-	-	1	-	Terlaksananya Pertemuan Asset dan Persediaan
Laporan	3	3	3	3	Terlaksananya Laporan Capaian dan Realisasi Keuangan SKPD
Dokumen	-	-	-	1	Terlaksananya Penyusunan RKBMD
Dokumen	-	-	-	1	Terlaksananya Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Unit	5	-	-	1	Terlaksananya Pengamanan Aset
Unit	5	-	-	1	Terlaksananya Asuransi Bangunan Gedung Kantor milik SKPD
Kab dan Dok	3	3	3	4 kab dan 1 dok	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD
13 Kab	3	3	3	4	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dok	-	-	-	1	Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah
Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Terlaksananya Rekonsiliasi Aset dan Persediaan
Dokumen	1	1	1	1	Terlaksananya rutin/berkala Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Orang					
Orang	-	-	200	-	
Orang					
3 PAKET					

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
Persen	-	100	-	-	
3 PAKET					
12 bulan	3	3	3	3	
3 PAKET					
12 bulan	3	3	3	3	
3 PAKET					
12 bulan	3	3	3	3	
1 DOKUMEN					
1	-	1	-	-	
1 PAKET					
1 PT					
	-	-	1	-	
Laporan					
12 bulan	3	3	3	3	
3 LAPORAN					
12 bulan	3	3	3	3	
12 bulan	3	3	3	3	
12 bulan	3	3	3	3	
Dokumen					
Dokumen				1	
Dokumen				1	
Dokumen				1	
Dokumen					
1 TIM					
3 PAKET					
1 paket				1	
5 UNIT					
1					
2 UNIT					
1					
3 UNIT					
1 tempat					
Persen					Kegiatan sekitar 3 bulan dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di UPT PPOT dalam upaya pemenuhan fasilitas gedung yang tersedia guna menunjang upaya pengembangan obat tradisional
12 laporan					
12 bulan	3	3	3	3	
Laporan					
12 bulan	3	3	3	3	
Laporan					
Bulan					

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
Bulan	3	3	3	3	Tersedianya Jasa jasa administrasi keuangan
Bulan	3	3	3	3	Tersedianya Jasa jasa kebersihan kantor/Gaji tenaga honorer
49 Orang/tahun					
200 orang					
12 UNIT					
1					
12 UNIT					
12 bulan	3	3	3	3	
2 UNIT					
12 bulan	3	3	3	3	
1 UNIT					
1					
1 UNIT					
Dokumen	-	-	-	1	
1 paket dokumen konsultansi FS, MP dan DED	-	-	-	1	
31 UNIT					
Dokumen					Pembentukan BPRS dan operasionalnya
Layanan					
12 kegiatan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Langsung Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Pada event-event tertentu
1 UNIT					
5 UNIT					
Paket	1	1	1	1	1. Menginventarisir, menyusun daftar, memproses dan melaksanakan kegiatan pengadaan bahan penunjang laboratorium di BLK UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Kontrak pengadaan bahan penunjang laboratorium di BLK Tahun Anggaran 2024. 3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan bahan penunjang laboratorium di BLK Tahun Anggaran 4. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pengadaan bahan penunjang laboratorium di BLK Tahun Anggaran 2024 pada SIPD.
Alat	-	6	-	4	1. Merancang, menyusun, memproses dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024. 3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024. 4. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 pada SIPD.
Paket	1	1	1	1	1. Menginventarisir, menyusun daftar, memproses dan melaksanakan kegiatan pengadaan bahan kimia di BLK UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Kontrak pengadaan bahan kimia di BLK Tahun Anggaran 2024. 3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan bahan kimia di BLK Tahun Anggaran 2024. 4. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pengadaan bahan kimia di BLK Tahun Anggaran 2024 pada SIPD.
1 UNIT					
Peralatan			4		Kegiatan dilaksanakan 3 bulan dalam upaya memperbaiki dan memelihara peralatan yang sudah ada sehingga dapat menunjang upaya pengembangan obat tradisional

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
30 UNIT					
1		6 RS dan 6 Kab/kota tersosialisasi		32 RS dan 14 Kab/kota tersosialisasi	Monitoring dan evaluasi ke kabupaten dalam pelaksanaan telemedicine di faskes
Dokumen					
Kab/Kota		2	8	4	Kegiatan dilaksanakan setiap ada permintaan obat dan bmhp ke Dinas Kesehatan Provinsi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota
Dokumen			1	1	Kegiatan dilaksanakan 2 kali ke pusat guna koordinasi meminta masukkan terkait kendala sistem yang ada
14 Kab/Kota	5	4	2	3	Kegiatan dilaksanakan di 14 Kab/Kota guna monitoring terkait kendala sistem pelaporan SIMONA yang ada di daerah
14 Kab/Kota	5	4	2	3	Kegiatan dilaksanakan di 14 Kab/Kota guna monitoring terkait kendala sistem yang ada di daerah
4 OT		2	2		Kegiatan dilaksanakan di 2 Kabupaten guna monitoring terkait kendala pasokan obat yang tersedia di daerah
5 PAKET					
Dokumen				1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan obat dan BMHP yang tidak ada tersedia di Kab/Kota
Dokumen				1	Kegiatan dilaksanakan 1 kali ke pusat guna koordinasi kendala obat yang sering kosong atau tidak berproduksi
Dokumen				1	Kegiatan rapat tim diadakan 2 kali guna membahas rencana kebutuhan obat
Dokumen				1	Kegiatan pemusnahan Obat dan BMHP diadakan 1 kali menggunakan jasa pihak ketiga
Dokumen				1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan obat program Gizi dan KIA di Kab/Kota
100 KELUARGA					
14 Kab/Kota	3	4	4	3	Melakukan pertemuan analisis PIS PK dan monev PIS PK
268.463 orang					
1 TIM					
1					Tersedianya biskuit PMT Balita untuk buffer stock bencana
1					Tersedianya biskuit PMT ibu hamil untuk buffer stock bencana
31.760 orang					
Persen	25%	25%	25%	25%	Tim gerak cepat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana
1 TIM					
Persen	25%	25%	25%	25%	Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB, wabah dan bencana
Dokumen					
OT		3			Terlaksananya kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Anak
Kab/Kota	5	8			Terlaksananya kegiatan Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita
Kab/Kota			14		Terlaksananya kegiatan Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS
Kab/Kota				14	Terlaksananya kegiatan Pembentukan Tim AMPSR Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Kab/Kota			14		Terlaksananya kegiatan Pertemuan Penguatan Aplikasi Simatneo, MPDN, E-Kohort, Komdat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Kab/Kota		14			Terlaksananya kegiatan Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita bagi Petugas Kesehatan Tingkat Puskesmas/FKTP
OT		3			Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi Program Kesga
Dokumen					
Kab/Kota			14		Terlaksananya kegiatan Pertemuan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Catin
-@ 130 paket (8 kriteria)					
Kab/Kota		14			Terlaksananya kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A) dan tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kab/Kota		5	6	3	Terlaksananya Monev Kespro

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
Kab/Kota		8			Terlaksananya Monev Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
2 dokumen					
Kab/Kota			14		Terlaksananya kegiatan Orientasi Penggunaan Panduan Praktis untuk caregiver informal pada Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
Kab/Kota			14		Terlaksananya kegiatan Sosialisasi / Advokasi/ Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia (HLUN/LS)
Dokumen					
OT	10 OT	6 OT	14 OT	15 OT	Terlaksananya kegiatan pelacakan dan konfirmasi masalah gizi
OT		12 OT	12 OT	9 OT	Terlaksananya kegiatan penyuluhan deteksi dini bagi kader posyandu
Kegiatan		1 Kegiatan			Terlaksananya kegiatan pertemuan Koordinas Program Gizi
OT		5 OT			Terlaksananya Konsultasi Program Gizi
OT		30 OT	28 OT		Terlaksananya Konsultasi Program Gizi
Kab/Kota			14		Terlaksananya kegiatan Pertemuan Konvergensi LP/LS
OT	30 OT		12 OT	21 OT	Terlaksananya kegiatan Monev dalam upaya percepatan perbaikan gizi dan intervensi penanggulangan
OT	15 OT	15 OT		27 OT	Terlaksananya Kegiatan Monev ke Kabupaten dan ke Pusat
Dokumen					
12 bulan					Terselenggaranya Senam Jumat pagi bersama ASN dan Tenaga Kontak
100 ASN					Terlaksananya pemeriksaan kebugaran ASN lain dan OPD lainnya
Orang					Terlaksananya kegiatan Olahraga di tingkat Puskesmas, klub olahraga lainnya dan kebugaran anak SD/MI
Kab/Kota			14		
Dokumen					
Kab/Kota	3 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	3 kab/kota	Melaksanakan pembinaan secara teknis pada 14 kabupaten/ kota untuk mendukung percepatan pencapaian target TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) yang bersertifikat Laik Hygiene Sanitasi
Kab/Kota	3 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	3 kab/kota	Melakukan pembinaan dan pengawasan pada 14 kab/ kota tentang bagaimana pengelolaan limbah fasyankes sesuai prosedur
Kab/Kota	3 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	3 kab/kota	Melakukan perjalanan dinas ke 14 kab/ kota untuk mengevaluasi capaian target indikator SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
Kab/Kota	3 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	3 kab/kota	Melakukan perjalanan dinas ke 14 kab/ kota dalam rangka intervensi kesehatan lingkungan
Orang	1 orang	2 orang	2 orang	1 orang	Melaksanakan konsultasi dan koordinasi program kesehatan lingkungan ke Kementerian Kesehatan terkait beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program kesling
10 Kab/Kota	1 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	1 Kab/Kota	Melakukan pembinaan secara teknis pada 10 Kabupaten dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
Dokumen					
OT	2	4			Terlaksananya Konsultasi Pusat PROMKES, KESMAS
Kab/Kota	1	13			Terlaksananya Penyediaan Media dalam penyebaran informasi kesehatan terkait Germas
Kali	1	2			Terlaksananya Penggerakan Masyarakat Cegah Stunting di Provinsi dan di Daerah
kali		1	1		Terlaksananya Penggerakan Masyarakat Bumi Sehat di Daerah dan Provinsi
Dokumen					
300 orang			100	200	Kegiatan dilaksanakan di 2 kabupaten untuk mendukung Germas di Kabupaten/Kota
Dokumen					
Kab/Kota	2	3	3	2	Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten
Kab/Kota	2	5	4	3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan Kecacingan (Kabupaten Kota)
Kab/Kota	1	2	2	1	Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif) (Kabupaten Kota)
1					Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA (Kabupaten Kota)
Kab/Kota	2	3	2	1	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan pra-eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak (kab/kota)

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
Kab/Kota	2	3	2	1	Revitalisasi Kapasitas Pengelola Malaria pada fase pemeliharaan eliminasi (Kabupaten Kota)
Kab/Kota	2	2	1	1	Assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di kabupaten/kota
Kab/Kota		3	3		Penilaian Eliminasi Malaria
Kab/Kota	2	3	3	2	Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis
Kab/Kota	2	1	2	2	Survey Kontak Penderitaan Kusta (Kabupaten Kota)
Kab/Kota	12 kako	12 kako	13 kako	13 kako	Pengawasan ke Kabupaten dan Kota yang Melaksanakan Kebijakan KTR 100% di 7 Tatanan
70%	15%	15%	15%	35%	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)
70%	15%	15%	15%	35%	Monev Deteksi dini Katarak di Kab/Kota (Kabupaten Kota)
70%	15%	15%	15%	35%	Pertemuan Rujukan kasus Deteksi Dini Iva dan SADANIS di Kab/Kota (Kabupaten Kota)
70%	15%	15%	15%	35%	Koordinasi Pelaksanaan Gangguan Diabetes Melitus (DM) dan Gangguan Metabolik (Kabupaten Kota)
70%	15%	15%	15%	35%	Sosialisasi Deteksi Dini IVA dan Sadanis bagi Tenaga Kesehatan(Kabupaten)
1 provinsi			1		Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Pencegahan Penyakit
					Pengadaan Kelambu Malaria
3 keg		1		2	Konsultasi Bidang P2P ke Kementerian Kesehatan RI/Dinkes Provinsi Prioritas
8kab	1	2	3	2	Pembinaan Utilisasi Sistem Informasi surveilans penyakit menular terpadu
Dokumen					
Kab/Kota	2	4	3	1	Monitoring dan evaluasi program kesehatan haji
Dokumen					
Kab/Kota					Koordinasi pelayanan kesehatan jiwa dan napza di kabupaten kota
Kab/Kota	4	3	4	3	Kegiatan dilaksanakan di 14 Kab/Kota guna monitoring terkait kendala pelaporan Signap yang ada di daerah
Dokumen					
300 mata		300			MOU dengan RSUD Pelaksana Kegiatan, penjangkaran tiap kabupaten untuk sasaran program
Dokumen					
Kab/Kota	3kab/kota	4Kab/kota	4 kab/kota%	3 kab/kota	Melaksanakan Monev JKN ke Kab/Kota
OT		4		2	Melaksanakan Sinkronisasi & Konsolidasi ke Pusat (Pusjak PDK) Kemenkes RI
1 dokumen	14 Kab/Kota				Melakukan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS Tingkat Provinsi
1 dokumen				1	Melakukan pembayaran kontribusi iuran premi PBI JKN/KIS
Dokumen					
Orang		2	4		Konsultasi ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi
14 kabupaten/kota	2	4	5	3	Verifikasi Signal dan pelacakan kasus PD3i Penyakit Berpotensi KLB
					Penyelidikan Epidemiologi Dugaan Kasus Malaria Sesuai Pedoman
Kab/Kota	2	3	3	1	Penyelidikan Epidemiologi Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kab/Kota	2	2	3	1	Penyelidikan Epidemiologi Lonjakan Kasus Kusta dan Rumor Kasus Frambusia
5 kabupaten	1	2	2	0	Penyelidikan Epidemiologi Kasus Zoonosis
39 OT	0	20	10	9	Melakukan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program di 13 Kabupaten
250 Orang	0	250	0	0	Menyelenggarakan Rapat Kerja Bidang Kesehatan dengan mengundang Pejabat Dinas Kesehatan, rumah sakit dan organisasi profesi se Kalimantan Tengah
14 Kab/Kota		6	4	3	Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM di kabupaten
14 Kab/Kota		6	4	4	Melakukan pemantauan pelaksanaan DAK bidang kesehatan di 14 kab/kota
DOKUMEN					
Dokumen				1	
RS	4	6	6	4	Visitasi ke RS dan FGD pelaksanaan INM dan, progress PPS pasca reakreditasi

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
TPCB Kab/Kota	3	4	4	3	Visitasi ke Dinkes Kabupaten/Kota/FGD di Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan INM, penilaian kinerja puskesmas, progress PPS pasca reakreditasi
Kab/Kota	3	4	4	3	Melaksanakan Bimbingan dan evaluasi Pelayanan kesehatan Primer
Dokumen					
14 kabupaten/kota	2	4	5	3	Evaluasi Manajemen Pelayanan Imunisasi di Fasyankes
1 provinsi	1				Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Pelaksanaan Imunisasi Rutin
14 kabupaten/kota	2	4	5	3	Manajemen Supervisi Sportif/SS dalam Pelaksanaan Imunisasi
14 kabupaten/kota	2	4	5	3	Supervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi Data UCI dan BIAS
14 Unit					
Kab/Kota				14	Monitoring pelaksanaan Penanganan Gaeat Darurat Terpadu yang terkoordinasi dengan baik melalui jaringan mandiri 119 di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Standart SPGDT
Dokumen					
Kab/Kota	3	4	4	3	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi layanan Unit transfusi darah daerah
Kali	1				Melakukan pertemuan Koordinasi dan evaluasi Layanan UTD daerah
Kali	1				Melakukan pertemuan Koordinasi dan evaluasi PeLayanan Klinik di kalteng
Dokumen					
1 Dokumen		1			Melakukan analisis dokumen determinan di 13 kabupaten
1 Dokumen			1		Dukungan terhadap inovasi dari Dinas Kesehatan Prov.Kalteng
Dokumen					
50 BUKU				50	
Dokumen					
1 TIM					
31 UNIT					
14 Kab/Kota		6 RS dan 6 Kab/kota tersosialisasi		32 RS dan 14 Kab/kota tersosialisasi	Melaksanakan Visitasi dan pengelolaan program sirsute ke kabupaten kota
31 UNIT					
14 Kab/Kota		6 RS dan 6 Kab/kota tersosialisasi		32 RS dan 14 Kab/kota tersosialisasi	Melaksanakan Visitasi dan pengelolaan program ke Rumah sakit yang ada di kalimantan tengah
3 unit					
25 Parameter	25	-	-	-	Merancang, menyusun, memproses dan melaksanakan kegiatan pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium klinis UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium klinis Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium klinis Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium klinis Tahun Anggaran 2023 pada SIPD
Parameter	-	-	110	-	Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada SIPD Merancang, menyusun, memproses dan menyelenggarakan kegiatan Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
Dokumen	-	1	-	-	Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) Audit Internal Lab Klinis dan Kesmas Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Audit Internal Lab Klinis dan Kesmas Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Audit Internal Lab Klinis dan Kesmas Tahun Anggaran 2023 pada SIPD Merancang, menyusun, memproses dan menyelenggarakan kegiatan Audit Internal Lab Klinis dan Kesmas UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Dokumen	-	1	-	-	Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) Kaji Ulang Manajemen Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kaji Ulang Manajemen Tahun Anggaran 2023 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kaji Ulang Manajemen Tahun Anggaran 2023 pada SIPD Merancang, menyusun, memproses dan menyelenggarakan kegiatan Kaji Ulang Manajemen UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Dokumen				1	Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 pada SIPD Merancang, menyusun, memproses dan menyelenggarakan In House Training Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran bagi pegawai UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Merancang, menyusun, memproses dan menyelenggarakan kegiatan Workshop Biosafety Laboratorium bagi pegawai UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah
%	100	100	100	100	Menyusun daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Merancang, menyusun dan memproses Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan pihak ketiga Memproses pengangkutan dan pengelolaan lanjutan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) oleh pihak ketiga Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 pada SIPD Merancang, menyusun, memproses dan menyelenggarakan kegiatan Workshop Pengenalan Tata Cara Penyusunan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 bagi pegawai UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah
Dokumen	1	1	1	1	menginventarisir, menyusun daftar, memproses dan melaksanakan kegiatan Pelayanan Pelanggan Laboratorium Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Kontrak Pelayanan Pelanggan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelayanan Pelanggan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Pelanggan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 pada SIPD
Alat	-	216	-	-	Merancang, menyusun, memproses dan melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Tahun Anggaran 2024 pada SIPD
Orang					
Orang		34	34	34	Merencanakan, membuat estimasi para dokter, berkoordinasi dan memonev pihak terkait
50 orang		383503400	34952308		Merencanakan, penentuan juri dan panitia, menilai tatap muka, memonev peserta nakes teladan
Orang					

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
Dokumen		1			Merencanakan, monev ke kabupaten memvalidasi data
Orang					
OT				40	Kegiatan dilaksanakan 1 kali dengan melibatkan seluruh apoteker yang ada di puskesmas Kab/Kota
Orang	200	-	-	-	
Orang	42	-	-	-	
Orang				30	Melakukan Pelatihan Tim Penilai Jafung
Orang			5		Melakukan peningkatan kapasitas SDM P4TO
OT				30	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Antenatal Care dan Pemeriksaan USG Bagi Dokter Puskesmas
OT				30	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi bidan
OT			10	20	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Bidan di fasilitas Pelayanan kesehatan
Dokumen				1	Merencanakan, berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan kegiatan
OT				5	Terlaksananya kegiatan Monev Pasca Pelatihan Program Gizi
Kegiatan				1	Terlaksananya pelatihan konseling menyusui bagi nakes
Kegiatan				2	Terlaksananya Pelatihan PMBA bagi nakes
Dokumen					
Layanan				1	
14 kab/kota, kementrian kesehatan, Badan PPSPDMKes, BKD Provinsi, BKN Regional Kanreg VIII					
Dokumen				1	Merencanakan, berkunjung ke institusi untuk pembinaan dan validasi data
Dokumen	0%	37.52%	0%	62.48%	Melaksanakan Penilaian Akreditasi Institusi Bapelkes
Orang	0	3	12	7	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang melaksanakan konsultasi ke Pusat guna meningkatkan Mutu Kediklatan dan terlaksananya Akreditasi Institusi
Dok/Lap			1		Melaksanakan Evaluasi Pasca Pelatihan ke 7 Kab terpilih (Kab terdekat perjalanan <8 jam perjalanan) selanjutnya menyusun dokumen/ laporan hasil Evaluasi Pasca Pelatihan yang sudah dilaksanakan sebagai data Akreditasi
Dok/Lap			1		Melaksanakan Rapat dalam rangka Menyusun Laporan Pengukuran Index Kepuasan Peserta Latih
Dok/Lap				1	Menyusun Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)
14 Kab/ Kota	14				Melaksanakan pertemuan secara daring dengan 14 Kab/ Kota terkait inventarisir data informasi jumlah pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2024, serta konsultasi ke pusat dalam rangka konsultasi dan pelaporan pelaksanaan Diklat pada UPT.Bapelkes Prov.Kalteng selama tahun berjalan
OT		5	4	4	Merencanakan, memonev ke kabupaten
1 Dokumen	0%	44.22%	11.28%	44.20%	Melaksanakan Workshop BLUD Institusi BAPELKES dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Bisnis Angggaran (RBA) dan pelaporan keuangan melalui praktik bisnis yang baik
Sarana					
1 dokumen				1	Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di beberapa PBF
1 dokumen				1	Kegiatan monitoring dilaksanakan di beberapa PBF
Dokumen					
Kab/Kota	3	3			

SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/AKTIVITAS
	I	II	III	IV	
11	12	13	14	15	16
Kali	1	2	1	2	
kali	1	3			Terlaksananya penggerakan masyarakat Aksi Bergizi di Daerah
Dokumen					
Dokumen					
Kab/Kota	5	5	4		

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
32,871,593,325						
438,436,166						
270,791,166	-	119,526,171	92,633,039	58,631,956		
172,564,706	-	89,063,211	33,602,039	49,899,456	PP, SEKRETARIAT	
98,226,460	-	30,462,960	59,031,000	8,732,500	PP, SEKRETARIAT	
10,500,000	-	10,500,000	-	-		
10,500,000	-	10,500,000	-	-	PP, SEKRETARIAT	
66,125,000	-	66,125,000	-	-		
66,125,000	-	66,125,000	-	-	PP, SEKRETARIAT	
66,125,000	-	66,125,000	-	-		
66,125,000	-	66,125,000	-	-	PP, SEKRETARIAT	
24,895,000	-	24,895,000	-	-		
9,773,000	-	9,773,000	-	-	PP, SEKRETARIAT	
15,122,000	-	15,122,000	-	-	PP, SEKRETARIAT	
22,513,543,117						
22,472,951,617	5,618,237,904	5,618,237,904	5,618,237,904	5,618,237,904		
22,472,951,617	5,618,237,904	5,618,237,904	5,618,237,904	5,618,237,904	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
5,000,000	-	-	-	5,000,000		
5,000,000	-	-	-	5,000,000	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
29,333,000	-	15,399,000	4,975,000	8,959,000		
17,918,000	-	8,959,000	-	8,959,000	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
6,440,000	-	6,440,000	-	-	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
4,975,000	-	-	4,975,000	-	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
6,258,500	1,564,625	1,564,625	1,564,625	1,564,625		
6,258,500	1,564,625	1,564,625	1,564,625	1,564,625	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
150,215,125						
8,208,500	-	-	8,208,500	-		
8,208,500	-	-	8,208,500	-	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
12,500,000	12,500,000	-	-	-		
12,500,000	12,500,000	-	-	-	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
126,356,625	31,589,156	31,589,156	31,589,156	31,589,156		
126,356,625	31,589,156	31,589,156	31,589,156	31,589,156	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
	-	-	-	-	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
3,150,000	787,500	787,500	787,500	787,500		
3,150,000	787,500	787,500	787,500	787,500	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
360,000,000						
160,000,000	-	-	160,000,000	-		
160,000,000	-	-	160,000,000	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
200,000,000						
200,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	40,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
2,103,243,100						
75,000,000	-	75,000,000	-	-		

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
75,000,000	-	75,000,000	-	-	BAPELKES & UMPEG, SEKRETARIAT	
125,000,000	25,000,000	37,500,000	37,500,000	25,000,000		
125,000,000	25,000,000	37,500,000	37,500,000	25,000,000	BAPELKES & UMPEG, SEKRETARIAT	
99,999,000	19,999,800	29,999,700	29,999,700	19,999,800		
99,999,000	19,999,800	29,999,700	29,999,700	19,999,800	BAPELKES & UMPEG, SEKRETARIAT	
100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000		
100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	BAPELKES & UMPEG, SEKRETARIAT	
75,000,000	-	75,000,000	-	-		
75,000,000	-	75,000,000	-	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
400,000,000	20,000,000	30,000,000	330,000,000	20,000,000		
100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
300,000,000	-	-	300,000,000	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
75,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000			
75,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000	15,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
1,054,244,100	210,848,820	316,273,230	316,273,230	210,848,820		
268,176,000	53,635,200	80,452,800	80,452,800	53,635,200	UMPEG, SEKRETARIAT	
342,825,000	68,565,000	102,847,500	102,847,500	68,565,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
50,851,000	10,170,200	15,255,300	15,255,300	10,170,200	UMPEG, SEKRETARIAT	
392,392,100	78,478,420	117,717,630	117,717,630	78,478,420	SEKRETARIAT	
40,000,000	-	-	-	40,000,000		
15,000,000	-	-	-	15,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
11,464,000	-	-	-	11,464,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
13,536,000	-	-	-	13,536,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
59,000,000	-	-	-	59,000,000		
59,000,000	-	-	-	59,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
3,119,017,631						
400,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	80,000,000		
400,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	80,000,000	BAPELKES & UMPEG, SEKRETARIAT	
1,424,017,631	284,803,526	427,205,289	427,205,289	284,803,526		
1,424,017,631	284,803,526	427,205,289	427,205,289	284,803,526	UMPEG, SEKRETARIAT	
69,000,000	-	69,000,000	-	-		
69,000,000	-	69,000,000	-	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
1,226,000,000	198,371,040	297,556,560	497,556,560	232,515,839		
34,144,799	-	-	-	34,144,799	UMPEG, SEKRETARIAT	
991,855,201	198,371,040	297,556,560	297,556,560	198,371,040	UMPEG, SEKRETARIAT	
					BAPELKES & UMPEG, SEKRETARIAT	
200,000,000	-	-	200,000,000	-	PP, SEKRETARIAT	
	-	-	-	-	PPOT	
3,585,237,286						
15,000,000	-	15,000,000	-	-		
15,000,000	-	15,000,000	-	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
1,103,822,966	220,764,593	331,146,890	331,146,890	220,764,593		
1,103,822,966	220,764,593	331,146,890	331,146,890	220,764,593	UMPEG, SEKRETARIAT	
75,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000	15,000,000		
75,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000	15,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
2,391,414,320	589,803,580	605,903,580	605,903,580	589,803,580		

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
400,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
1,594,414,320	398,603,580	398,603,580	398,603,580	398,603,580	KEUANGAN & ASET, SEKRETARIAT	
236,000,000	59,000,000	59,000,000	59,000,000	59,000,000	LABKESDA	
111,000,000	22,200,000	33,300,000	33,300,000	22,200,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
50,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
601,900,900						
100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000		
100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	BAPELKES DAN UMPEG, SEKRETARIAT	
75,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000	15,000,000		
75,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000	15,000,000	BAPELKES DAN UMPEG, SEKRETARIAT	
396,900,900	79,380,180	119,070,270	119,070,270	79,380,180		
74,999,000	14,999,800	22,499,700	22,499,700	14,999,800	BAPELKES DAN UMPEG, SEKRETARIAT	
321,901,900	64,380,380	96,570,570	96,570,570	64,380,380	UMPEG, SEKRETARIAT	
30,000,000	-	-	-	30,000,000		
30,000,000	-	-	-	30,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
47,872,866,997						
19,588,205,392						
10,502,411,780	1,850,000,000	2,767,500,000	2,767,500,000	3,117,411,780		
153,788,780	-	-	-	153,788,780	RUJUKAN, YANKES	
1,098,623,000	-	-	-	1,098,623,000	RUJUKAN, YANKES	
9,250,000,000	1,850,000,000	2,767,500,000	2,767,500,000	1,865,000,000	RUJUKAN, YANKES	
150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000		
150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	RUJUKAN, YANKES	
200,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
200,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	RUJUKAN, YANKES	
450,000,000	450,000,000	-	-	-		
450,000,000	450,000,000	-	-	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
1,077,064,760	215,412,952	323,119,428	323,119,428	215,412,952		
40,000,000	8,000,000	12,000,000	12,000,000	8,000,000	LABKESDA	
100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	LABKESDA	
937,064,760	187,412,952	281,119,428	281,119,428	187,412,952	LABKESDA	
47,349,952						
47,349,952	-	-	47,349,952	-	PPOT	

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
200,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000		
200,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	RUJUKAN, YANKES	
2,053,715,302	104,880,000	146,680,000	464,148,950	1,338,006,352		
1,650,204,402	-	65,510,000	353,225,000	1,231,469,402	FARMASI ALKES PKRT, SDK	
110,250,000	-	-	63,708,750	46,541,250	PPOT	
140,221,675	52,440,000	42,500,000	17,860,000	27,421,675	PRODIS YANFAR, YANKES	
143,039,225	52,440,000	30,000,000	28,025,200	32,574,025	PRODIS YANFAR, YANKES	
10,000,000	-	8,670,000	1,330,000	-	FARMASI ALKES PKRT, SDK	
4,757,663,598	-	-	3,991,393,590	766,270,008		
530,000,000	-	-	187,350,000	342,650,000	FARMASI ALKES PKRT, SDK	
10,000,000	-	-	-	10,000,000	FARMASI ALKES PKRT, SDK	
10,000,000	-	-	6,755,000	3,245,000	FARMASI ALKES PKRT, SDK	
100,000,000	-	-	-	100,000,000	FARMASI ALKES PKRT, SDK	
4,107,663,598	-	-	3,797,288,590	310,375,008	FARMASI ALKES PKRT, SDK	
150,000,000	30,000,000	45,000,000	45,000,000	30,000,000		
150,000,000	30,000,000	45,000,000	45,000,000	30,000,000	YANKES PRIMER, KESTRAD & KEGAWATDARURATAN, YANKES	
26,693,533,405						
1,600,000,000	260,000,000	690,000,000	390,000,000	260,000,000		
1,300,000,000	260,000,000	390,000,000	390,000,000	260,000,000	SEKRETARIAT	
213,774,000	-	213,774,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
86,226,000	-	86,226,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
409,124,800	81,824,960	122,737,440	122,737,440	81,824,960		
89,124,800	17,824,960	26,737,440	26,737,440	17,824,960	SURVIM, P2P	
250,942,140	50,188,428	75,282,642	75,282,642	50,188,428	SEKRETARIAT	
69,057,860	13,811,572	20,717,358	20,717,358	13,811,572	SURVIM, P2P	
648,000,000	40,000,000	184,000,000	200,000,000	224,000,000		
24,000,000	-	24,000,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
100,000,000	40,000,000	60,000,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
100,000,000	-	-	100,000,000	-	KESGA GIZI, KESMAS	
200,000,000	-	-	-	200,000,000	KESGA GIZI, KESMAS	
100,000,000	-	-	100,000,000	-	KESGA GIZI, KESMAS	
100,000,000	-	100,000,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
24,000,000	-	-	-	24,000,000	KESGA GIZI, KESMAS	
685,065,240	-	494,975,080	167,567,620	22,522,540		
100,000,000	-	-	100,000,000	-	KESGA GIZI, KESMAS	
134,522,000	-	134,522,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
74,658,000	-	74,658,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
90,750,000	-	90,750,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
100,000,000	-	100,000,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
135,135,240	-	45,045,080	67,567,620	22,522,540	KESGA GIZI, KESMAS	

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
50,000,000	-	50,000,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
125,000,000						
100,000,000	-	-	100,000,000	-	KESGA GIZI, KESMAS	
25,000,000	-	-	25,000,000	-	KESGA GIZI, KESMAS	
1,034,984,400	119,620,000	382,708,000	314,138,000	218,518,400		
129,720,000	49,300,000	60,330,000	-	20,090,000	KESGA GIZI, KESMAS	
123,695,000	-	45,590,000	40,970,000	37,135,000	KESGA GIZI, KESMAS	
143,648,000	-	143,648,000	-	-	KESGA GIZI, KESMAS	
39,000,000	-	-	26,000,000	13,000,000	KESGA GIZI, KESMAS	
129,720,000	-	60,000,000	69,720,000	-	KESGA GIZI, KESMAS	
142,003,000	-	-	142,003,000	-	KESGA GIZI, KESMAS	
182,198,400	36,570,000	-	35,445,000	110,183,400	KESGA GIZI, KESMAS	
145,000,000	33,750,000	73,140,000	-	38,110,000	KESGA GIZI, KESMAS	
191,927,000	24,285,400	36,428,100	106,928,100	24,285,400		
10,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
4,277,000	855,400	1,283,100	1,283,100	855,400	KESLING KESJAOR, KESMAS	
107,150,000	21,430,000	32,145,000	32,145,000	21,430,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
70,500,000	-	-	70,500,000	-	KESLING KESJAOR, KESMAS	
295,000,000	59,000,000	88,500,000	88,500,000	59,000,000		
63,270,000	12,654,000	18,981,000	18,981,000	12,654,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
68,730,000	13,746,000	20,619,000	20,619,000	13,746,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
50,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
40,000,000	8,000,000	12,000,000	12,000,000	8,000,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
40,140,000	8,028,000	12,042,000	12,042,000	8,028,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
32,860,000	6,572,000	9,858,000	9,858,000	6,572,000	KESLING KESJAOR, KESMAS	
276,803,300	48,348,000	155,422,800	52,077,500	20,955,000		
40,170,000	16,068,000	24,102,000	-	-	PROMKES, KESMAS	
135,078,300	15,620,000	72,213,300	26,290,000	20,955,000	PROMKES, KESMAS	
49,980,000	16,660,000	33,320,000	-	-	PROMKES, KESMAS	
51,575,000	-	25,787,500	25,787,500	-	PROMKES, KESMAS	
287,300,000	-	-	74,850,000	212,450,000		
287,300,000	-	-	74,850,000	212,450,000	PPOT	
1,836,207,880	261,427,655	588,650,635	417,965,554	568,164,036		
14,355,640	-	-	-	14,355,640	P2PM, P2P	
93,760,000	14,064,000	23,440,000	32,816,000	23,440,000	P2PM, P2P	
62,916,200	10,486,033	31,458,100	20,972,067	-	P2PM, P2P	
62,836,500	8,976,643	17,953,286	17,953,286	17,953,285	P2PM, P2P	
79,355,000	15,871,000	23,806,500	27,774,250	11,903,250	P2PM, P2P	

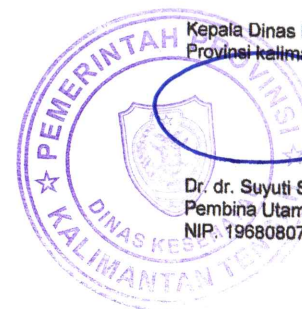
PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
84,056,470	12,608,470	25,216,941	29,419,765	16,811,294	P2PM, P2P	
67,843,389	10,176,509	16,960,847	23,745,186	16,960,847	P2PM, P2P	
57,600,000	11,520,000	17,280,000	17,280,000	11,520,000	P2PM, P2P	
52,200,000	7,830,000	13,050,000	18,270,000	13,050,000	P2PM, P2P	
50,000,000	7,500,000	12,500,000	17,500,000	12,500,000	P2PM, P2P	
90,500,000	14,620,000	35,580,000	13,140,000	27,160,000	PTM dan KESWA, P2P	
60,000,000	19,380,000	10,200,000	14,940,000	15,480,000	PTM dan KESWA, P2P	
97,884,800	25,000,000	25,000,000	25,000,000	22,884,800	PTM dan KESWA, P2P	
90,000,000	8,520,000	-	38,440,000	43,040,000	PTM dan KESWA, P2P	
319,600,000	63,920,000	95,880,000	95,880,000	63,920,000	PTM dan KESWA, P2P	
107,300,000	22,900,000	46,900,000	6,040,000	31,460,000	PTM dan KESWA, P2P	
186,137,400	-	-	-	186,137,400	SURVIM, P2P	
152,999,961	-	152,999,961	-	-	P2PM, P2P, P2P	
53,162,520	-	27,000,000	-	26,162,520	P2P	
53,700,000	8,055,000	13,425,000	18,795,000	13,425,000	P2P	
60,000,000	12,000,000	24,000,000	18,000,000	6,000,000		
60,000,000	12,000,000	24,000,000	18,000,000	6,000,000	PTM dan KESWA, P2P	
60,000,000	-	-	-	60,000,000		
60,000,000	-	-	-	60,000,000	PTM dan KESWA, P2P	
81,750,000	24,180,000	13,320,000	22,940,000	21,310,000		
81,750,000	24,180,000	13,320,000	22,940,000	21,310,000	PRODIS YANFAR, YANKES	
400,000,000	-	400,000,000	-	-		
400,000,000	-	400,000,000	-	-	RUJUKAN, YANKES	
15,036,819,278	3,871,704,819	3,741,704,820	3,711,704,820	3,711,704,819		
200,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	40,000,000	JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES, YANKES	
50,000,000	-	30,000,000	-	20,000,000	JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES, YANKES	
180,000,000	180,000,000	-	-	-	JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES, YANKES	
14,606,819,278	3,651,704,819	3,651,704,820	3,651,704,820	3,651,704,819	JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES, YANKES	
300,017,860	48,811,572	85,717,358	104,650,251	60,838,679		
30,960,000	-	-	15,480,000	15,480,000	SURVIM, P2P	
69,057,860	13,811,572	20,717,358	24,170,251	10,358,679	SURVIM, P2P	
50,000,000	10,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000	P2PM, P2P	
50,000,000	10,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000	P2PM, P2P	
50,000,000	7,500,000	12,500,000	17,500,000	12,500,000	P2PM, P2P	
50,000,000	7,500,000	12,500,000	17,500,000	12,500,000	P2PM, P2P	
953,316,890	-	683,363,640	180,071,500	89,881,750		
119,881,750	-	50,000,000	50,000,000	19,881,750	PP, SEKRETARIAT	
488,363,640	-	488,363,640	-	-	PP, SEKRETARIAT	
200,000,000	-	100,000,000	80,000,000	20,000,000	PP, SEKRETARIAT	
145,071,500	-	45,000,000	50,071,500	50,000,000	PP, SEKRETARIAT	
225,149,548	45,029,910	67,544,864	67,544,864	45,029,910	SEKRETARIAT	
1,026,366,722	209,613,344	369,470,017	309,970,017	137,313,344		
136,566,722	27,313,344	40,970,017	40,970,017	27,313,344		
200,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	20,000,000	JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES, YANKES	

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
389,800,000	62,300,000	178,500,000	119,000,000	30,000,000	JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES, YANKES	
300,000,000	60,000,000	90,000,000	90,000,000	60,000,000	YANKES PRIMER, KESTRAD & KEGAWATDARURATAN, YANKES	
325,773,200	144,342,080	68,036,670	90,715,560	22,678,890		
70,619,200	14,123,840	21,185,760	28,247,680	7,061,920	SURVIM, P2P	
98,984,300	98,984,300	-	-	-	SURVIM, P2P	
65,854,970	13,170,994	19,756,491	26,341,988	6,585,497	SURVIM, P2P	
90,314,730	18,062,946	27,094,419	36,125,892	9,031,473	SURVIM, P2P	
200,000,000	-	-	-	200,000,000		
200,000,000	-	-	-	200,000,000	RUJUKAN, YANKES	
493,680,000	206,736,000	220,104,000	40,104,000	26,736,000		
133,680,000	26,736,000	40,104,000	40,104,000	26,736,000	YANKES PRIMER, KESTRAD & KEGAWATDARURATAN, YANKES	
180,000,000	-	180,000,000	-	-	YANKES PRIMER, KESTRAD & KEGAWATDARURATAN, YANKES	
180,000,000	180,000,000	-	-	-	YANKES PRIMER, KESTRAD & KEGAWATDARURATAN, YANKES	
366,396,835	-	216,396,835	150,000,000	-		
100,649,690	-	50,649,690	50,000,000	-	PP, SEKRETARIAT	
265,747,145	-	165,747,145	100,000,000	-	PP, SEKRETARIAT	
140,000,000						
140,000,000	-	-	-	140,000,000		
140,000,000	-	-	-	140,000,000	UMPEG, SEKRETARIAT	
					UMPEG, SEKRETARIAT	
1,451,128,200						
100,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000		
100,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	RUJUKAN, YANKES	
90,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000		
90,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000	RUJUKAN, YANKES	
1,261,128,200	8,052,700	113,829,050	103,193,750	1,036,052,700		
500,000,000	-	-	-	500,000,000	P2P	
300,000,000	-	-	-	300,000,000	YANKES	
48,000,000	-	48,000,000	-	-	LABKESDA	
71,114,700	-	-	71,114,700	-	LABKESDA	

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
10,000,000	-	-	10,000,000	-	LABKESDA	
10,000,000	-	-	10,000,000	-	LABKESDA	
3,750,000	-	3,750,000	-	-	LABKESDA	
40,263,500	8,052,700	12,079,050	12,079,050	8,052,700	LABKESDA	
228,000,000	-	-	-	228,000,000	LABKESDA	
50,000,000	-	50,000,000	-	-	LABKESDA	
9,977,909,050						
5,538,163,000						
5,455,000,000	-	471,853,400	922,016,600	4,061,130,000		
5,000,000,000	-	88,350,000	850,520,000	4,061,130,000	SDMK, SDK	
455,000,000	-	383,503,400	71,496,600	-	SDMK, SDK	
83,163,000						

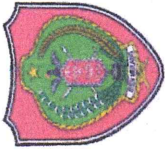
PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
83,163,000	-	41,581,500	41,581,500	-	SDMK, SDK	
4,439,746,050						
3,301,599,800	273,210,000	-	397,437,142	2,630,952,658		
257,892,800	-	-	-	257,892,800	PRODIS YANFAR, YANKES	
200,000,000	200,000,000	-	-	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
73,210,000	73,210,000	-	-	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
124,000,000	-	-	-	124,000,000	BAPELKES	
150,000,000	-	-	150,000,000	-	PPOT	
494,874,151	-	-	-	494,874,151	KESGA GIZI, KESMAS	
494,874,284	-	-	-	494,874,284	KESGA GIZI, KESMAS	
494,874,284	-	-	247,437,142	247,437,142	KESGA GIZI, KESMAS	
517,000,000	-	-	-	517,000,000	SDMK, SDK	
39,075,000	-	-	-	39,075,000	KESGA GIZI, KESMAS	
223,046,611	-	-	-	223,046,611	KESGA GIZI, KESMAS	
232,752,670	-	-	-	232,752,670	KESGA GIZI, KESMAS	
1,138,146,250	102,869,500	293,434,593	281,905,978	459,936,179		
100,000,000	-	-	-	100,000,000	ADMINKES/UMPEG, SEKRETARIAT	
19,019,500	19,019,500	-	-	-	UMPEG, SEKRETARIAT	
18,750,000	-	-	-	18,750,000	SDMK, SDK	
89,700,000	-	30,872,520	-	58,827,480	BAPELKES	
110,000,000	-	16,314,140	62,312,845	31,373,015	BAPELKES	
60,225,000	-	-	60,225,000	-	BAPELKES	
5,500,000	-	-	5,500,000	-	BAPELKES	
4,101,750	-	-	-	4,101,750	BAPELKES	
83,850,000	83,850,000	-	-	-	BAPELKES	
367,000,000	-	122,445,333	122,277,333	122,277,334	SDMK, SDK	
280,000,000	-	123,802,600	31,590,800	124,606,600	BAPELKES	
127,050,000						
127,050,000	12,740,000	38,302,100	15,540,000	60,467,900		
19,320,000	-	8,400,000	3,780,000	7,140,000	PRODIS YANFAR, YANKES	
107,730,000	12,740,000	29,902,100	11,760,000	53,327,900	PRODIS YANFAR, YANKES	
870,098,600						
612,900,000	130,316,000	222,676,000	106,636,000	153,272,000		
150,000,000	30,000,000	45,000,000	45,000,000	30,000,000	PROMKES, KESMAS	

PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
	I	II	III	IV		
17	18	19	20	21	22	23
308.180.000	61.636.000	61.636.000	61.636.000	123.272.000	PROMKES, KESMAS	
154.720.000	38.680.000	116.040.000	-	-	PROMKES, KESMAS	
					PROMKES, KESMAS	
182.198.600	36.439.720	54.659.580	54.659.580	36.439.720		
182.198.600	36.439.720	54.659.580	54.659.580	36.439.720	PROMKES, KESMAS	
75.000.000						
75.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		
75.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	PROMKES, KESMAS	



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI	
Sub. Bagian Penyusunan Program	
Dasar Hukum	
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 7. Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	
Keterkaitan SOP	
1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	
Peringatan	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.	

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	:	31 Juli 2023
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS KESEHATAN,  Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006
Nama SOP	:	Pengukuran Kinerja
Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui Tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan Kinerja	
Peralatan/ Perlengkapan	1. Berkas Persyaratan 2. Komputer, ATK	
Pencatatan & Pendataan	Direkam/disimpan secara elektronik dan manual	

SOP Pengukuran Kinerja

No.	Kepala	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang	Tim LKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	
1	Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blanko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim LKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat
3	Tim LKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan
4	Tim LKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan RB RENSTRA TAPKIN Program Kerja Kegiatan	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja
5	Tim LKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja
6	Tim LKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	120 menit	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja
7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.						Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi
9	Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Kepala Dinas
10							Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja		

Palangka Raya, Juli 2023

Mengetahui :

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. Soydyti Syamsul, MPPM

Pembina Utama Madya

NIP. 19660807 200003 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI	
Sub. Bagian Penyusunan Program	
Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 7. Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Keterkaitan SOP	1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Peringatan	Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	:	31 Juli 2023
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	 KEPALA DINAS KESEHATAN, DINAS KESEHATAN Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006
Nama SOP	:	Pengumpulan Data Kinerja
Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui Tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan Kinerja	
Peralatan/ Perlengkapan	1. Berkas Persyaratan 2. Komputer, ATK	
Pencatatan & Pendataan	Direkam/disimpan secara elektronik dan manual	

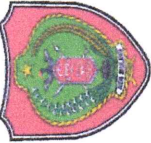
SOP Pengumpulan Data Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	JF Adminkes	Sub Koordinator Bidang	Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada subbag/bidang/UPT						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi	1 hari	Disposisi	
2	Merekap laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	120 menit	Lembar disposisi	
3	Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progres Bulanan	120 menit	Draft Laporan Kinerja	
4	Menyusun laporan kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	120 menit	Draft Laporan Kinerja	
5	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 menit	Draft Laporan Kinerja	
6	Merekap laporan kinerja triwulan untuk menyusun laporan tahunan						Catatan Pembagian Tugas	2 hari	Disposisi	
7	Menyusun laporan kinerja tahunan						Data Laporan Kinerja Triwulan	120 hari	Lembar disposisi	
8	Mensosialisasikan laporan kinerja tahunan kepada pejabat terkait						Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	60 menit	Draft Laporan Kinerja	
9	Menyusun laporan kinerja tahunan secara final						Laporan Kinerja Triwulan	1 hari	Draft Laporan Kinerja	

Palangka Raya, Juli 2023

Mengetahui :
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN
Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI		Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2023 Tanggal Revisi : 31 Juli 2023 Tanggal Efektif : Disahkan oleh : 	
Sub. Bagian Penyusunan Program		Nama SOP : Penyusunan Perjanjian Kinerja	
Dasar Hukum 1. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.		Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Penetapan Kinerja OPD 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Penetapan Kinerja OPD.	
Keterkaitan SOP 1. SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pengumpulan Data dan Informasi 3. SOP Pelaksanaan Rapat 4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 5. SOP Pengarsipan		Peralatan/ Perlengkapan 1. Renstra 2. Renja 3. Format Perjanjian Kinerja 4. Perangkat Komputer	
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.		Pencatatan & Pendataan Direkam/disimpan secara elektronik dan manual	

SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Ketua Tim Perencanaan Program	Staf/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan Perjanjian Kinerja					Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Perjanjian Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format Perjanjian Kinerja	2 Jam	Format Perjanjian Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Perjanjian Kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format Perjanjian Kinerja	2 Jam	Draft usulan Perjanjian Kinerja	
4	Mengundang Kadis dan Pejabat Esselon III untuk rapat pembahasan Perjanjian Kinerja					Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat	
5	Melaksanakan Rapat pembahasan Perjanjian Kinerja					Draft Perjanjian Kinerja	2 Jam	Draft Perjanjian Kinerja	
6	Menghimpun format data dan informasi Perjanjian Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Draft Perjanjian Kinerja	3 Jam	Draft Perjanjian Kinerja	
7	Menganalisa data dan informasi Perjanjian Kinerja yang telah terkumpul					Draft Perjanjian Kinerja	4 hari	Draft Perjanjian Kinerja	
8	Membuat Konsep Perjanjian Kinerja					Draft Perjanjian Kinerja	2 hari	Dokumen Perjanjian Kinerja	
9	Mengoreksi Konsep Dokumen Perjanjian Kinerja					Dokumen Perjanjian Kinerja	1 hari	Dokumen Perjanjian Kinerja	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Ketua Tim Perencanaan Program	Staf/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kadis untuk memintakan persetujuan	<pre> graph TD KD[Kepala Dinas] --> S[Sekretaris] S --> KTP[Ketua Tim Perencanaan Program] KTP --> SJ[Staf/JFU] </pre>			+	Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Jam	Dokumen Perjanjian Kinerja	
11	Penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kadis kemudian diteruskan ke Tim Perencanaan Program					Konsep surat pengantar	10 menit	Surat pengantar	
12	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Dokumen Perjanjian Kinerja	15 menit	Dokumen Perjanjian Kinerja	
13	Mengantar surat, Menggandakan dan mempersiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja				<pre> graph TD SJ[Staf/JFU] --> B1[] B1 --> D{ } D --> B2[] </pre>	Dokumen Perjanjian Kinerja		Dokumen Perjanjian Kinerja	

Palangka Raya, Juli 2023

Mengetahui :

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. Suryati Syamsul, MPPM
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3228825
e-mail :dinkesprov Kalteng1@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 933 /TU-1/I-2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Membaca :**
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2023
 - Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan upaya pencapaian target indikator derajat kesehatan di Kalimantan Tengah.
 - Bahwa untuk mencapai persamaan persepsi maupun langkah selanjutnya dari setiap pelaksanaan program kesehatan di setiap jenjang administrasi.
 - Bahwa untuk mencapai keberhasilan visi - misi Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026, maka dipandang perlu untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Mengingat :**
- Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 120/Menkes/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi dan Kabupaten/Kota Sehat.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun bertugas mempersiapkan segala bahan dan literatur untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
- KETIGA** : Pembiayaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 Januari 2023


Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

NOMOR : 933 /TU-1/I-2023

TANGGAL : 13 Januari 2023

**PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Penyusunan Program
Anggota :
1. Ashhabul Kahfi, SKM
2. Desi Adventie, SE
3. Ratih Puspita, S.Tr.Keb.,Bd
4. Yuri Dartati, S.Kep, M.Kes

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
TANGGAL : 13 JANUARI 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006



Diterbitkan oleh :
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT 2024